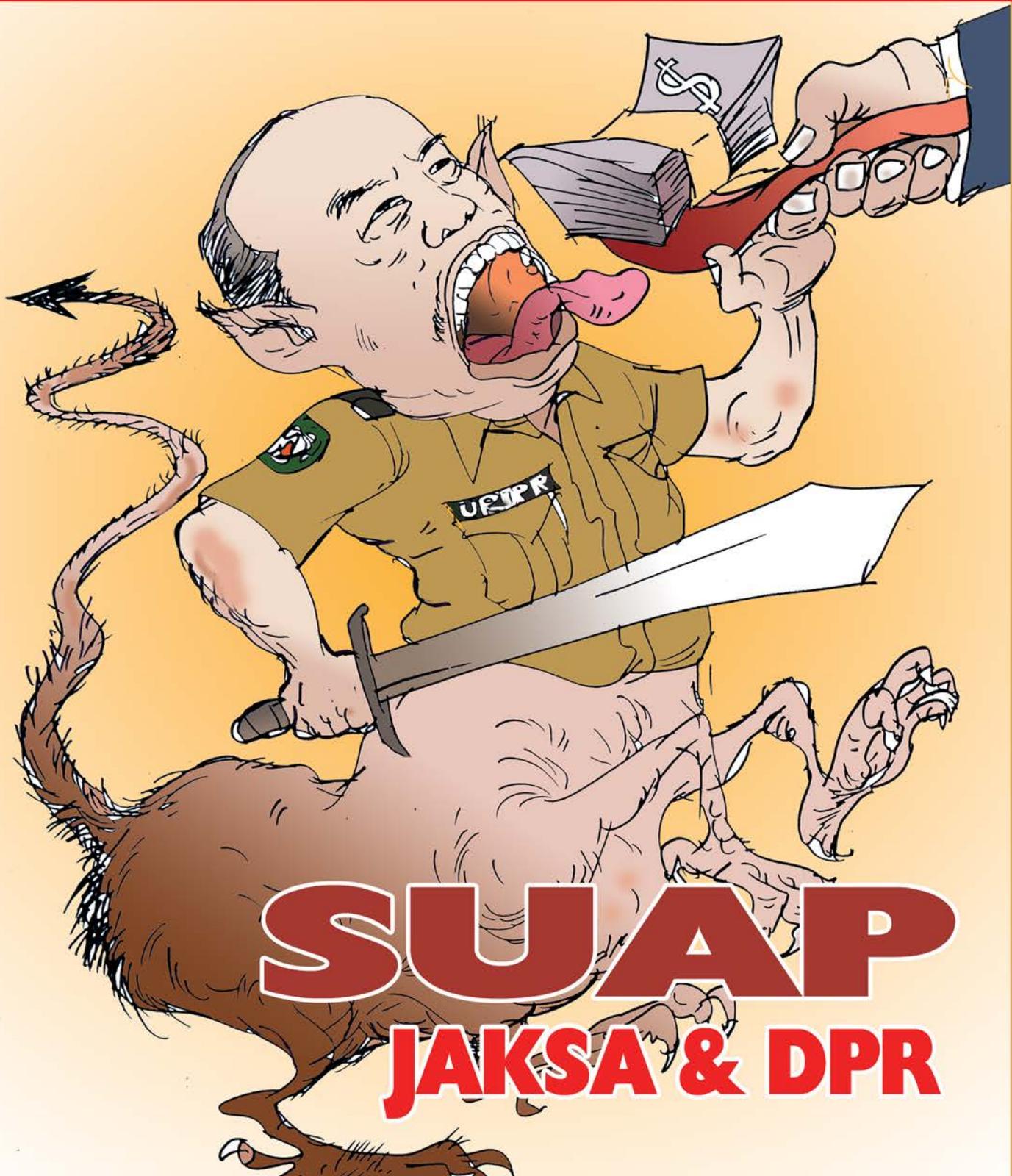


ASSA JELAJAH JAKARTA

BERITA INDONESIA[®]

EDISI 56 TAHUN III ★ 1 MEI 2008

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)



SUAP JAKSA & DPR

BERITA INDONESIA[®]

www.beritaindonesia.co.id

MAJALAH BERITA PILIHAN

*All in One
One for All*



DEMOKRASI, TOLERANSI DAN PERDAMAIAN



Sampul/Illustrasi:
Dendy Hendrias

Edisi No. 56/Th.III/ 1 Mei 2008

DARI REDAKSI 4
VISI BERITA 5
SURAT PEMBACA 6
BERITA TERDEPAN 8
HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 9

BERITA UTAMA

JAKSA ENAM MILYAR

Upaya pemberantasan korupsi semakin suram. Sebab, sejauh ini pemberantasan korupsi justru menimbulkan praktik korupsi baru, terutama suap. Lalu, kapan korupsi bisa diberantas?.. 16



Dolar Dalam Kardus 19
 Jampidsus *Ngaku* Kaget 22
 Sjamsul Tak Datang, Kemas ke Singapura 26
 Gaji Jaksa dan Pembuktian Terbalik 28
 Tolong Jangan Hakim Saya 29
 Urip-Ayin Dalam Berita 30
 Mafia UUD di Senayan 32

BERITA POLITIK

Bukan Hal Baru 33

BERITA EKONOMI

Ancaman Resesi Global 47

BERITA KHAS

Disukai Pasar 48

BERITA NASIONAL

Kemunduran atau Kemajuan? 50

BERITA HUKUM

Negara Berhak, Pengusaha Keberatan 52

LENERA



ASSA JELAJAH JAKARTA

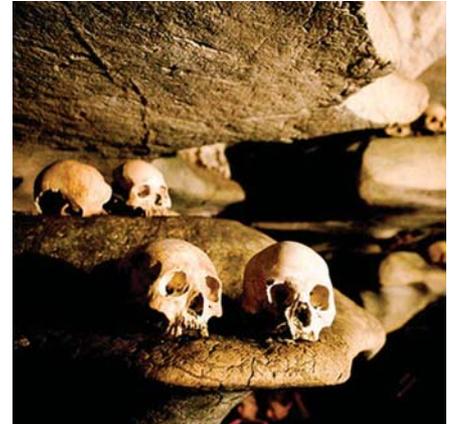
Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang memimpin langsung khafilah Al-Zaytun, yang tergabung dalam Asosiasi Sepeda Sport Al-Zaytun disingkat ASSA menjelajah jalanan Jakarta, Minggu 24 Februari 2008. Kegiatan ini merupakan *try-out* ketiga untuk menyalakan nyali ASSA yang berencana bersepeda keliling Jawa-Madura, 26 Mei - 10 Juni 2008. 34

BERITA TOKOH

Mahfud M.D. 56
 Menkes Siti Fadhilah Supari 56
 Kusmayanto Kadiman 57
 Wiranto 57

BERITA BUDAYA

Tetap Hidup Selamanya 58



BERITA DAERAH

Harapan Masyarakat Purwakarta 60
 Ada Apa di Balik Ambisi Walikota 61
 Poling SMS Jaring Beberapa Nama 62
 Bank Jabar Banten Raih Penghargaan 62

BERITA KESEHATAN

Enterobacter Sakazakii Siapa Takut? 63

BERITA LINGKUNGAN

Lebih Mahal Pisang Goreng 64

BERITA Hiburan

Ayat-ayat Cinta di Dunia Blog 65



BERITA BUKU

Belajar Sejarah Lewat Komik 66

Pemimpin Umum:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:

Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:

MYR Agung Sidayu

Imam Prawoto

Dendy Hendrias

Suryo Pranoto

IN HEADNEWS (Liputan, Litbang & Pusdat):

Mangatur Lorieclide Paniroy (Redaktur Eksekutif)

Koordinator Liputan:

Haposan Tampubolon

Sekretaris Redaksi:

Retno Handayani

Redaktur:

Suryo Pranoto

Marjuka Situmorang

Staf Redaksi:

Samsuri, Nawawi, Ikhwan Triatmo, Sarjiman,

Doan Adikara Pudan, Amron Ritonga, Dian Gina

Rahayu, Bantu Hotsan, Nur Azizah

Wartawan Foto:

Wilson Edward

Karikaturis:

Dendy Hendrias

Desain Grafis:

ESERO Design, Arief Maulana

Biro Redaksi:

Medan: HM Aulia E Panggabean (Kepala), Bontor

Simanullang, Jawa Barat: Ade Wiharyana (Kepala),

Bernard Sihite, Prana Citra, Herman Efendy,

Tarakan: Sudirman Leonard Pohan; Amerika

Serikat: Mibsam Bahanan (Maryland)

Penerbit:

PT Berita Satria Wiratama

Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan PT. Asasira

Komisaris:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/Pemimpin Perusahaan:

Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:

Samsuri

Iklan dan Promosi:

Imam Prawoto

Herni Dewi Farida

Kuangan dan Umum:

Mangatur Lorieclide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:

Abdul Halim

Marjuka Situmorang

Bantu Hotsan

Harga:

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A Jakarta Selatan.

Telp. (021) 8293113, 8292735, 83701736, 70930474

Fax. (021) 83787235

Iklan: Gedung Dewan Pers Lt.1, Jl. Kebon Sirih No.

32-34, Jakarta Pusat, Telp. (021) 34830840 - 32195353

E-mail:

redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

Website:

www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X

Merek: Ditjen HAKI Sertifikat IDM No. 000.108.028

Percetakan:

PT Gramedia (Isi di luar tanggung jawab percetakan)

DARI REDAKSI



Rehat: Syaykh AS Panji Gumilang bersama tim ASSA ditemui Pemred Berita Indonesia dan kru saat rehat selepas bersepeda

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Sidang Pembaca,

Urip Tri Gunawan, anggota jaksa di Kejaksaan Agung, awal Maret lalu, membuat riuh suara publik di negeri ini. Media massa pun tak henti hingga sebulan terakhir memberitakan perkembangan kasus tertangkaptangannya jaksa tersebut menerima uang ratusan ribu dollar yang diduga suap dari Artalyta, orang dekat Sjamsul Nursalim, mantan bos BDNI. Tak berapa lama kemudian, tertangkap pula seorang anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP, Al Amin Nur Nasution bersama Sekab Bintang Azirwan dalam kasus suap.

Masyarakat sebenarnya tidak kaget mendengar seorang jaksa dan anggota DPR menerima suap, karena hal tersebut sudah menjadi rahasia umum di republik ini. Tapi yang membuat masyarakat tertarik dengan kasus jaksa ini adalah jumlah uang yang terbilang cukup besar, yakni sekitar Rp6,1 miliar. Itu pun diduga masih sebagian dari jumlah yang sebenarnya. Mengetahui jaksa Urip adalah ketua tim yang menangani kasus BLBI di BDNI yang dua hari sebelumnya dinyatakan tidak terbukti korupsi, membuat orang tidak percaya jika uang sebanyak itu hanya untuk Urip sendiri. Publik menunggu siapa lagi yang akan terseret dalam kasus ini.

Dengan merangkum semua berita terkini mengenai perkembangan kasus ini, kami secara khusus mengangkat masalah ini dalam Berita Utama agar pembaca mengetahui kasus ini secara rinci dari awal. Di samping itu, kami juga ingin memaparkan penelitian kami tentang bagaimana kecepatan dan ketajaman media, khususnya media cetak mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Di rubrik Lentera kali ini, kami menyajikan pembudayaan hidup sehat dan mencintai lingkungan di Al Zaytun melalui rencana jelajahi Pulau Jawa-Madura dengan bersepeda, yang ujicobanya dilakukan di berbagai tempat termasuk di jalan protokol Jakarta.

Kami juga menyajikan berita mengenai proses panjang pencalonan gubernur BI yang akhirnya mengerucut ke calon tunggal dan terpilih yakni Boediono dalam rubrik Berita Khas. Berbagai berita terbaru lainnya juga kami sajikan untuk Pembaca di antaranya: masalah melonjaknya harga beras dunia (Berita Terdepan), ancaman krisis global (Berita Ekonomi), kemelut di negeri Dalai Lama, Tibet (Berita mancanegara). Selain itu, berbagai berita menarik dan mendidik lainnya juga kami sajikan dalam berbagai rubrik.

Karena keterbatasan halaman, kami juga terus mengoptimalkan rubrik High-light dengan harapan, informasi bisa kami sampaikan sebanyak mungkin pada Pembaca. Tak kalah penting, karikatur Bung Wardo dan karikatur lainnya terus mendampingi anda dengan kritik dan sarannya yang menghibur.

Akhirnya kami ucapkan selamat membaca dan semoga anda berkenan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jaksa & DPR Tanpa Suap

Citra jaksa dan DPR di republik ini benar-benar terpuruk. Tertangkapnya Ketua Tim Penyelidikan Kasus BLBI-BDNI, Urip Tri Gunawan, menerima uang yang diduga suap US\$ 660.000 dari Artalyta Suryani, teman baik Sjamsul Nursalim, pengusaha yang terkait kasus BLBI, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2 Maret 2008, telah membuka tabir wajah buruk para jaksa. Begitu pula carut-marut wajah anggota parlemen dengan tartangkapnya anggota Komisi IV DPR, Al Amin Nur Nasution dan Sekab Bintang Azirwan, tersangka kasus suap terkait pengalihfungsian hutan lindung di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Tak heran bila kedua kasus suap ini semakin menyembulkan skeptisme masyarakat tentang *law-enforcement*, terutama dalam upaya memberantas korupsi.

Kasus jaksa ini membuktikan bahwa upaya pemberantasan korupsi justru menimbulkan praktik korupsi baru, terutama suap. Lalu, kapan korupsi bisa diberantas? Atau kapan hukum bisa ditegakkan? Jawaban paling utama dan strategis tetapi sekaligus pragmatis atas pertanyaan ini adalah tatkala para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) tak mau lagi meminta dan/atau menerima suap (KKN).

Pertanyaan berikut yang cukup mengusik kalbu: Masih adakah jaksa (juga polisi dan hakim) yang bertugas tanpa suap? Kalau jawabannya tidak ada lagi jaksa yang bersih dari suap (KKN), maka sulit membayangkan tegaknya hukum, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi.

Suatu rahasia yang sudah diketahui oleh umum, tetapi nyaris tidak ada upaya serius untuk membuktikannya secara hukum, bahwa nyaris tidak ada proses peradilan di negeri ini yang terbebas dari suap. Rahasia umum ini kedengarannya memang terlalu skeptis dan pesimistis. Tetapi, dalam kenyataan keseharian publik, hal itu sudah lama menjadi rahasia umum (suatu rahasia yang umum sudah tahu). Dirasakan, dibicarakan dan dikeluhkan, tetapi tidak terbukti secara hukum.

Kasus jaksa Urip, mungkin akan menjadi suatu kasus yang akan terbuktikan. Disebut masih mungkin, karena kemungkinan lain (bisnis permata) masih mungkin terjadi (terbukti).

Namun, melihat satu sisi dari komitmen dan integritas Jaksa Agung Hendarman Supandji, untuk membersihkan aparatnya dari suap (KKN), kita masih punya harapan bahwa *law-enforcement* suatu ketika akan dapat ditegakkan.

Sehubungan dengan itu, kita menyarankan kepada Jaksa Agung, agar secara maksimal dapat menggunakan momentum (kasus Urip) ini sebagai titik awal menegakkan citra kejaksanaan (jaksa tanpa suap). Dalam konteks ini, Jaksa Agung jangan memberi kesempatan kepada korpsnya untuk mereduksi atau mengalihkan kasus Jaksa Urip menjadi sekadar pelanggaran etika berbisnis permata.

Tindakan nyata Jaksa Agung memberhentikan Jaksa Urip serta mengganti Jampidsus Kemas Yahya dan Direktur Penyidikan Pidsus Muhammad Salim, cukup memperlihatkan langkah awal keseriusannya menegakkan citra kejaksanaan, sekaligus komitmennya memberantas korupsi.

Sesudah itu, kita masih berharap, Jaksa Agung dan jajarannya akan serius membersihkan korpsnya dari perilaku tak terpuji, terutama setiap kali menangani perkara.



Misalnya, secara internal, Jaksa Agung perlu mendata harta kekayaan para jaksa serta mengamati dengan seksama gaya hidup keluarganya. Dari mana sumber harta kekayaan mereka? Adakah jaksa dan keluarganya bergaya hidup mewah? Mewah dalam arti jauh melebihi tingkat pendapatannya yang wajar.

Kita menunggu tindakan nyata Jaksa Agung tentang hal ini sebagai titik awal yang serius menegakkan citra kejaksanaan, yang pasti sekaligus menegakkan keadilan di negeri ini. Sehingga kelak, kita akan memiliki banyak jaksa yang bersih dari suap (KKN). Jaksa yang bersahaja dengan gajinya namun berkomitmen dan berintegritas tinggi dalam menegakkan hukum dan keadilan. Bagi jaksa-jaksa seperti itulah sepatasnya diberikan kenaikan gaji berlipat ganda. Sebab bagi jaksa yang serakah, berapa pun tingginya gaji, tidak akan pernah cukup.

Hal serupa juga kita harapkan dari komitmen dan integritas para wakil rakyat di DPR, DPRD dan DPD. Mereka yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat kiranya tidak malah menindas kepentingan rakyat dengan mementingkan kepentingan sendiri. Kasus suap yang melibatkan anggota DPR, yang juga sudah menjadi rahasia umum, kiranya dihentikan. Jadilah wakil rakyat yang bermoral dan bermartabat. Sehingga demokrasi yang kini tengah bertumbuh pesat di negeri ini benar-benar bermanfaat demi kesejahteraan rakyat dan demi tegaknya keadilan. ■



Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

- http ://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/
- email :redaksi@berindo.com
- surat : Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet, Jaksel 12840

Telp. (021) 70930474, 8293113
(021) 83701736

Tafsir Presiden atas Optimalisasi Hutan Lindung

Diterbitkannya PP No.2/2008 tentang hutan lindung mengundang kontroversi. PP itu dianggap akan menimbulkan kerusakan karena mengizinkan pembukaan hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan tambang, infrastruktur telekomunikasi, dan jalan tol. Menurut Presiden Yudhoyono, banyak yang keliru menafsirkan PP tersebut. Dijelaskan, PP No.2/2008 sesungguhnya berawal dari PP No.1/2004 sebagai revisi dari UU No.41/1999 yang juga ditindaklanjuti oleh Keppres No.41/2004. Keppres yang dikeluarkan

Presiden Megawati tersebut memberi izin tetap terhadap 13 perusahaan di bidang pertambangan, namun tidak menjelaskan kompensasi dan kontribusi yang harus diserahkan perusahaan tersebut kepada negara. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah merasa perlu mengatur seluruh proses produksi yang dihasilkan hutan lindung sehingga hutan kita makin selamat sekaligus mendatangkan penerimaan negara untuk kesejahteraan rakyat. Semoga semangat itu bisa dicapai sehingga kontra atas PP tersebut dengan sendirinya terjawab dan terbantahkan.

Muhammad Zaki Fadli

muhammadzakifadli@yahoo.co.id

Ironi Calon Gubernur BI di Tangan DPR

Hasil *fit and proper test* terhadap dua calon gubernur Bank Indonesia (BI) yang diajukan pemerintah ternyata ditolak DPR. Hasil ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sebelumnya. Sebagaimana diketahui, sebelum *fit and proper test* dilakukan, beberapa anggota DPR Komisi XI sudah menyatakan menolak kedua calon tersebut. Sikap DPR yang menolak calon sebelum dilakukan uji

kelayakan dan kepatutan, mencerminkan arogansi dan sikap tidak terpuji. Menolak memang hak sepenuhnya DPR dan dijamin UU. Namun, penolakan itu tidak serta merta membuktikan bahwa calon yang diajukan pemerintah itu tidak kredibel karena kita belum tahu alasan di balik penolakan itu. Lebih dari itu, kita juga tidak tahu tingkat kredibilitas dan kapasitas anggota dewan yang mengujinya. Yang pasti, kalau melihat penolakan sebelum dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, sudah bisa dipastikan bahwa kepentingan politik di balik penolakan lebih kentara daripada pertimbangan lainnya.

Andi Rahmat

andirahmat@yahoo.co.id

Pemerataan Pendidikan Dipertanyakan

Rencana strategi pemerintah menuntaskan wajib belajar sembilan tahun pada 2008 ini membutuhkan perjuangan ekstra. Pasalnya, hingga akhir tahun 2007, 111 kabupaten/kota dan tujuh provinsi di Indonesia ternyata partisipasi kasar SMP (batas wajib belajar sembilan tahun) masih kurang dari 80%. Dalam upaya pemerataan pendidikan, selayaknya juga memerhatikan kondisi sosiologis masyarakat. Tidak setiap anak-anak usia sekolah bisa dimobilisasi untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Sebagian dari mereka kerap lebih memilih mengais nafkah ketimbang sekolah. Dengan demikian, pemerintah perlu mengatur siasat agar pendidikan dasar bagi mereka tak terabaikan dengan menggandeng kelompok-kelompok masyarakat untuk memberikan program pendidikan secara nonformal. Pemerintah juga harus tetap memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Fakta tak terbantahkan adalah, banyak anak-anak putus sekolah disebabkan biaya pendidikan yang tinggi. Melihat realitas sebagian masyarakat di negeri ini masih kategori kurang mampu, pemerintah seyogianya mengendalikan mahalnya pembiayaan pendidikan.

Hendra Sugiantoro

Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta

PASTIKAN

TARIF IKLAN BERITAINDONESIA®

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Hlm Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwisata	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Hlm Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Hlm Horizontal Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Hlm Vertical Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Hlm Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000
Iklan kupung (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan		@ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:

Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736

Fax.(021) 83787235, 98101871

KALAU
BERAS
SURPLUS
SIAP KITA
EKSPOR



HERAN,
BAPAK INI
PELINDUNG RAKYAT
APA PEDAGANG
SIH?
MASAK AKU
DISURUH MAKAN
BERAS BERKUTU
TERUS



Handwritten signature

Tempat Anda untuk Berlangganan Majalah BERITAINDONESIA

Anda yang berada di luar Pulau Jawa dapat menghubungi alamat di bawah ini :

BANDA ACEH : BTN Ajuen, Lr Melati No. 118 Kec, Peukan Bada, Banda Aceh 23351. Tlp (0651)41093, **MEDAN** : Komplek Vila Palm Kencana Blok R No. 10 KM 12, Medan-Binjai 20351. Tlp (061)8460646, **SIANTAR** : Jl. Rambung No. 18, Pematang Siantar, **LABUHAN BATU** : Jl. Padang Bulan No. 28, Rantau Prapat. **KARO** : Jl. Sangab Enlau No. 51 Kaler Jahe. **RIAU** : Jl. Ababil No. 15B Rt 07 Rw. 07, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Pekanbaru 28124, Riau. Telp (02761) 26578, **RIAU UTARA** : Perum Beringin Patra Gg. Poros No. 3 Rt 02/09, Bukit Datuk, Dumai 28825. Telp (0765)36219. **RIAU SELATAN** : Jl. Pattimura No. 28C Rt. 06/02, Kel. Skip Hilir, Rengat Timur, INHU, Riau. Telp (0769)21932, **RIAU KEPULAUAN** : Jl. Sri Pulau Gg. Kayu Manis No. 129W Rt. 03/02, Kel. Bengkalis Riau. Telp (0766)22924, **PADANG** : Jl. Pamancangan I No. 1Rt. 006/02 Kel. Pasar Gadang, Padang Selatan, Sum-Bar 25210. Telp (0751)27289, **JAMBI** : Jl. Depati Purbo, Komplek Karya Telawai Permai II No. 06 B, Kel. Pematang Sulur RT 16, Kec. Telanaipura, Kota Jambi. Telp 081366106709, **BENGKULU** : Jl. Kemang Manis No. 8 Rt. 08/Rw. 2, Kel. Sawah Lebar, Kec. Gading Cempaka, Kodya Bengkulu 38228. Telp (0736)20663, **PALEMBANG** : Perum Mas Karebet Blok A1 No. 15 Palembang 30154. Telp (0711)416545, **MUARA ENIM** : Perum Gunung Ibul Blok C2 No. 8 Kab. Prabumulih Sumatera Selatan Telp (0713)322420, **LAMPUNG** : Jl. Wiraswasta No. 23 Rt. 02 Lk. I Kel. Gedong Meneng, Kec. Kedaton, Bandar Lampung 35145. Telp (0721)701281, **KOTABUMI** : Jl. Jend. Sudirman No. 49 Kota Gapura Kotabumi Lampung Utara. Telp (0724)328369, **PONTIANAK** : Jl. Karimata No. 19, Kelurahan Sui Bangkong Pontianak 78116, **SINGKAWANG** : Jl. Pembangunan Gg. Sukaramah No. 27A Singkawang Kal-Bar, **SINTANG** : Jl. Imam Bonjol No. 54 Sintang 78611. Telp (0562)21544, **KETAPANG** : Jl. Kol. Sugiono No. 48 Ketapang, **BALIKPAPAN** : Jl. Sepinggan XI, Rt 33 No. 6, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kodya Balikpapan 76115. Telp (0542) 764365, **PASIR** : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 12 Rt. 05 Rw. 02 Tanah Grobot Kab. Pasir, Kal-Tim. Telp (0543)22335, **SAMARINDA** : Jl. Latsitarada III, Perum Bukit Indah Blok B No. 6, Kel. Sel Kunjang Samarinda. Telp (0541)273035, **BERAU** : Jl. SM Aminuddin No. 749 Tanjungredep Kab. Berau Kal-Tim. Tlp (0554)23130, **BANJARMASIN** : Komplek Kayu Tangi I No. 28 Rt. 45, Kec. Banjar Utara Banjarmasin 70123. Telp (0511)304396, **PALANGKARAYA** : Jl. Karanggan No. 1 Kelurahan Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kodya Palangkaraya 73113, Kalimantan Tengah. Telp (0536)38958, **PANGKALAN BUN** : Jl. Perwira No. 1 Rt/Rw 05, Kel. Mendawai, Kec. Arsel, Pangkalan Bun Kal-Teng. Telp (0532)24452, **KAPUAS** : Jl. Seroja No. 2 Selat Dalam, Kuala Kapuas, Kal-Teng. Telp (0513)24082, **BUNTOK** : Jl. Ampah Buntok, No. 24 Rt. 40. Ampah, Barito Selatan, Kal-Teng. Telp (0622)31334, **MANADO** : BTN Nusantera Permai Blok C No. 11 Mapanget Barat, Manado 9524, **MAKASSAR** : Komplek Mangasa Permai Jl. Tallasalapang II Blok J1 No. 12, Makassar, Sul-Sel. Telp (0411)863655, **PAREPARE** : Jl. Wakke'e No. 5 Parepare Sul-Sel. Telp (0421)22785, **GOWA** : Jl. Syekh Yusuf VII Gowa. Telp (0411)861661, **BONE** : Jl. Hussain Jeddawi Baru No. 9A, Bone, Sul-Sel. Telp (0481)2000041, **PALOPO** : Jl. Imam Bonjol No. 3 Palopo. Telp (0471)24310, **PALU** : Jl. Tulip II No. 1, Perumnas Balaroa, Palu, Sul-Teng. Telp (0451)460717, Fax. (0451)460717, E-mail: ypi_calebaswustho@yahoo.com. **KENDARI** : Jl. A. Yani 204 Kendari, Telp (0401) 390913, HP. 081320696320 a/n. S. Edi Nurrahman. **BUTON** : Jl. MH. Thamrin No. 32A, **AMBON** : BTN Kanawa Indah Blok C-3 No. 12 Air Kuning, Ds. Batumerah Kodya Ambon, Maluku 97128. Telp (0911)310427, **TIMIKA** : Jl. Pendidikan No. 10, Desa Kopra Kopa, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika/Timika, Irian Jaya, **KUPANG** : Jl. Trikora No. 16 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Air Mata, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT 85000, **BELU** : Perum Ray Belu Permai A/9, Belu. Telp (0389)22408, **MATARAM** : Jl. R. Suprpto No. 37 Ampenan, Kodya Mataram 83000. Telp (0370)632331, **LOMBOK** : Jl. Pejanggih No. 66 Pancor. Lombok. Telp (0376)21718, **SUMBAWA** : Jl. Hasanuddin Gg. Teratai, Sumbawa. Telp (0371)21070, **BALI** : Jl. Buana Raya Gg. Buana Kerti No. 3 Pd.Sambian Denpasar Barat 80117. Telp (0361)485890, **MALAYSIA** : 32 Jalan Tengku Ampuan Zabedah 9/A, 40100 Shah Alam, Selangor. Telp (03)55137009. **MEDAN** : H.M. Aulia Effendi Panggabean, Jl. Kelambir V / Gang Kalpataru No. 18, Tanjung Gusta Helvetia, Sumatera Utara - 20147 – **JAWA BARAT** : , Ade Wiharyana, Jl. Purnawarman No.5, Bandung – **TARAKAN** : S.L. Pohan, Jl. Gereja Rt.17 No.59, Markoni, Tarakan - Kaltim 771211 – **PURWAKARTA** : Bernard Sihite, Kantor Perwakilan PWI, Jl. KK Singawinata No.23, Purwakarta, Tlp. (0264) 205081

Lapar di Lumbung Padi

Sejak beberapa bulan terakhir, krisis bahan pangan melanda dunia yang berdampak pada melambungnya harga komoditi itu. Setelah jagung, gandum, dan kedelai, kini giliran krisis beras. Harga beras dunia kini melambung mencapai US\$700 per ton, yang merupakan harga tertinggi sepanjang 20 tahun terakhir.

Kenaikan harga pangan, termasuk beras, ini sebenarnya sudah diprediksi jauh-jauh hari. Bahkan oleh berbagai lembaga dunia, krisis digambarkan mengerikan, karena diperkirakan akan melanda 36 negara di dunia, termasuk Indonesia. Krisis diprediksi begitu meluas, bahkan digambarkan akan menjadi krisis global terbesar pada abad ke-21.

Krisis beras ini terjadi karena kelangkaan stok sebagai dampak perubahan iklim. Di samping itu, sejumlah negara produsen utama beras juga membuat kebijakan pengurangan ekspor untuk mengendalikan laju inflasi di negaranya. Vietnam, yang merupakan produsen beras kedua terbesar dunia setelah Thailand, tahun ini menerapkan pajak ekspor berasnya. Di lain pihak, banyak negara sedang berusaha mengimpor beras untuk menjaga stok negaranya. India misalnya, mulai 20 Maret, menurunkan pajak impor beras hingga nol persen. China juga saat ini disebut-sebut tengah berusaha keras mengumpulkan beras di gudang untuk cadangan pangan mereka.

Ingat beras berarti ingat petani. Dalam hal kenaikan harga beras ini, sepantasnya pihak pertama yang paling menikmati adalah petani. Tapi di Indonesia, petani belum tentu ikut menikmati kenaikan harga di pasar dunia. Sebab, sudah menjadi penyakit menahun di negeri ini, setiap panen raya, harga gabah di petani selalu anjlok. Seperti diakui Menteri Pertanian Anton Apriyantono,



Naiknya harga beras dunia tidak membuat petani Indonesia mendapat untung. Penyebabnya, pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha daripada petani.

meski harga beras di pasar dunia 700 dollar AS per ton, harga gabah lokal justru turun. "Saya sedang prihatin. Harga gabah jatuh karena produksi berlebihan," kata Anton.

Kenaikan harga beras dunia ini, seharusnya menguntungkan Indonesia sebagai negara agraris. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Karena banyak faktor yang akan mempengaruhi seperti kondisi alam, keterbatasan Bulog, dan ulah spekulasi yang hanya mencari untung.

Walaupun Departemen Pertanian memperkirakan produksi beras tahun ini akan mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan kemungkinan surplus, namun berbagai faktor bisa membelokkan perhitungan tersebut. Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar juga mengatakan, lembaganya masih hati-hati menanggapi

hal tersebut sebab produksi sangat dipengaruhi kondisi alam.

Kehati-hatian Bulog itu cukup mendasar, mengingat beberapa tahun terakhir ini, Indonesia hampir rutin mengimpor beras sekitar 2 juta ton per tahun. Jadi beralasan jika ada yang meragukan kebenaran produksi beras dalam negeri bisa mencukupi kebutuhan nasional tahun ini. Untuk mendukung stabilisasi harga dan ketahanan pangan, Perum Bulog akan fokus membeli beras dalam negeri. Dari kebutuhan 2,8 juta-3 juta ton beras tahun 2008, Bulog menargetkan pembelian beras dari produksi dalam negeri 2,43 juta ton. Beras itulah nantinya yang akan digunakan Bulog untuk keperluan beras bagi rakyat miskin atau raskin, untuk stabilisasi harga, antisipasi bencana, keperluan stok

Bulog, dan cadangan beras pemerintah.

Tapi, di tengah usaha agar pemerintah tidak mengimpor beras, justru lahir kecemasan baru. Yaitu, larinya beras Indonesia ke pasar luar negeri. Kecemasan itu terdengar lucu, karena selama ini Indonesia lebih dikenal sebagai pengimpor daripada pengekspor beras. Dan defisit atas pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri masih terus berlangsung.

Namun, itu bisa saja terjadi karena selisih harga dalam negeri dan pasar dunia cukup besar. Harga beras dalam negeri saat ini berkisar antara US\$300 hingga US\$400 per ton. Sedangkan di pasar dunia, harga terus merambat naik melewati US\$700 per ton. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah berjanji akan mengamankan pasokan beras dalam negeri. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah dengan mengenakan bea keluar beras.

Memperhatikan persoalan pangan yang terus berulang di negeri ini, ke depan, selain menstabilkan harga beras di dalam negeri, juga diharapkan adanya upaya-upaya peningkatan produksi gabah dan beras dalam negeri. Kebijakan perberasan perlu diarahkan untuk meningkatkan pasokan, kalau bisa sampai bisa meng-ekspor.

Untuk itu, upaya menggenjot produksi beras wajib diteruskan, baik melalui pembukaan sawah-sawah baru maupun melalui peningkatan produktivitas. Dengan demikian, Indonesia diharapkan memiliki kedaulatan pangan, sehingga tidak menjadi korban dari gejolak harga dunia.

Kenaikan harga beras di pasar dunia sekarang ini sangat tepat menjadi langkah awal Indonesia untuk benar-benar melepaskan ketergantungan pada beras impor. Sehingga anekdot yang mengatakkan lapar di lumbung padi tidak lagi melekat di negeri ini.

■ MS, MLP

Direksi Baru Pertamina Dilantik

05/03 - Menteri BUMN Sofyan Djalil melantik jajaran direksi PT Pertamina yang baru. Mereka yang menjabat direksi baru itu adalah Karen Agustiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Direktur Utama Pertamina, diangkat menjadi Direktur Hulu menggantikan Sukusen Soemaringa.

Kemudian, Rukmi Hadi Hartini yang sebelumnya menjabat sebagai Deputy Umum Direktorat Umum Pertamina diangkat menjadi Direktur Pengolahan, menggantikan Suroso Atmarmartoyo. Waluyo diangkat sebagai Direktur Umum dan SDM menggantikan Sumarsono.

Sementara Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama masih dijabat yang lama yakni, Ari H Soemarno dan In Arifin Takhyan.

Presiden Bayar Pajak Rp 127 Juta

08/03 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengembalikan Surat Pemberitahuan (SPT) tagihan pajaknya untuk Tahun 2007 dan membayar pajak perorangannya sebesar Rp 127 juta di Unit Pelayanan Terpadu Pembayaran Pajak Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Jakarta. "Pajak yang saya bayarkan tahun ini tidak terlalu banyak bertambah dibanding tahun lalu karena memang gaji presiden tidak naik dari tahun ke tahun. Kalau pun ada pertambahan itu dari tunjangan pensiun saya yang naik," kata Presiden usai membayarkan pajak perorangannya. Presiden, yang selama berkunjung ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan di Jalan Gatot Subroto Jakarta didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, mengatakan

bahwa sebelumnya pajak perorangannya senilai Rp 115 juta. Pada kesempatan itu, Presiden meminta pengusaha yang selama ini tidak taat membayar pajak untuk segera menyelesaikan kewajibannya dan meminta Direktorat Jendral Pajak untuk menindak tegas pengusaha yang tidak taat membayar pajak.

PLN Harus Segera Rampungkan Proyek 10.000 MW

10/03 - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN), Sofyan Djalil, meminta PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero), segera merampungkan proyek pembangkit listrik 10.000 Mega Watt (MW) terlebih dulu setelah terbentuk jajaran direksi yang baru. Selain itu, pihaknya juga akan berupaya mengatasi persoalan energi primer yang membelit PLN. Energi primer untuk bahan bakar pembangkit PLN terdiri dari BBM, batu-

bara, dan gas tetapi masih banyak yang menggunakan BBM sementara justru daya dukung dan peralatan PLN lebih mengarah pada gas dan batubara yang pasokannya masih amat minim. Sementara itu, Direktur Utama PLN, Fahmi Mochtar, mengatakan bahwa pihaknya akan mengurangi ketergantungan pada BBM dengan mempercepat proyek 10 ribu MW. "Kita akan mempercepat proyek 10 ribu MW dan kita juga coba lakukan dengan mempercepat masuknya gas pembangkit-pembangkit kita yang selama ini memang disediakan untuk gas," katanya menambahkan.

Indonesia Bakal Bangun 4 PLTN

12/03 - Pemerintah merencanakan membangun empat pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) hingga 2025 untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. "Jika satu PLTN mampu menghasilkan sekitar 1.200 MW, hingga 2025 masih

Karikatur Berita



dibutuhkan sekitar empat pembangkit lagi untuk memenuhi kebutuhan listrik," kata Menteri Negara Riset dan Teknologi, Kusmayanto Kadiman saat melakukan kunjungan kerja ke Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Beberapa wilayah sudah disurvei untuk dijadikan lokasi pembangunan PLTN, antara lain di wilayah Utara Pulau Jawa serta sebelah selatan Kalimantan. Pembangunan PLTN merupakan kebijakan nasional, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Pembangunan PLTN juga dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pembangunan PLTN Muria di Jepara, Jawa Tengah, direncanakan harus sudah selesai 2016. Oleh karena itu, tahun ini proses pembangunan harus dapat dimulai agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. "Tahun 2008 ini, proses pemasangan tiang pancangnya harus sudah dimulai. Jika tidak, rencana pem-

bangunannya bisa kacau. Jika ada pihak yang menolak pembangunan PLTN ini, yang harus dilakukan ialah merevisi UU yang mengatur tentang hal ini," katanya.

Irawady Joenoes Divonis 8 Tahun

14/03 - Komisiner Komisi Yudisial non-aktif, Irawady Joenoes, divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Jumat. Irawadi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, berupa penerimaan uang sebesar Rp 600 juta dan 30.000 dolar AS.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Masrurdin Chaniago juga menjatuhkan denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan. Irawady dinyatakan bersalah dan melanggar hukum seperti diatur dalam pasal 12 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wapres 'Semprot' Fauzi Bowo

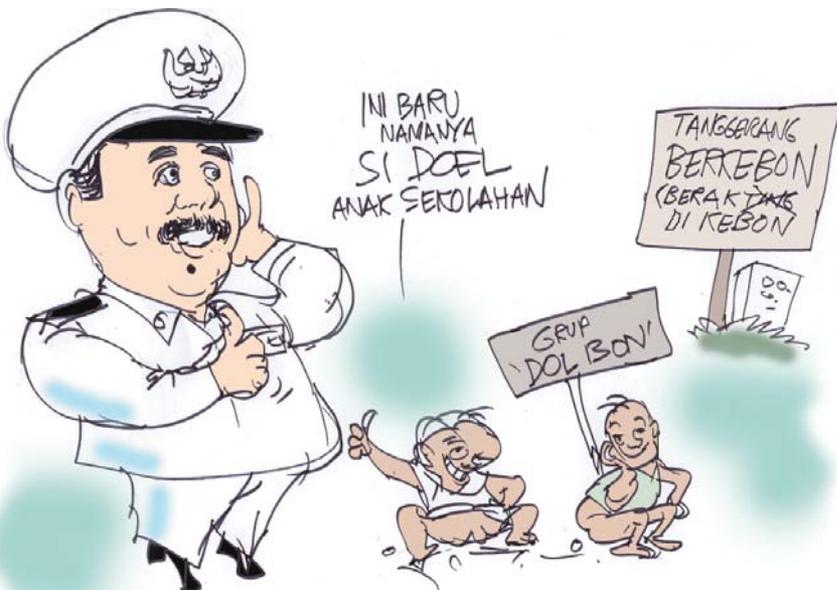
15/03 - Wakil Presiden M Jusuf Kalla memerintahkan Badan Pengelola Pengembangan Proyek Kemayoran (BP3K) segera menyelesaikan MoU (Memorandum of Understanding atau nota kesepakatan) mengenai peruntukan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan rusunami/wa (rumah susun hak milik/sewa). "Jadi besok Senin (17/3) harus segera ditandatangani MoU itu," perintah Wapres M Jusuf Kalla kepada direksi BP3K saat meninjau lokasi pembangunan rusunami/wa di Jl Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta, Sabtu. Sebelumnya Wapres dengan nada tinggi merasa heran kenapa proyek pembangunan rusunami/wa ini sangat lambat. Untuk lokasi Kemayoran terdapat kendala karena lahan milik negara yang dikelola BP3K banyak yang disewakan kepada pihak ketiga.

DKI Bebas Minyak Tanah Subsidi

16/03 - Mulai 1 Mei 2008, PT Pertamina akan

menarik minyak tanah bersubsidi. Konsumen yang masih membutuhkan minyak tanah harus membeli dengan harga Rp 7.000 per liter. General Manager Pertamina Unit Pemasaran III, Wahyudin, mengemukakan, hal tersebut dilakukan sesuai dengan program konversi minyak tanah ke elpiji. Pendistribusian paket kompor dan tabung elpiji kemasan 3 kilogram di wilayah DKI Jakarta sudah hampir selesai. Pemerintah dan Pertamina akan mencanangkan DKI Jakarta bebas dari minyak tanah subsidi bersamaan dengan perayaan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2008. Berdasarkan catatan Pertamina, jumlah rumah tangga dan usaha kecil menengah di Jakarta yang memakai minyak tanah dan berhak menerima paket konversi sekitar 1,5 juta keluarga. Sampai awal Maret 2008, sudah 1,2 juta keluarga menerima paket kompor dan tabung. Pertamina menargetkan distribusi paket untuk 300.000 keluarga yang belum menerima selesai April 2008. Selama pelaksanaan konversi, Pertamina telah me-

Karikatur Berita



narik sekitar 2.500 kiloliter minyak tanah per hari dari rata-rata pemakaian 3.000 kiloliter.

Adam Air Berhenti Operasi

17/03 - Pemerintah mencabut *operational specification* Adam Air terhitung mulai tanggal 19 Maret. Artinya, maskapai penerbangan Adam Air dilarang menerbangkan pesawatnya. Pencabutan itu terkait hasil audit penerbangan yang dilakukan Departemen Perhubungan yang menemukan adanya pengabaian keselamatan penerbangan di antaranya pelatihan pilot yang tidak sesuai prosedur, perawatan pesawat yang tidak sesuai manual perawatan perusahaan (*company maintenance manual*), dan ketidakmampuan teknis memperbaiki kerusakan. Keputusan pemerintah ini merupakan pukulan kedua bagi Adam Air setelah hengkangnya dua investor yang memegang 50% saham perusahaan itu. Presiden Direktur Adam Air, Adam Suherman mengakui bahwa pihaknya telah memperkirakan hasil audit

itu. Karena masalah keuangan dan perkiraan audit itu, pihak manajemen Adam Air juga sebelumnya telah mengumumkan kemungkinan menghentikan sementara kegiatan operasional penerbangan maskapai itu mulai (21/3).

DPR Sahkan Tiga Hakim Konstitusi

18/03 - Sidang Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR, Agung Laksono, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, mengesahkan hasil kerja Komisi III tentang seleksi hakim konstitusi yang telah disepakati komisi bidang hukum itu pada Jumat (14/3). Pada sidang paripurna, Komisi III melalui Wakil Ketuaanya, Mulfachri Harahap, melaporkan bahwa mereka telah menyepakati tiga hakim konstitusi yang baru, yakni M Akil Mochtar, Mahfud MD, dan Jimly Ashiddiqie.

UU ITE Disahkan

19/03 - Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang proses pembahasannya menyeni-

ta waktu sekitar dua periode anggota DPR, akhirnya berhasil mendapat persetujuan DPR untuk segera disahkan sebagai Undang Undang (UU). UU ITE, menurut Menkominfo Mohammad Nuh, merupakan payung hukum bagi segenap aktivitas transaksi yang menggunakan Teknologi Informasi (TI). RUU ITE ini amat penting bagi upaya melindungi kepentingan publik yang kini semakin gandrung menggunakan TI dalam kehidupan sehari-harinya.

Gubernur Banten Lantik Ismet-Rano

22/03 - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah melantik Ismet Iskandar - Rano Karno sebagai Bupati - Wakil Bupati Tangerang periode 2008-2013 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Tangerang, Banten, di Pusat pemerintahan Tigaraksa. Dalam sidang yang berakhir pukul 10.07 WIB dihadiri 40 anggota DPRD, Gubernur Banten yang mewakili Presiden mengatakan, proses pemilihan bupati - wakil bupati untuk periode 2008

-2013 itu pada umumnya berjalan dengan lancar dan demokratis, sehingga bupati dan wakil bupati yang terpilih perlu didukung sepenuhnya.

Indonesia Peringkat Ketiga Kasus TB

24/03 - Menteri Kesehatan Siti Fadillah Soepari menyatakan Indonesia mendapat peringkat ketiga di dunia sebagai penyumbang penyakit tuberkulosis (TB), dengan temuan penderita baru setiap tahunnya tidak kurang dari 500.000 orang. Dari jumlah tersebut, 300 orang yang meninggal dunia. Pada acara peringatan Hari TB Sedunia 2008, Menkes Siti Fadillah mengatakan, negara peringkat pertama yang penderita TB-nya terbanyak adalah India dengan 815.000 kasus baru setiap tahunnya. Posisi kedua diduduki oleh China dengan penderita baru setiap tahunnya sebanyak 595.000 kasus. Prevalensi tertinggi di kawasan timur meliputi Kalimantan, Papua, Maluku, NTB dan NTT men-



capai 210 orang per 100.000 penduduk.

Kecelakaan Adam Air Dipicu Problem Navigasi

25/03 - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengemukakan pesawat Adam Air DHI 574 yang jatuh di perairan Sulawesi Selatan pada 1 Januari 2007 dipicu problem navigasi. "Hasil analisa CVR (Cockpit Voice Recorder) menunjukkan bahwa kedua pilot terlibat dan menghadapi problem navigasi, yakni IRS (*inertial reference system*) atau sistem panduan navigasi," kata Ketua KNKT, Tatang Kurniadi, kepada pers di Jakarta.

Pada peristiwa itu, 102 orang yang terdiri pilot dan co-pilot, empat awak kabin dan 96 penumpang tewas. Pesawat rute Surabaya-Manado dengan nomor register PK-KKW itu hilang dari pantauan radar pada ketinggian 35.000 kaki.

Ketua PKB Muhaimin Dicapot

26/03 - Pemungutan suara (voting) rapat pleno DPP-PKB pada Rabu malam di Jakarta meminta Muhaimin Iskandar mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB. Rapat pleno itu digelar, menurut Muhammad Mahfud MD atas permintaan Ketua Umum Dewan Syura PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk menyikapi laporan yang diterimanya, bahwa Muhaimin menginginkan Mukhtar Luar Biasa (MLB). Sebenarnya ada tiga opsi yang ditawarkan dalam rapat, yakni setuju MLB digelar, menolak MLB dengan catatan Gus Dur mengendalikan partai secara penuh, dan meminta Muhaimin mundur. Hasilnya, sebanyak 20 dari 30 orang peserta rapat gabungan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz menghendaki Muhaimin lah yang mundur. Muhaimin sendiri sejauh ini tidak bersedia mengundurkan diri sehingga tindakan pemecatan dilakukan. Menurut Gus Dur, penggantian itu sudah final.

Pasca-penggantian, untuk sementara tugas ketua umum PKB akan dijalankan Ali Masykur Musa, yang juga Ketua DPP. Sementara posisi Muhaimin sebagai Wakil Ketua DPR tidak dirubah.

Soeharto dan Keluarganya Tidak Bersalah

27/03 - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa almarhum Mantan Presiden Soeharto dan ahli warisnya tidak terbukti bersalah dalam gugatan negara atas Yayasan Supersemar. Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Wahjono, menyatakan Soeharto sebagai pendiri yayasan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Hakim berpendapat, bahwa sesuai peraturan, orang yang meninggal tidak bisa lagi dimintai pertanggungjawaban, termasuk para ahli warisnya. Sementara Yayasan Supersemar diwajibkan membayar ganti rugi sejumlah Rp46,5 miliar ditambah 105.720 juta dolar AS. Menanggapi pu-

tusan tersebut, Ketua DPR RI Agung Laksono meminta agar masyarakat menghormatinya. "Bagaimana pun kita harus menghormati putusan pengadilan," katanya. Apabila pemerintah belum puas, dia menyatakan masih ada mekanisme banding yang bisa ditempuh.

Kantor Komnas PA Terbakar

29/03 - Kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) di Jalan TB Simatupang, No 33, Pasar Rebo, Jakarta Timur terbakar menghancurkan sekitar 3.260 dokumen. Sebelumnya, kebakaran diduga karena disengaja. Dugaan adanya sabotase semakin kuat karena beberapa bulan terakhir, Ketua Komnas PA Seto Mulyadi mengaku sering menerima teror dari orang tidak dikenal melalui telepon. Saat ini, Komnas PA tengah menangani lima kasus besar. Yakni, penjualan bayi yang melibatkan sindikat internasional, kasus penganiayaan, pemerkosaan dan kekerasan fisik pada anak

Karikatur Berita



yang melibatkan kaum menengah atas, rencana class action terhadap kasus susu formula, perkara perebutan anak korban perceraian, serta peninjauan dampak iklan rokok terhadap anak. Namun berdasarkan penelitian Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri, penyebab kebakaran untuk sementara diduga berasal dari api terbuka.

Film "Fitna" dikecam Dunia

30/03 - Film "Fitna" garapan seorang anggota parlemen Belanda, Geert Wilders mendapat kecaman keras dari segala penjuru dunia. Dari Tanah Air, berbagai organisasi keagamaan seperti PBNU dan Muhammadiyah sangat mengecam film tersebut. Mereka menuntut pemerintah Belanda maupun Indonesia bertindak tegas terhadap penayangan film tersebut. Bahkan, PPP meminta pemerintah RI mengupayakan agar Wilders dapat diajukan ke Mahkamah Internasional. Di berbagai kota di Indonesia, berbagai organisasi massa juga menggelar

unjukrasa ke Kedubes dan Konsulat Belanda mengecam film tersebut. Di dalam negeri, Presiden Yudhoyono telah melarang penayangan film tersebut di Indonesia dan memerintahkan internet service provider (ISP) tidak menutup akses ke situs-situs yang menayangkan film tersebut. Wilders sendiri dicekal masuk ke Indonesia. Kecaman keras juga disampaikan berbagai negara dan organisasi dari penjuru dunia. Organisasi Konferensi Islam (OKI), Sekjen PBB Ban Ki-moon, dan Uni Eropa mengecam film tersebut dan meminta Pemerintah Belanda menghentikan pemutarannya. Bahkan, mantan PM Malaysia Dr Mahathir Mohammad, mengajak umat Muslim sedunia memboikot produk Belanda.

Tindak Lanjut Bali Road Map

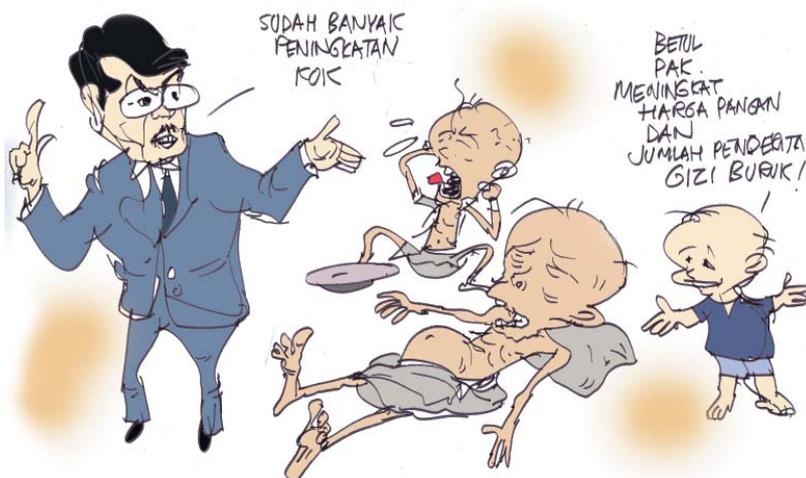
31/03 - Tindak lanjut pasca-konferensi PBB untuk perubahan iklim di Bali pada Desember 2007 lalu, diadakan di Bangkok, Thailand, 31 Maret-4 April 2008

dengan nama UN Bangkok Cilimate Talks. Pertemuan yang dihadiri ribuan anggota delegasi dari sekitar 190-an negara itu memfokuskan pembahasan mengenai rencana kerja tahun 2009. Dan secara simbolis merupakan awal perjalanan mengarah pada keputusan baru pada 2009 di Denmark pasca-protokol Kyoto yang tahap pertama akan berakhir pada tahun 2012. Pertemuan kali ini menjadi langkah pertama menuju kerangka baru pasca-Protokol Kyoto. Untuk diketahui, selambat-lambatnya akhir 2009, harus ada kesepakatan mengenai produk baru pasca-Protokol Kyoto. Bila lancar, pertengahan 2009 akan disepakati bentuk baru pengganti protokol yang mendorong pengurangan emisi karbon.

Perseorangan Bisa Ikut Pilkada

01/04 - Perubahan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah disetujui secara aklamasi oleh 10 fraksi DPR Selasa (1/4). Dengan perubahan UU itu, calon perseorangan diperbolehkan

ikut berkompetisi dengan calon dari parpol atau gabungan parpol dalam pemilihan gubernur dan bupati/walikota (pilkada). Sementara besaran dukungan minimal yang mesti dikumpulkan calon perseorangan adalah 3-6,5 persen dari jumlah penduduk. Sejumlah ketentuan lain yang disepakati dalam perubahan UU itu adalah kepala daerah yang masih menjabat (*incumbent*) dan hendak maju dalam pilkada, harus mengundurkan diri lebih dulu dari jabatannya saat mendaftarkan diri. Selain itu, persentase kemenangan pasangan calon terpilih, minimal 30% suara sah. Sedangkan batas usia calon minimal 25 tahun untuk calon bupati/walikota dan 30 tahun untuk calon gubernur. Dan, bagi kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada November 2008 hingga Juli 2009, pilkada sudah harus dilaksanakan di daerah itu paling lambat Oktober 2008. Calon perseorangan bisa ikut berkompetisi, sepanjang pilkada di daerah itu belum masuk tahap pendaftaran pasangan calon.



Semua Susu Formula Bebas Enterobacter Sakazakii

02/04 - Setelah melakukan pemeriksaan mikrobiologi terhadap 96 sampel susu formula untuk bayi yang beredar di pasaran, yang mewakili seluruh merek yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), badan itu akhirnya memastikan semuanya bebas dari cemaran bakteri Enterobacter Sakazakii. Sebelumnya, penelitian tim IPB Bogor sempat mengatakan bahwa susu formula yang beredar di Indonesia mengandung bakteri tersebut.

Kepala BPOM Husniah Rubiana Thamrin Akib menambahkan, pemeriksaan BPOM juga menunjukkan bahwa cemaran bakteri patogen lain seperti salmonella, sigela, coliform dan bakteri penyebab tipus, serta cemaran bahan kimia, jamur dan logam berat juga tidak ada pada 96 merek tersebut.

DPR Setujui Boediono jadi Gubernur BI

07/04 - Menko Perekonomian Boediono calon tunggal gubernur BI yang diajukan Presiden Yudhoyono akhirnya disetujui Komisi XI DPR untuk menjabat Gubernur BI untuk periode 2008-2013. Pria berusia 65 tahun itu merupakan calon berikutnya yang diajukan Presiden menyusul penolakan DPR atas dua calon sebelumnya. Dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut hampir tidak ada debat berkepanjangan antara anggota Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi XI) dengan Boediono. Bahkan, sebagian malah ada yang menyelipkan pernyataan memuji di sela-sela pertanyaannya. Hanya, Drajad Wibowo dari F-PAN yang mengkritik dan meminta Komisi XI tidak memilih Boediono. Drajad menyoroti keterkaitan Boediono dalam kasus BLBI. Karena Drajad menolak aklamasi, akhirnya keputusan diambil melalui voting secara tertutup. Dari 46 anggota Komisi XI yang

hadir, 45 orang memilih Boediono. Dan hanya satu yang menolak.

Tidur Saat Dengar Pidato Presiden

08/04 - Ketika membekalkan kepada peserta forum konsolidasi pimpinan daerah di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah karena mendapati sejumlah peserta pembekalan tertidur. Saat itu, Presiden sedang menceritakan pertemuannya dengan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, untuk menumbuhkan semangat kemandirian kepada 139 bupati, wali kota, dan ketua DPRD di depannya. Presiden juga mengkritik pemborosan energi yang masih terjadi di instansi pemerintah. Namun, melihat sejumlah peserta forum konsolidasi itu tertidur, dengan jari menunjuk ke pintu keluar, Presiden berujar dengan nada tinggi, "Itu coba bangunkan yang tidur itu. Kalau tidur, di luar saja! Pimpinan, bagaimana dapat memimpin rakyat kalau tidur! Malu dengan rakyat

yang memilih. Mendengar pembicaraan untuk rakyat saja tidur! Jangan main-main dengan tanggung jawab. Berdosa, bersalah dengan rakyat," kata Presiden. Masih dengan nada suara yang tinggi, Presiden meminta agar peserta yang tertidur itu tak diluluskan sebab dinilainya tak memiliki kepribadian yang baik. "Pemimpin yang kepribadiannya jelek akan menjadi racun," ujarnya.

Anggota DPR AI Amin Nasution Ditangkap KPK

09/04 - Anggota Komisi IV DPR dari F-PPP AI Amin Nur Nasution ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu dini hari sekitar pukul 01.40. AI Amin ditangkap karena diduga menerima suap dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Azirwan terkait pengalihfungsian hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Amin bersama seorang lelaki dan perempuan, ditangkap dalam sedan BMW warna hitam di area parkir Hotel Ritz Carlton

Karikatur Berita



Mega Kuningan, Jakarta seusai menemui Azirwan, yang menunggu di sebuah tempat hiburan di dalam hotel. Di dalam kendaraan itu, KPK menemukan uang senilai Rp 67 juta. Namun, menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Yasin, ada perjanjian selanjutnya untuk memberikan uang senilai Rp 3 miliar. Uang tersebut diberikan untuk memuluskan pengalihan status fungsi hutan lindung di Pulau Bintan dimana Pemkab Bintan membutuhkan rekomendasi dari Komisi IV DPR. Menurut Ketua KPK Antasari, sejak akhir November 2007, KPK memang sudah menyelidiki adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam upaya pengalihan fungsi hutan lindung di wilayah Kepulauan Riau.

Hade Menangkan Pilkada Jabar

14/04 - Sebelum hasil resmi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jawa Barat diumumkan KPUD Jabar pada 22-23 April mendatang, penghitungan cepat yang dilakukan berbagai lembaga

survei seperti LSI dan Kompas, sehari sesudah pemilihan yang dilangsungkan Minggu (13/4) menunjukkan pasangan Ahmad Heriawan-Dede Yusuf (Hade) unggul dibanding pasangan Agum Gumelar-Nu'man Abdul Hakim dan pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulandjana. Bagi sebagian orang, kemenangan pasangan Hade ini dinilai mengejutkan, sebab prediksi beberapa lembaga penelitian sebelumnya menempatkan calon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini selalu di urutan terendah dari ketiga pasangan kandidat.

Indonesia - AS Bahas virus H5N1

15/04 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menkes Siti Fadillah Supari mengadakan pertemuan dengan Menkes AS Michael O Leavitt guna membicarakan perbedaan perspektif soal penanganan virus flu burung selama ini. Menkes AS datang ke Indonesia atas undangan Menkes Siti Fadillah untuk klarifikasi posisi Indonesia soal

virus flu burung. Menurut Menkes Siti Fadillah, sejauh ini belum ada kesepakatan tentang pemberian virus H5N1 (flu burung) dari Indonesia kepada AS. Karena itu, dia mengatakan agar vaksin yang diberikan AS ke Indonesia jangan dianggap sebagai pemberian semata, karena Indonesia juga punya modal. Mengenai peredaran virus ini sendiri, Siti Fadillah mengatakan bahwa kini telah dibuat *tracking system* agar negara pemberi virus bisa mengecek ke mana saja, dibawa siapa, dan diapaikan virus tersebut. Indonesia dan AS sendiri akan duduk di dalam lembaga untuk mekanisme *advisory*.

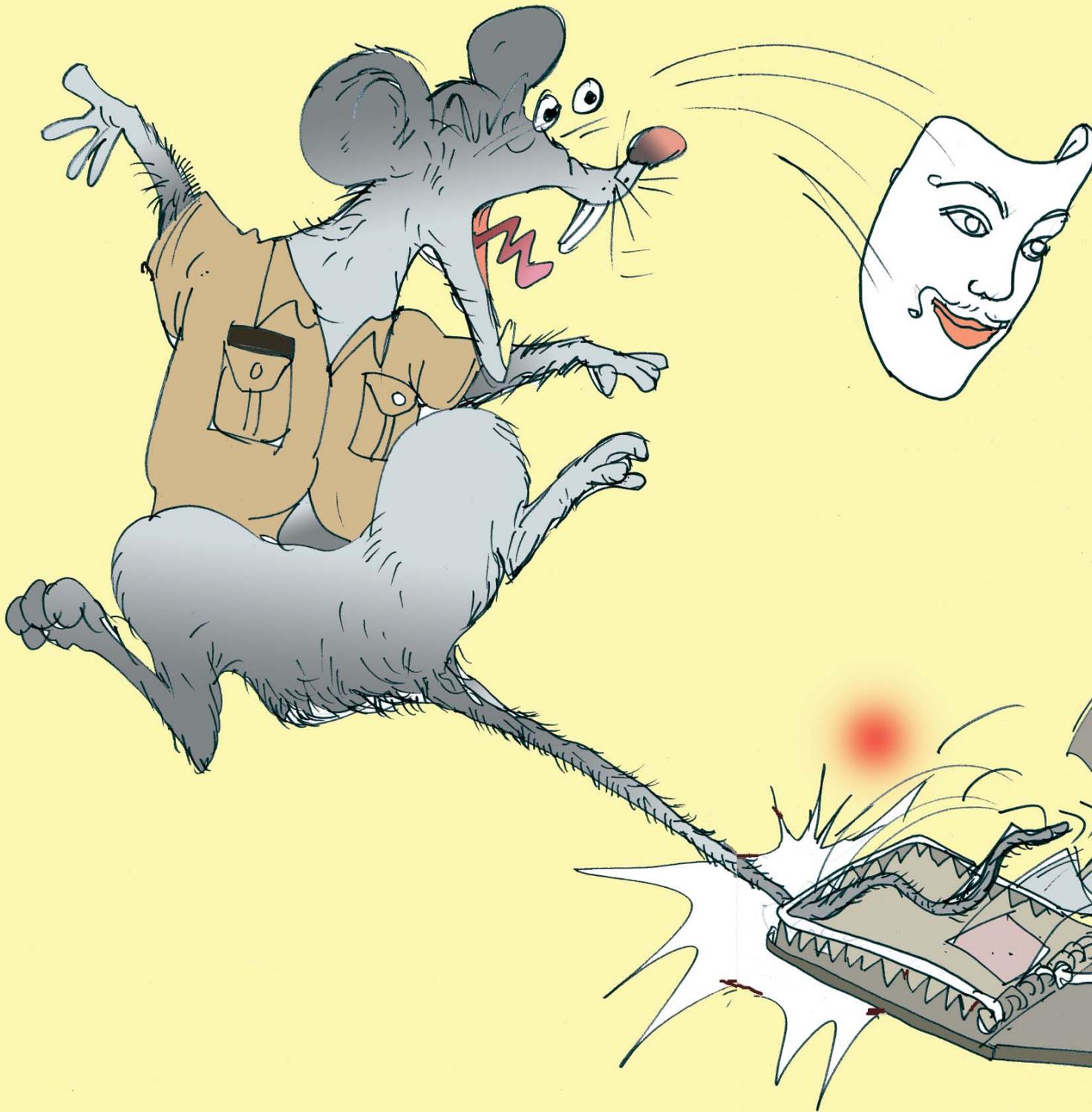
Hanya Bulog yang Bisa Ekspor Beras

16/04 - Di tengah melonjaknya harga beras dunia, pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 12/M-Dag/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras. Permendag ini

menyebutkan, kegiatan ekspor maupun impor beras harus dengan persetujuan Menteri Perdagangan. Ekspor semua jenis beras kecuali beras ketan, hanya dapat dilakukan oleh Bulog. Impor beras untuk stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, dan kerawanan pangan juga hanya dapat dilakukan oleh Bulog. Meski diprediksi tahun ini terjadi peningkatan produksi beras sehingga kebutuhan nasional dapat dipenuhi dari dalam negeri, namun Permendag itu bukan bermaksud membuka peluang ekspor lebar-lebar. Karena, pada dasarnya ekspor hanya dapat dilakukan jika sudah terjadi surplus persediaan beras di dalam negeri yakni sudah mencapai 3 juta ton. Atau, harga beras di dalam negeri sudah mencapai Rp 4000-Rp 6000 per kilogram. "Kami berharap permendag ini dapat memberi kejelasan hukum soal ekspor dan mengamankan stok beras nasional, termasuk menghindari perembesan ke luar wilayah Indonesia," ujar Mari.



JAKSA ENAM



MILYAR

Upaya pemberantasan korupsi semakin suram. Sebab, sejauh ini pemberantasan korupsi justru menimbulkan praktik korupsi baru, terutama suap. Lalu, kapan korupsi bisa diberantas?



Seorang yang dikategorikan sebagai jaksa terbaik sehingga dipercaya menjadi Ketua Tim Penyelidikan Kasus BLBI-BDNI, Urip Tri Gunawan, tertangkap tangan menerima uang yang diduga suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2 Maret 2008. Tak tanggung-tanggung, ia menerima suap sebanyak US\$ 660.000 atau sekitar Rp 6,1 milyar dari Artalyta Suryani, teman baik Sjamsul Nursalim, pengusaha yang terkait kasus BLBI.

Jaksa itu, oleh KPK, telah dijadikan tersangka penerima suap, kendati ia membantah dan mengakuinya sebagai transaksi jual-beli permata. Namun KPK berkeyakinan telah punya bukti kuat bahwa hal itu adalah suap.

Kasus suap jaksa enam milyar ini, sontak menjadi berita utama berbagai media di Indonesia, baik media cetak, elektronik dan online. Semua koran harian nasional dan daerah, juga majalah berita, menempatkan berita suap jaksa ini menjadi berita utama hampir selama dua pekan.

Publik pun tersentak, kaget dan tercengang! Walaupun selama ini kasus suap seperti itu sudah menjadi rahasia umum sebagai bagian dari isu mafia peradilan. Lalu, mengapa publik masih kaget?

Pertama, rupanya publik sudah sangat ingin optimis dan berharap atas janji-janji SBY-JK akan memberantas korupsi dan menegakkan keadilan. Sehingga memilih pasangan ini menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2004-2009.

Kedua, publik sebenarnya telah terlanjur pula berharap bisa memulihkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum, terutama kepada tim jaksa yang sengaja dibentuk

khusus menangani kasus BLBI yang sudah sepuluh tahun tak tuntas. Sebagaimana telah dipublikasikan luas oleh pers, Urip, mantan Kajari Klungkung, Bali, itu disebut-sebut sebagai salah seorang jaksa terbaik di Tanah Air yang sengaja direkrut ke Jakarta menjadi bagian dari 35 jaksa terbaik daerah yang ditugaskan menyelidiki kasus BLBI. Urip, bahkan dipercaya menjadi koordinator untuk memeriksa dugaan korupsi kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Ketiga, berselang dua hari sebelum Urip tertangkap, pihak Kejaksaan Agung melalui keterangan pers Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidikan pada Pidusa Muhammad Salim, penyelidikan tim jaksa (Urip dkk) tidak menemukan bukti korupsi dalam BLBI senilai Rp 47,5 triliun. Jaksa menganggap Sjamsul sudah membayar sesuai kewajibannya, meski setelah dijual, negara hanya mendapat Rp 3,4 triliun.

Paling tidak ketiga kondisi ini membuat publik jadi kaget. Ternyata janji dan upaya pemberantasan korupsi malah menimbulkan korupsi baru, yang secara moral lebih busuk. Bak kata pepatah: Musang berbulu domba. Atau, maling berjubah jaksa, iblis berlagak malaikat. Disangka malaikat, ternyata iblis. Publik jadi kaget.

Pantaslah kasus ini menjadi berita utama berbagai media. Walaupun selama ini sudah jamak jadi rahasia publik, tentang praktik penegak hukum memperdagangkan kasus yang sedang ditangani. Menjadikan kasus korupsi sebagai ATM (Anjungan Tunai Mandiri) para aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim).

Publik sulit memahami dan kaget, bagaimana seorang jaksa yang diseleksi secara khusus untuk menangani BLBI, masih berperilaku busuk seperti itu? Lalu, bagaimana dengan jaksa-jaksa lainnya yang tidak di-

seleksi secara khusus, tapi juga menangani perkara korupsi yang lain. Apalagi jika perkara korupsi itu jauh dari jangkauan publik.

Pantas saja publik semakin sulit percaya, apalagi bila melihat gaya hidup sebagian jaksa yang terbilang wah. Jauh melebihi kemampuan ekonomi seorang jaksa golongan IVA bergaji Rp3,5 juta. Tapi dengan gaji sekecil itu bisa bergaya hidup mewah, punya 2-4 mobil bagus, rumah yang luas dan asri di dua tempat, dan belanja ke pusat-pusat perbelanjaan yang terbilang mahal di dalam negeri bahkan ke luar negeri.

Kendati demikian, publik harus terus diajak untuk percaya pada azas hukum praduga tidak bersalah. Siapa tahu banyak jaksa yang dagang permata? Walaupun hal ini tetap harus dipertanyakan: Apakah secara etika dan profesi, jaksa boleh dagang permata?

Namun, azas praduga tidak bersalah memang harus ditegakkan demi keadilan. Apalagi belum banyak penegak hukum yang tertangkap tangan menerima suap atau memeras para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Isu memang sudah banyak, tapi hanya sedikit yang tertangkap tangan atau terbukti dan dihukum.

Kekuatiran

Ada beberapa catatan tentang dugaan suap yang melibatkan penegak hukum. Satu di antaranya kasus suap perkara korupsi HTI Probosutedjo yang sempat menyebut-nyebut petinggi Mahkamah Agung. Kemudian, kasus suap perkara korupsi mantan Direktur Utama Jamsostek Achmad Junaedi. Isu kasus suap yang menyelimuti bebasnya Adelin Lis, terdakwa pembalakan liar di Medan. Dugaan suap yang dilontarkan ICW 2008 sebesar Rp 900 juta dalam penanganan korupsi pembangunan Bandara Nabire yang dilakukan Hein Berhиту, Kepala Kejaksaan Negeri Nabire. Kasus suap yang melibatkan Ajun Komisaris Suparman, salah seorang penyidik KPK, dalam



Alexander Tedja dan isteri, Sutanto dan isteri, Arthalyta Suryani, dan Murdaya Poh dan isteri, foto yang beredar di DPR. ^{repro}

perkara korupsi PT Industri Sandang Nusantara. Juga kasus suap Irawadi Joenoes dalam pembelian tanah untuk pembangunan gedung Komisi Yudisial.

Tapi tidak semua kasus suap itu terbukti di pengadilan. Sebagian tidak ada tindak lanjutnya. Publik dibiarkan maklum saja, layaknya gunonan para pengemudi bis kota: Sesama metromini jangan saling mendahului.

Tapi, paling tidak KPK telah menunjukkan komitmennya. Ketika salah seorang penyidikannya, Ajun Komisaris Suparman, terlibat kasus suap dalam perkara korupsi PT Industri Sandang Nusantara. Suparman dituntut 12 tahun penjara dan oleh pengadilan tindak pidana korupsi dihukum selama delapan tahun penjara.

Komitmen seperti ini, kini ditunggu dari pihak Kejaksaan Agung. Sebagaimana dikemukakan Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia Agung Hendarto di Jakarta, Selasa (11/3) agar Kejaksaan Agung jangan mereduksi kasus penyuaan jaksa Urip Tri Gunawan menjadi hanya kasus bisnis jual-beli permata. Jaksa Agung seharusnya menjadikan kasus ini sebagai terapi kejut kepada para jaksa yang kerap menjadikan para tersangka sebagai *ATM berjalan*. (Kompas, 12 Maret 2008).

“Selama ini publik belum pernah melihat sikap obyektif

Jamwas dalam memeriksa internal kejaksaan. Ini terbukti dengan tindakan administratif mutasi atau pemberian sanksi ringan saja kepada jaksa-jaksa yang nakal,” ujar Agung Hendarto. Agung bahkan menilai bahwa tindakan yang dilakukan Urip bukanlah tindakan sendirian, melainkan Urip sebagai bagian dari jaringan mafia peradilan. Agung juga mempersoalkan kedekatan Artalyta Suryani dengan jaksa-jaksa di Kejaksaan Agung.

Kekuatiran Agung Hendarto ini diresapi pula oleh publik. Terutama setelah pihak Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung, menyalip KPK memeriksa Urip dan beberapa jaksa kasus BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia milik Sjamsul Nursalim.

Konon, pemeriksaan itu terkait pelanggaran etika, tidak menyangkut pidana dari kasus suap itu. Selain Urip, jaksa yang diperiksa adalah Bima Suprayoga, Eko Hening Wardono, Yoseph Wisnu Sigit, Yunita Arifin, Alex Sumarna, dan Hendro Dewanto.

Sejumlah pihak khawatir jangan-jangan pemeriksaan internal kejaksaan hanya akan mereduksi dan melokalisasi kasus suap Urip hanya menjadi masalah bisnis berjualan permata. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) MS Rahardjo di Kejagung, Selasa (11/3) malam menanggapi ke-

khawatiran itu, menegaskan, pemeriksaan Bagian Pengawasan akan mengungkapkan semua fakta yang ada.

Tapi kecenderungan ke arah bisnis permata terlihat terang dari keterangan Albab Setiawan, pengacara Urip Tri Gunawan. Albab mengatakan, kliennya bertemu dengan Artalyta Suryani dalam kaitan bisnis. Oleh KPK, Artalyta Suryani bersama Urip, sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap.

Namun pengacara Urip dengan tegas membantah: “Tidak ada kaitan dengan tugas. Karena itu hari Minggu, kan? Dan tugas BLBI juga sudah selesai.” Menurut Setiawan, Urip akan terjun di bisnis permata. Artalyta Suryani membiayai bisnis itu. “Urip cari barang, lalu dibeli Ayin (Artalyta),” jelasnya.

Tidak Terkait BLBI?

Sementara, Jaksa Agung Hendarman Supandji menanggapi kekhawatiran ada pengalihan kasus dari suap ke soal dagang berlian, memperkirakan semua pihak mengikuti proses penyidikan yang tengah digelar KPK. “Apakah itu suap seperti dituduhkan, atau cuma dagang berlian. Pembuktiannya nanti di pengadilan,” ujar Hendarman se usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Menko Polhukam (12/3).

Hendarman menjamin apa

yang dilakukan Kejaksaan Agung tidak akan berbenturan dengan proses penyidikan KPK. Proses penelitian yang dilakukan institusinya berada dalam koridor etika, sementara penyidikan KPK lebih terkait konteks pidana. “Penyidikan KPK lebih ke perbuatan Urip dengan orang yang memberi suap. Soal apakah nanti penyidikan berkembang, misalnya diketahui Urip disuruh atasannya, KPK harus ungkap hal itu,” ujarnya.

Hendarman sepertinya sangat yakin bahwa kasus yang melibatkan Jaksa Urip dan Artalyta Suryani (pengusaha yang dekat dengan Sjamsul Nursalim) tidak terkait dengan kasus BLBI. Hendarman beberapa kali menegaskan, bahwa pelanggaran etika yang dilakukan Urip tidak ada kaitannya dengan keputusan penghentian penyelidikan kasus BLBI oleh Kejagung. Justru hasil keputusan itulah yang menurut Hendarman telah dimanfaatkan Urip untuk mencari keuntungan.

Benarkah demikian? KPK yang harus menjawabnya dengan bukti-bukti. “Penyidik sudah memiliki cukup bukti bahwa itu bukan jual-beli permata,” tegas juru bicara KPK, Johan Budi SP, Jumat 14/3. Menurut Johan, KPK memastikan tidak pernah ada bisnis jual-beli permata antara jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani. ■ BI/CRS-BHS-DAP

Dolar Dalam Kardus



Kardus tempat uang ditemukan di mobil Urip

repro

Inilah sepenggal kisah penangkapan jaksa, bersama barang bukti dugaan suap, enam ratusan ribu dolar dalam kardus.

Ketua Tim Jaksa Penyelidikan Kasus BLBI, Urip Tri Gunawan (41), dengan tenang meninggalkan hotel tempatnya menginap di kawasan Kota, Jakarta. Dia mengendarai mobil Toyota Kijang LGX warna silver yang berpelat nomor DK 1832 CF (Bali) menuju kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Tepatnya, Jalan Terusan Hang Lekir II, Kavling WG 9, RT 06 RW 09, Grogol Selatan, Simprug, Jakarta Selatan, rumah Syamsul Nursalim, mantan Presiden Direktur Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang terlibat perkara BLBI.

Mantan Kajari Klungkung, Bali, itu sudah beberapa kali berkomunikasi melalui telepon dengan Artalyta Suryani (46), seorang pengusaha asal Gudang Kaleng, Teluk Betung, Bandar Lampung, yang akrab dengan keluarga Syamsul Nursalim. Dia janda dari Surya Dharma alias Akiong (meninggal 1996) kontraktor besar yang menjadi andalan Syamsul Nursalim kala membangun tambak udang terbesar di Asia Tenggara, Dipasena di Lampung.

Artalyta Suryani, yang akrab disapa Ayin mengambil-alih pengelolaan bisnis suaminya PT Bukit Alam Surya (BAS)

yang bergerak di bidang properti, berpusat di Jalan Komodor Yos Sudarso, Bandar Lampung. Ayin berhasil mengendalikan BAS. Bahkan dia bisa merambah hingga ke Jakarta. Belakangan malah lebih sering di Jakarta daripada di Bandar Lampung. Dia dikenal sebagai seorang pengusaha yang cerdas, agak pendiam tapi supel dan ramah. Ayin juga gemar menyanyi dan piawai lobi.

Ayin akrab dengan beberapa petinggi negeri ini. Ketika menikahkan putranya, Rommy Dharma Satriawan dengan Lanny Mariskha di hall Pekan Raya Jakarta, April 2007, Ketua DPR Agung Laksono yang memberi sambutan atas nama keluarga. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun berkesempatan hadir. Sebaliknya, saat Presiden SBY menikahkan putranya, Agus Hari-murti dengan Anisa Pohan, Ayin juga hadir.

Juga ketika Ayin menikahkan puteri sulungnya, Imelda Dharma dengan Eiffel Tedja, putera Alexander Tedja, pemilik PT Pakuwon Grup, di Surabaya, Juni 2007, tampak hadir sejumlah pejabat, antara lain Kapolri Jenderal Sutanto, Sutiyoso, Imam Utomo dan beberapa menteri. Bahkan namanya sempat tercantum sebagai Bendahara DPP Partai Ke-

bangkitan Bangsa. Gus Dur sendiri mengaku kenal baik dengan Ayin.

Belakangan, Ayin juga disebut sering terlihat di Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan akrab dengan beberapa petinggi jaksa di sana. Termasuk kenal dengan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman. Bahkan Ayin dikabarkan bertemu dengan Kemas Yahya Rahman dua hari sebelum JAM Pidsus itu mengumumkan tidak menemukan bukti korupsi dalam BLBI kepada BDNI senilai Rp 47,5 triliun dan Syamsul Nursalim (pemilik BDNI) sudah membayar sesuai kewajibannya. Sehingga penyidikan dihentikan.

Jaksa Agung Hendarman Supandji juga sudah mengonfirmasi hal ini kepada Kemas Yahya Rahman. Kemas mengaku mengenal Ayin yang dua kali mememuinya di Gedung Bundar Kejagung. Tapi menurut Kemas kepada Jaksa Agung, dia menolak Ayin membicarakan kasus perkara BLBI.

Itulah sepenggal kisah hebatnya lobi Ayin. Sebuah sumber Berita Indonesia yang mengaku dekat dengan keluarga Nursalim, mengakui bahwa Ayin jago melobi kiri-kanan. Hal ini yang membuat keluar-

ga Nursalim mengandalkannya. Misalnya, untuk mengurus berbagai izin, terutama izin untuk properti yang sangat berliku.

Kedekatan Ayin dengan Sjamsul Nursalim, bukan karena hubungan darah. Tapi dimulai dari kedekatan keluarga mereka yang sama-sama berasal dari Gudang Kaleng. Kemudian berlanjut dengan hubungan bisnis suami Ayin dengan Sjamsul Nursalim di PT Dipasena. Maka jika ke Jakarta, tak heran bila Ayin lebih sering menginap di rumah Sjamsul Nursalim, kendati dia punya apartemen mewah di Jalan Pakubuwono. Kebetulan, sejak awal reformasi, keluarga Sjamsul Nursalim pun sudah lebih memilih tinggal di Singapura.

Demikian jualan hari itu, Minggu 2 Maret 2008, Ayin sedang berada di rumah Syamsul Nursalim di Jalan Terusan Hang Lekir II, Kavling WG 9, RT 06 RW 09, Grogol Selatan, Simprug, Jakarta Selatan. Alamat inilah yang dituju Jaksa Urip yang meluncur dengan santai mengendarai sendiri mobilnya.

Urip tampaknya tidak sadar dirinya sudah diintai tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Rabu 27 Februari malam. Bahkan di sekitar rumah yang dituju pun sudah berseliweran petugas KPK yang menyamar. Ada yang duduk-duduk di pos jaga, ada yang mengecat pot bunga dan ada yang seperti sekadar melintas. Penduduk setempat sebenarnya sudah ada yang sedikit curiga. Tapi, dikira petugas yang tengah mengendus peredaran narkoba.

Tampaknya Urip belum hapal benar letak rumah yang dituju. Sesampai di Kompleks Simprug, Urip mencari-cari alamat rumah Nursalim. Rumah itu memang agak berada di pojok belakang kompleks. Ia berhenti dan tanya-tanya tepatnya alamat rumah itu. Saat itu, tanpa disadari Urip, mobil petugas KPK sempat menyalip

mobilnya.

Akhirnya, Urip menemukan rumah Nursalim. Rupanya ia sudah ditunggu. Serta-merta pintu gerbang pun segera dibuka. Pada saat gerbang dibuka, mobil petugas KPK lewat, untuk menghindari kecurigaan, kemudian putar balik di ujung jalan. Beberapa anggota tim KPK yang sudah berada di kawasan Simprug sejak pukul 14.00 pun tampak serempak merapat ke rumah itu. Dengan tidak terlalu menyolok, mereka menunggu sampai Urip keluar.

Sekitar pukul 16.30, mobil Urip pun keluar. Dengan cekatan mobil-mobil petugas KPK memepet mobil Urip dari muka dan belakang. Tampaknya Urip mulai menyadari ada yang tidak beres. Dia berupaya menghindar dan melawan. Tapi mobil petugas KPK sengaja menabrak Mobil Urip dari belakang sehingga bempernya penyok.

Urip masih berupaya melawan dan mengatakan bahwa ia petugas. Tapi petugas KPK (empat personel Brimob) tak peduli, bahkan berupaya menjatuhkan Urip ke jalan aspal dan menekan kepalanya agar tak bisa bergerak lagi. Kemudian, dengan mudah Urip diborgol. Beberapa warga sempat menyaksikan adegan ini.

Petugas KPK juga meminta warga memanggil Ketua RT 06 RW 09. Sambiyu ketua RT itu segera bergegas datang. Tim KPK meminta Sambiyu menjadi saksi. Di belakang kursi depan (pengemudi) mobil Urip ditemukan kardus minuman ringan. Saat ditanya apa isi kardus itu, Urip menjawab cokelat. Lalu, petugas KPK meminta Ketua RT untuk membukanya. Di dalamnya ada tumpukan amplop tebal berwarna cokelat. Kemudian Sambiyu membuka amplop itu. Ternyata, isinya uang dolar. "Banyak sekali uangnya, dolar lagi," ucap Ketua RT. Setelah dihitung oleh KPK, jumlahnya 660.000 dollar AS atau sekitar Rp 6,1 miliar.

Setelah itu, Urip pun mengatakan bahwa uang dolar (barang bukti) itu adalah hasil transaksi jual-beli permata. Ia membantah uang itu ada sang-



Urip Tri Gunawan digiring petugas ke kantor KPK

repro kompas

kut-pautnya dengan perkara apa pun.

Kemudian, Tim KPK berusaha masuk ke dalam rumah berpagar hampir setinggi enam meter itu. Tetapi, pintu sudah tertutup rapat. Petugas KPK meminta untuk dibuka, namun penghuninya tak mau segera membuka. Lebih satu jam berikutnya, barulah pintu dibuka. Petugas KPK menangkap Artalyta Suryani serta membawa orang-orang di rumah itu sebagai saksi, di antaranya dua pembantu rumah tersebut. Rumah itu pun segera digeledah dan tidak ada ditemukan permata.

Ketua KPK Antasari Azhar pun segera dilaporkan tentang penangkapan jaksa itu. Beberapa menit setelah mendapat laporan, Antasari Azhar segera melaporkan melalui telepon kepada Jaksa Agung Hendarman Supardji. Tentu saja

Hendarman sangat kecewa mendengar anak buahnya tertangkap tangan. Dalam percakapan telepon itu, Hendarman bertanya: "Ada BB (barang bukti)-nya?" Antasari menjawab: "Ada, Pak, uang US\$ 660.000." Kemudian, Jaksa Agung menyilakan KPK mengusut kasus itu secara tuntas.

Kemudian, terasa ada reaksi yang mengundang tanda tanya dari pihak Kejaksaan Agung setelah mengetahui Jaksa Urip ditangkap KPK dengan dugaan menerima suap dari Artalyta Suryani. Beberapa jaksa segera merapat ke Gedung Bundar Kejagung, termasuk Direktur Penyidikan M Salim. Jaksa Agung Hendarman juga dalam dialog di stasiun ANTV, Minggu malam 16/3 membeberkan bahwa dia dilaporkan tentang belum ditangkapnya Artalyta Suryani, orang yang diduga KPK memberi suap kepada

jaksa Urip.

Segera Jaksa Agung dilaporkan akan dibuat surat perintah penangkapan Artalyta Suryani. Direktur Penyidikan M Salim segera membuat surat penangkapan terhadap Artalyta, sekitar dua jam setelah Urip ditangkap. Namun, penangkapan Artalyta batal dilakukan Kejaksaan. Rupanya, KPK tidak kalah cerdik dan cekatan. KPK sudah lebih dulu menangkapnya.

Namun bagi Chairul Imam, mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejagung, penerbitan surat perintah penangkapan Artalyta itu dinilai aneh (Kompas 17/3). Dia heran, bagaimana surat penangkapan diterbitkan mendahului surat perintah penyidikan?

Sekitar pukul 18.15, dua mobil berwarna silver berhenti di depan Kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta



Kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta

berindo/ws

Pusat. Satu mobil Kijang LGX bernopol DK 1832 CF milik tersangka dan satu Daihatsu Xenia milik penyidik KPK. Suasana terasa sangat tegang, saat Urip dikeluarkan dari Kijang dengan tangan diborgol. "Jangan, jangan diambil gambarnya dulu," ujar seorang penyidik KPK seraya menyalang kedua tangannya tanda melarang wartawan memotret.

Wajah jaksa Urip terlihat sangat kuyu. Dia diapit dua polisi berpistol dan senapan. Urip memakai kemeja putih dan celana jins biru muda. Beberapa penyidik KPK juga mengiringnya dari belakang langsung membawa Urip ke ruang pemeriksaan. Sampai di situ saja wartawan bisa menyaksikan.

Tak berapa lama, beberapa penyidik KPK bersama tersangka turun lagi menuju ke

mobil tersangka yang diparkir di depan gedung KPK. Terlihat Urip berusaha melawan. Tampaknya dia enggan dibawa keluar menuju ke mobilnya. Sempat terjadi tarik-menarik antara tersangka dan dua personel Brimob yang mengapitnya. Sampai-sampai seorang personel Brimob harus menarik lengan kiri tersangka seraya menggenggam pistolnya. Juga membentak dan menendang kaki kanan tersangka untuk memaksanya menuju ke mobil tersangka. "Katanya saya yang ambil," ujar Urip membentak kedua polisi yang terus memegang kedua tangannya itu.

Rupanya penyidik KPK meminta Urip kembali ke mobilnya untuk mengambil sebuah kardus minuman mineral yang berisi tumpukan kertas dan sebuah map biru tua di bagian atasnya. Setelah benda itu

diambil, tersangka kembali dibawa ke ruang pemeriksaan.

Sekitar satu jam kemudian, Jubir KPK, Johan Budi, tiba di Kantor KPK dan memberi keterangan kepada pers.

Sekitar pukul 20.30, seorang laki-laki dibawa penyidik ke KPK. Namun, pria yang memakai jaket warna merah dan putih itu tidak diborgol. Pukul 20.45, seorang wanita setengah baya, yang kemudian diketahui bernama Artalyta Suryani, juga digelandang penyidik ke KPK.

Sekitar pukul 23.02, setelah diperiksa lima jam, Urip dibawa lagi ke mobilnya untuk mengambil barang bukti yang dituduhkan kepadanya. Dari jok depan diambil sebuah tas hitam milik tersangka. Seraya menyaksikan pengambilan barang bukti tersebut, Urip menyempatkan bicara dengan wartawan menyangkal uang

itu ada hubungannya dengan kasus BLBI. "Itu hasil penjualan permata. Pembeli dan kuitansi penjualannya ada," tegasnya kepada wartawan. "Saya berani jamin 100% tidak ada kaitannya dengan kasus BLBI," ulang Urip yang kemudian ditahan KPK di penjara Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Namun, Jubir KPK Johan Budi mengatakan, KPK menduga penyuaian terhadap tersangka ada hubungannya dengan kasus BLBI. "Mengaku sih boleh-boleh saja itu jual beli permata. Yang jelas, dia kita dapatkan tertangkap tangan ketika menerima suap di sebuah rumah di kawasan Jakarta Selatan," tegas Budi.

Artalyta: Bukan rumah Sjamsul

Namun, teka-teki kasus ini juga makin mencuat tatkala Artalyta sebelum diperiksa KPK, Senin (17/3) siang, dalam penjelasan kepada wartawan, membantah telah tertangkap tangan. Bahkan ia juga membantah rumah yang menjadi tempat transaksi pemberian dan penerimaan uang 660.000 dollar AS itu adalah rumah Sjamsul Nursalim.

Artalyta juga membantah dirinya tertangkap tangan sedang memberikan uang kepada jaksa Urip Tri Gunawan. "Saya tertangkap tangan, itu tidak benar," katanya. Ayin menjelaskan, pada hari H di luar pekarangan rumahnya, dan tanpa sepengetahuannya, jaksa Urip ditangkap KPK. Saat itu security memberitahu kepadanya ada ribut-ribut di luar. Lalu ia menyuruh putranya menemui dan membukakan pintu. "Mereka meminta saya untuk memberikan keterangan di Kantor KPK, saya bersedia," kata Artalyta. Ayin juga membantah soal rumah Jalan Hang Lekir Kavling WG 9 adalah rumah Sjamsul Nursalim. "Itu tidak benar, yang benar itu rumah milik pribadi saya sejak beberapa tahun yang lalu," tegasnya kepada pers 17/3. Siapa yang benar? KPK harus bekerja keras membuktikannya! ■ BI/TSL-MLP-MS



Jampidsus Kejaksaan Agung Kemas Yahya Rahman, dicopot meski mengaku tak terkait kasus suap jaksa Urip

repro

Jampidsus *Ngaku* Kaget

Jaksa Urip Tri Gunawan diduga tidak sendirian. Jaksa Agung Hendarman mengatakan, uang Rp 6 miliar itu terlalu besar untuk seorang jaksa bergaji Rp 3,5 juta per bulan.

Lalu siapa petinggi Kejaksaan Agung di belakang Urip? Urip adalah Ketua Tim Penyelidikan Kasus BLBI-BDNI (Sjamsul Nursalim). Tim ini berada di bawah kendali Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Muhammad Salim dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman. Keduanya sudah dicopot dari jabatannya. Apakah JAM Pidsus Kemas Yahya Rahman terlibat dengan uang 660.000 dolar yang diduga suap itu?

Kemas Yahya Rahman sendiri mengaku terkejut atas penangkapan anak buahnya, jaksa Urip Tri Gunawan. Kemas, mantan Kepala Kejati Banten itu menegaskan, perbuatan Urip merupakan inisi-

atif pribadi. Ia dengan tegas menolak dikaitkan dengan penangkapan tersebut. "Saya nggak pernah memerintahkan anak buah minta-minta (uang suap)," ujar Kemas kepada wartawan sesaat setelah mengetahui Urip ditangkap KPK, 2 Maret 2008. Sebaliknya, menurut Kemas, ia selalu berpesan kepada anak buahnya agar tidak melakukan tindakan yang memalukan korps kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto yang mengaku mendapatkan informasi penangkapan Urip dari stafnya, Asintel Kejati DKI Adi Togarisman, tidak menyangkal kemungkinan Urip dimanfaatkan seseorang berkaitan dengan penghentian penyelidikan kasus BLBI oleh Kejaksaan.

"Siapa yang memanfaatkan, saya tidak tahu. Yang memeriksa bukan saya," ujar Wisnu (Indopos, Senin, 3 Mar 2008).

Jaksa Urip Tri Gunawan sendiri mengaku uang 660 ribu dolar AS itu tidak berkaitan dengan kasus perkara apa pun. Uang itu hasil transaksi jual-beli permata. Sementara itu, pengacara Sjamsul Nursalim, Adnan Buyung Nasution, menolak mengomentari penangkapan jaksa Urip apakah terkait kasus BLBI kliennya. Memang, Buyung mengaku menjadi pengacara Sjamsul. Namun, sejak bertugas menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dia sudah tidak lagi memegang perkara, termasuk BLBI Sjamsul Nursalim.

Otto Cornelis Kaligis, penasihat hukum Artalyta, membantah keterkaitan kliennya dengan kasus BLBI. Tampaknya, bagi OC Kaligis, hal itu hanya sebagai rumor. "Saya tidak mau membicarakan ru-

mor. Acuan saya itu berita acara pemeriksaan (BAP)," kata Kaligis. Hal senada dikemukakan kuasa hukum Urip, Albab Setiawan, yang tetap bersikeras, uang 660.000 dolar Amerika Serikat atau Rp 6,1 miliar, itu merupakan uang bisnis permata.

Semua Mengaku Kaget

Hampir semua orang yang berkaitan dengan perkara BLBI Sjamsul Nursalim mengaku keget dan tidak ada sangkut-paut dengan dugaan suap Artalyta Suryani - Urip Tri Gunawan. Pemeriksaan internal Kejaksaan pun tentang kasus ini, tampaknya semakin mengarah pada pelanggaran etika dan disiplin Jaksa Urip berbisnis permata.

Kesimpulan itu diumumkan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Halius Hosen (16/3), berdasarkan hasil pemeriksaan internal terhadap 26 jaksa selama sepekan, termasuk jaksa Urip, Direktur Penyidikan M Salim dan Jampidsus Kemas Yahya Rahman.

“Telah cukup bukti untuk menyatakan jaksa Urip Tri Gunawan melanggar disiplin sebagai pegawai negeri sipil,” terang Halius Hosen.

Menurut Halius Hosen, saat diperiksa jaksa pengawas, Kamis 6/3, Urip mengaku uang US\$ 660.000 atau sekitar Rp 6 milyar itu adalah hasil bisnis permata. Hal ini, menurut Halius, jelas melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: Pegawai negeri dilarang melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sam-bilan.

Kalau itu benar, pantas saja Jampidsus Kemas Yahya Rahman mengaku kaget atas tertangkapnya jaksa Urip dengan barang bukti US\$ 660.000 dalam kardus di sekitar rumah Sjamsul oleh KPK 2 Maret 2008.

Namun, beredar kabar di kalangan pers bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki rekaman percakapan telepon antara Jampidsus Kemas Yahya Rahman dan Artalyta Suryani, kerabat Sjamsul Nursalim, sehari sebelum jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap KPK. Sumber *Berita Indonesia* di KPK, tidak menyebut apa isi percakapan itu.

Kemas sendiri seusai pemeriksaan di KPK, Rabu 5/3, tidak menjawab pertanyaan pers soal percakapan telepon itu. Kemas berdalih bahwa semua keterangan sudah disampaikan kepada KPK. Ketika ditanya perihal hubungannya dengan Artalyta, Kemas hanya menjawab: “*No comment.*”

Begitu pula Artalyta sebelum diperiksa KPK, Senin 17/3, tak berkata sepele pun, saat wartawan mengonfirmasi dua isu yang beredar di KPK, yaitu percakapan telepon dengan Jampidsus Kemas Yahya Rahman dan kedatangannya ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung membawa surat jaminan dari Sjamsul Nursalim.

Namun di lain kesempatan, Kemas mengaku kenal dengan Artalyta Suryani, yang akrab dipanggil Ayin. Sejak kapan? Kemas mengaku lupa. Ayin



Ketua KPK Antasari Azhar segera melapor kepada Jaksa Agung

repro

yang dikabarkan sering berkunjung ke gedung Kejaksaan Agung, juga sudah berkenalan baik dengan Kemas.

Menurut sumber *Berita Indonesia*, Ayin mengenal Urip dan Kemas melalui Djoko Widodo, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yang sebelumnya bertugas di Kejaksaan Agung hingga 9 Desember 2007, setingkat Urip. Diduga terkait hal ini, KPK dan Bagian Pengawasan Kejagung, secara terpisah sudah memeriksa Djoko. *Berita Indonesia* tidak berhasil mengonfirmasi hal ini kepada Djoko.

Selain beredarnya kabar tentang rekaman percakapan telepon antara Jampidsus Kemas Yahya Rahman dan Artalyta Suryani, sehari sebelum jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap KPK, juga diterima informasi perihal kedatangan Ayin mengunjungi Kemas di kantornya, bertepatan hari ulang tahun Kemas, pada 15 Februari lalu.

Ketika hal ini dikonfirmasi, kepada petugas piket, tidak ada yang mengaku melihatnya. Sementara buku tamu yang biasanya diletakkan di meja piket, sudah tidak ada lagi sejak kasus ini terkuak. Sugiyo, pegawai Tata Usaha Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, seusai diperiksa KPK pada 12 Maret lalu, ketika dikonfirmasi wartawan perihal kedatangan Artalyta ke Gedung Bundar pada 15 Februari 2008, itu hanya menjawab,

“*Gak ngerti saya.*”

Sementara itu, menurut sumber *Indopos* (18/3), bahwa pada 27 Februari, dua hari menjelang pengumuman penghentian penyelidikan kasus BLBI Sjamsul Nursalim, Ayin dengan Toyota Alphard mendatangi Gedung Bundar. Dia dikabarkan sempat menemui Urip di ruang kerjanya di lantai III No 7. Koran ini mencatat, saat itu, Ayin meminta Urip mengambil sebuah bungkusan di bagasi mobilnya. Urip lantas menyuruh jaksa Paulin Sitanggung. Tetapi, anggota tim jaksa 35 itu menolak instruksi tersebut. Koran ini tidak menjelaskan apakah hal ini sudah dikonfirmasi pada yang bersangkutan.

Sudah Diingatkan

Kedekatan hubungan Urip dan Kemas dengan Ayin juga diperkuat dengan informasi bahwa Kemas Yahya bersama empat jaksa lainnya beberapa bulan lalu dijamu Ayin berpelesiran ke Pulau Lelanga Kecil, di Lampung. Pulau seluas tiga hektare yang dikelilingi air jernih dan ditumbuhi terumbu karang perawan, itu memang milik Ayin. Di situ ada vila, bungalow dan dermaga pribadi. Tidak sembarang orang bisa masuk ke pulau itu, sebab dikawal ketat.

Tapi informasi pelesiran ini dibantah tegas oleh Kemas Yahya. Dia tegaskan bahwa dia tidak pernah ke pulau itu. Kendati Kemas mengaku me-

ngenal Ayin, tapi ditegaskan sama sekali tidak ada sangkut-paut dengan perkara apa pun, termasuk perkara BLBI Sjamsul Nursalim.

Jaksa Agung Hendarman Supandji sendiri mengaku mendengar isu kedatangan Artalyta mengunjungi Kemas di Gedung Bundar. Sehingga Hendarman menanyakan hal itu langsung kepada Kemas. Kepada Jaksa Agung, Jampidsus Kemas mengaku pernah dua kali ditemui Ayin. Sebagai orang yang sudah saling kenal, Kemas tidak merasa etis jika menolak kedatangan Ayin. Namun, dengan tegas Kemas menolak kedatangan Ayin untuk membicarakan perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Pada kesempatan itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji, sudah memperingatkan supaya Kemas berhati-hati. “Saya bilang sama Kemas, hati-hati kamu. Dalam kasus BLBI jangan sampai ada pendekatan. Jangan ada perantara. Make-lar kasus itu dijauhi,” ujar Hendarman.

Jaksa Agung mengatakan dari hasil pemeriksaan internal Kejaksaan Agung maupun KPK belum ada bukti keterlibatan Jampidsus Kemas Yahya dengan kasus tertangkapnya jaksa Urip menerima uang Rp 6,1 milyar dari Ayin. Jika ada bukti keterlibatan Kemas dan jaksa-jaksa lainnya, Jaksa Agung berjanji akan menindak dengan tegas.

Sementara, dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung, Rabu (5/3), Jaksa Agung dicecar pertanyaan soal tertangkapnya Urip Tri Gunawan oleh KPK. Kritik juga muncul terhadap Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin yang dinilai bertanggung jawab secara internal dalam mengawasi anak buahnya. Para anggota DPR mendesak Jaksa Agung agar segera memberhentikan atau menonaktifkan Kemas Yahya dan jaksa-jaksa lain yang terlibat dalam kasus itu.

Dari sumber *Berita Indonesia* di Kantor Kepresidenan disebut bahwa Presiden Susilo Bambang Ydhoyono dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla telah mendesak Jaksa Agung agar menindak Kemas dan M Salim untuk menunjukkan keseriusan pemerintah menangani kasus ini.

Lalu pada perkembangan berikutnya, Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam jumpa pers di Sasana Pradana Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (17/3), mengumumkan tindakan tegasnya mencopot Kemas Yahya Rahman dari jabatan Jaksa Agung Muda

Tindak Pidana Khusus dan Muhammad Salim dari jabatan Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Pencopotan itu dilakukan untuk menjaga kredibilitas dalam penanganan perkara korupsi. "Kita lihat kredibilitas berkurang. Apabila pejabat di situ menyampaikan kinerja, masyarakat tidak percaya," kata Hendarman.

Namun, Hendarman membantah penggantian keduanya atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Penggantian di Gedung Bundar memang hasil rapat pimpinan tadi sore karena banyaknya berita di surat kabar," ujar Jaksa Agung. Dalam waktu dekat, menurut Hendarman, penggantian juga akan dilakukan terhadap pejabat-pejabat di Gedung Bundar untuk revitalisasi.

Soal siapa pengganti Muhammad Salim menjabat Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung adalah kewenangan Jaksa Agung. Sementara itu, pengganti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus harus melalui keputusan pre-



Mantan Jampidsus Kemas Yahya mengaku dua kali ditemui Artalyta di

siden. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan, Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. Setelah prosedur ini ditempuh, Marwan Effendi diangkat menjabat Jampidsus berdasarkan Keppres No.24/M/Thn 2008

tertanggal 11 April 2008. Marwan sebelumnya menjabat Kepala Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung.

Pelunasan

Publik tidak mudah percaya bahwa Urip sendirian dalam hal penerimaan uang Rp 6,1 milyar itu. Tampaknya, Jaksa

Kronologi Tertangkapnya Jaksa Urip

23 Juli 2007

Kejagung membentuk tim untuk menyidik kasus BLBI. Dipilih 35 jaksa terbaik dari berbagai daerah hasil seleksi 80 jaksa. Dibagi dalam dua tim. Salah satu tim dipimpin Urip Tri Gunawan, khusus menangani kasus BLBI terkait BDN. Tim lain dipimpin Sriyono menangani BLBI terkait Bank Central Asia (BCA).

30 Oktober 2007

Tim 35 jaksa terbaik yang dipercaya menangani kasus BLBI itu diberi tenggat waktu selesainya penyelidikan pada 30 Oktober 2007. Tetapi, ternyata tidak bisa dipenuhi karena kesulitan memperoleh dokumen dan bukti.

9 Desember 2007

Di tengah proses penyidikan kasus BLBI, Jampidsus Kemas Yahya ditengarai untuk kedua kalinya, setelah 2 September 2007, bepergian ke Singapura, bukan melalui Bandara Soekarno-Hatta, tetapi melalui Batam. Salah satu obligor yang terkait BLBI, Sjamsul Nursalim, memilih tinggal di Singapura sejak 2001.

31 Desember 2007

Kejagung memperpanjang penyelidikan selama dua bulan, yakni sampai 31 Desember 2007. Juga, tidak terpenuhi. Sehingga diperpanjang lagi sampai 29 Februari 2008.

17 Januari 2008

Sjamsul Nursalim dijadwal akan diperiksa Gedung Bundar Kejagung. Tapi hingga petang, mantan pemilik BDN itu tak datang. Pada petang itu Artalyta Suryani datang dan langsung masuk Gedung Bundar.

15 Februari 2008

Artalyta dikabarkan dating ke Gedung Bundar, bertepatan hari ulang tahun Jampidsus Kemas Yahya. Tidak ada keterangan pasti apakah Ayin bertemu Kemas. Ketika hal ini dikonfirmasi, kepada petugas piket, tidak ada yang mengukumi melihatnya.

27 Februari 2008

Dua hari menjelang pengumuman penghentian penyelidikan kasus BLBI Sjamsul Nursalim,

Ayin dikabarkan sempat menemui Urip di ruang kerjanya di lantai III No 7.

29 Februari 2008

Pada batas akhir 29 Februari 2008, itu Kemas mengumumkan, penyelidikan kasus BLBI, terkait BDN dan Bank Central Asia (BCA), tidak menemukan perbuatan melawan hukum sehingga harus dihentikan.

2 Maret 2008

Pukul 13:00: Ketua Tim Jaksa Penyelidikan Kasus BLBI, Urip Tri Gunawan (41), dengan tenang meninggalkan hotel tempatnya menginap di kawasan Kota, Jakarta. Dia mengendarai mobil Toyota Kijang LGX warna silver yang berpelat nomor DK 1832 CF (Bali) menuju kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Petugas KPK yang sudah membuntutinya sejak 27 Februari mengekor dari belakang.

Pukul 14:00: Urip sampai dan masuk pintu gerbang rumah di Jalan Terusan Hang Lekir II, Kavling WG 9, RT 06 RW 09, Grogol Selatan, Simprug, Jakarta Selatan. Rumah itu diduga milik



di Gedung Bundar (Kantor Kejaksaan Agung), Jakarta

berindo/ws

Agung Hendarman Supandji juga agaknya sulit percaya. Menurutnya, uang Rp 6 miliar itu terlalu besar untuk seorang jaksa bergaji Rp 3,5 juta per bulan.

Apalagi menurut sumber *Berita Indonesia* di KPK, diduga uang Rp 6,1 miliar, itu merupakan tahapan penye-

rahan terakhir. Diyakini sudah ada tahapan penyerahan uang sebelumnya. Indikasi ke arah itu antara lain terlihat dari jumlah uang 660.000 dollar AS. Kenapa tidak genap 600 atau 700 ribu dollar AS?

Harian *Kompas* juga menduga demikian. "Dari Pusat Pelaporan dan Analisis Tran-

saksi Keuangan (PPATK) ditemukan bukti penarikan uang yang jauh lebih besar daripada 660.000 dollar AS itu. Uang itu diambil dari sebuah bank swasta asing serta sebagian kecil lainnya dari Singapura," tulis *Kompas* 17 Maret 2008.

Diduga terkait data penarikan uang tersebut, Direktur Operasional Bank Internasional Indonesia (BII) Fransiska Oei, yang akrab dipanggil Ari, telah dimintai keterangan oleh KPK, 18 Maret 2008. Fransiska datang ke KPK pukul 10.00 dan pulang pukul 14.30.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP, yang dikonfirmasi mengenai hal ini Selasa (18/3), membenarkan adanya pemeriksaan Direktur Operasional BII itu. "Nama panggilannya Ibu Ari, tetapi nama aslinya Fransiska. Saya tidak tahu materinya apa. Tetapi yang jelas direktur BII itu dimintai keterangan terkait dengan penyidikan kasus UTG (Urip)," kata Johan.

Dugaan suap dalam kasus BLBI kepada BDNI (milik Sjamsul) menjadi amat kuat jika ditelusuri bagaimana Tim Jaksa Kejagung melakukan penyidikan dan beberapa kali meminta perpanjangan waktu

penyelidikan, sampai akhir mengambil keputusan mengakhiri penyidikan karena tidak terbukti ada pelanggaran pidana korupsi.

Kejagung memilih 35 jaksa terbaik dari berbagai daerah khusus untuk menangani kasus BLBI. Ke-35 jaksa terbaik dari hasil seleksi 80 jaksa itu, dibagi dalam tiga tim. Salah satu tim dipimpin Urip Tri Gunawan, khusus menangani kasus BLBI terkait BDNI. Tim lain menangani BLBI Bank Central Asia (BCA).

Mereka diberi tenggat waktu selesainya penyelidikan pada 30 Oktober 2007. Tetapi, ternyata tidak bisa dipenuhi karena kesulitan memperoleh dokumen. Kemudian, Kejagung memperpanjang penyelidikan selama dua bulan, yakni sampai 31 Desember 2007. Juga, tidak terpenuhi. Diperpanjang lagi hingga 29 Februari 2008.

Tiba pada batas akhir 29 Februari 2008, itu Jampidsus Kemas Yahya mengumumkan, penyelidikan kasus BLBI, terkait BDNI dan Bank Central Asia (BCA), tidak menemukan bukti perbuatan melawan hukum sehingga harus dihentikan. ■ BI/TSL-MLP-MS

Syamsul Nursalim, mantan Presiden Direktur Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang terlibat perkara BLBI.

Pukul 16.30: Mobil Urip pun keluar dan segera ditangkap petugas KPK. Di dalam mobilnya ditemukan kardus minuman ringan berisi uang US\$ 660 ribu setara Rp 6,1 miliar.

Pukul 18.15: Dua mobil berwarna silver berhenti di depan Kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Pusat. Satu mobil Kijang LGX bernopol DK 1832 CF milik Urip dan satu Daihatsu Xenia milik penyidik KPK. Urip dikeluarkan dari Kijang dengan tangan diborgol dan digiring ke ruang pemeriksaan Kantor KPK.

Pukul 20.30: Seorang laki-laki dibawa penyidik ke KPK. Namun, pria yang memakai jaket warna merah dan putih itu tidak diborgol.

Pukul 20.45: Seorang wanita setengah baya, yang kemudian diketahui bernama Artalyta Suryani, juga digelandang penyidik ke KPK. Setelah diperiksa, Artalyta langsung di tahan di rumah tahanan wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Pukul 23.02: Setelah diperiksa lima jam, Urip dibawa lagi ke mobilnya untuk mengambil barang

bukti yang dituduhkan kepadanya. Sesuai pemeriksaan, Urip ditahan KPK di penjara Brimob, Kelapa Dua, Depok.

12 Maret 2008

Kapuspenkum Kejagung BD Nainggolan dalam jumpa pers di gedung Puspenkum, Kejagung, mengungkap pemberhentian sementara Urip Tri Gunawan dari statusnya sebagai jaksa dan pegawai negeri sipil (PNS) kejaksaan. Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-VII-001/C/03/2008, ini diteken Jaksa Agung Hendarman Supandji pada 6 Maret 2008.

17 Maret 2008

Jaksa Agung Hendarman Supandji mencopot Kemas Yahya Rahman dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Muhammad Salim dari jabatan Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Keputusan ini untuk menjaga kredibilitas dalam penanganan perkara korupsi.

25 Maret 2008

Muhammad Farela dilantik sebagai Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus

Kejaksaan Agung menggantikan Muhammad Salim yang dicopot dari jabatannya sebagai dampak kasus dugaan suap jaksa Urip. Sebelumnya, Muhammad Farela adalah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Namanya sempat mencuat lantaran memegang kasus Budiman Sudjatmiko dan Muktar Pakpahan dengan tuduhan melakukan subversif pada tahun 1995. Dalam kasus korupsi, Farela pernah memegang kasus Bank Sertivia yang menuntut bos bank tersebut, David Nusa Wijaya empat tahun penjara.

28 Maret 2008

Setelah menggodok beberapa calon untuk diajukan kepada Presiden, rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjuk Kepala Pusdiklat Kejagung Marwan Effendy sebagai JAM Pidsus baru menggantikan Kemas Yahya. Marwan Effendy tercatat sebagai jaksa yang memiliki rekor positif dalam mengejar koruptor. Selama bertugas di Jawa Timur, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur tersebut berhasil membawa 18 kasus korupsi dengan lebih dari 50 tersangka ke meja persidangan. ■ pdbi

Sjamsul Tak Datang, Kemas ke Singapura

Hingga penyelidikan kasus BLBI-BDNI berakhir, Sjamsul yang bermukim di Singapura belum pernah sekali pun dimintai keterangan. Sementara, Jampidsus Kemas Yahya, diduga dua kali ke Singapura.

Pada pertengahan 1997, BDNI mengalami kesulitan likuiditas, dan diberikan dana BLBI sebesar Rp 28,1 triliun hingga mencapai Rp 28,408 triliun. Dia diduga menyelenggarakan BLBI tersebut dan dinilai sebagai obligor BLBI yang tidak kooperatif. Sehingga ia ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan.

Sesuai data hasil investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwa menjelang BDNI menerima kurungan BLBI, Sjamsul Nursalim diduga berusaha mengosongkan kas BDNI dengan menyalurkan kredit pada sejumlah perusahaan di luar negeri, yang sebagian besar dipimpin oleh Liem Mei Fung dan Liem Min Lin (ayah Sjamsul). Kompas 27/5/2002 memberitakan, perusahaan itu adalah Trandale Pte Ltd, Habitat Properties Pte Ltd, Grand Tour Tyre Pte Ltd, dan GT Asia Pacific Holding Pte Ltd di Singapura, Sino Great Ltd, Broad Bay Ltd, dan Team Good International Ltd di Hongkong, serta Globe Trading Company dan Seven Machinery Ltd di Taiwan. Dana yang disalurkan mencapai 607,95 juta dollar AS. Tidak pernah ada klarifikasi dari Sjamsul perihal hasil investigasi ICW ini.

Imperium bisnis keluarga Sjamsul di Singapura berpusat di Robinson Road. Sejumlah direksi Tuan Sing Holding tercatat pernah menjadi eksekutif di perusahaan Sjamsul lainnya, Nuri Holding Pte Ltd dan Habitat Properties Pte Ltd. Sebagai investor di Singapura, nama Sjamsul pun tercatat di Economic Development Board (EDB) dan International Enterprise Singapore sebagai Liem Tek Siong.

Dengan alasan ada penyempitan pembuluh darah di jantung Sjamsul, Kejaksaan, yang saat itu dipimpin Marzuki Darusman mengeluarkan izin berobat ke Jepang pada Mei 2001. Tapi sejak itu, Sjamsul tak pernah pulang. Saat Marzuki digantikan Baharuddin Lopa sebagai Jaksa Agung, Juni 2001, Sjamsul diminta pulang, tapi ia menolak dan memilih bermukim di Singapura. Sejak itu, dalam berbagai proses penyelesaian kasus BLBI, termasuk penandatanganan *master of*

settlement and acquisition agreement (MSAA), ia diwakili kuasa hukumnya atau istrinya, Itjih Nursalim.

Setelah ada proses penyelesaian melalui MSAA, pemerintah menerbitkan surat keterangan lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim pada April 2004. Berdasarkan itu, Jaksa Agung MA Rachman dan kasus dugaan korupsi BLBI yang menjadikannya sebagai tersangka dihentikan pada Juli 2004 dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Jaksa Agung MA Rachman.

Atas desakan berbagai pihak, Jaksa Agung Hendarman Supandji pada Desember 2007 membuka kembali penyelidikan kasus BLBI, khususnya terkait BDNI dan BCA. Kejagung membentuk tim khusus terdiri 35 jaksa terbaik yang direkrut dari berbagai daerah. Jaksa Urip Tri Gunawan dipercaya memimpin tim yang menangani kasus BLBI terkait BDNI (Sjamsul). Hingga akhirnya Jampidsus Kemas Yahya Rahman mengumumkan penghentian penyidikan karena tidak ditemukan bukti pidana pada 29 Februari 2008 lalu, Sjamsul tak pernah datang ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Sedangkan Anthony Salim (BCA) dua kali memenuhi panggilan dan diperiksa.

Lalu, dua hari setelah penyidikan dihentikan, oleh KPK, jaksa Urip Tri Gunawan tertangkap dengan barang bukti 660 ribu dollar AS di mobilnya setelah bertemu Artalyta Suryani di rumah Sjamsul Nursalim di Jalan Terusan Hang Lekir II, Kavling WG 9, RT 06 RW 09, Grogol Selatan, Simprug, Jakarta Selatan. Belakangan, Ayin mengaku itu rumahnya dan meminta jangan menghubungkan kasusnya dengan Nursalim. Sementara Urip juga membantah uang 660 ribu dollar AS itu sebagai hasil bisnis permata.

Dari pelbagai pemberitaan media massa seputar penangkapan jaksa Urip dengan barang bukti US\$ 660.000 di mobilnya (2/3), hanya berselang dua hari (29/2) setelah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman mengumumkan penghentian penyidikan BLBI terkait BDNI (Sjamsul Nursalim)



Kemas Yahya ditengarai dua kali bepergian ke Singapur

dan BCA (Anthony Salim), ada beberapa hal yang terasa ganjil dan menarik perhatian publik.

Salah satu adalah Sjamsul Nursalim, mantan pemilik BDNI, yang belakangan bermukim di Singapura belum pernah datang untuk diperiksa Tim Jaksa Kejaksaan Agung. Berbeda dengan Anthony Salim, mantan pemilik BCA, yang beberapa kali datang ke Gedung Bundar Kejaksaan untuk dimintai keterangan.

Sumber di Kejagung menyebut, Sjamsul memang dikirim surat panggilan, tetapi tak pernah datang. Apakah surat panggilan ini sampai ke Sjamsul atau malah tidak jadi dikirim, juga menjadi isu simpang-siur. Namun menurut sumber *Indopos 13 Mar 2008*, dari hasil pemeriksaan internal Kejaksaan Agung (Kejagung) surat panggilan pemeriksaan untuk bos Grup Gajah Tunggal itu tak pernah dikirim. Hal ini terungkap dari Paino, kurir yang bertugas mengantar surat panggilan untuk Sjamsul. Paino sedianya membawa surat panggilan ke Sjamsul ke kantor pengacaranya, Adnan Buyung Nasution (ABN) Lawfirm. Tapi, di tengah



pura, bukan melalui Bandara Soekarno-Hatta, tetapi melalui Batam.

foto: theheikenfamily.com

perjalanan, Paino ditelepon jaksa dari Gedung Bundar, diminta menunda penyerahan surat panggilan Sjamsul. Paino pun lantas balik ke Gedung Bundar.

Tapi yang jelas, pada 17 Januari 2008, Sjamsul Nursalim pernah dijadwalkan akan diperiksa Gedung Bundar Kejagung. Hal ini, tentu menjadi agenda liputan bagi berbagai media massa. Sehingga pada hari itu, sejak pagi, hampir 60-an wartawan sudah memenuhi pelataran Gedung Bundar menanti kedatangan Sjamsul. Sementara di luar pagar, ada sekelompok mahasiswa berunjuk rasa mendesak agar Sjamsul ditahan.

Tapi ditunggu hingga petang, bos Gajah Tunggal itu tak datang-datang. Wartawan yang dari pagi sudah menunggu sudah mulai berkurang. Begitu pula mahasiswa yang teriak-teriak di luar sudah lelah dan kehabisan suara, dan pulang. Lalu, saat suasana hiruk-pikuk sudah mulai reda, sebuah mobil Toyota Alphard membelok menuju gerbang pintu utama Gedung Bundar Kejagung. Di depan pintu, mobil berhenti, seorang pengawal segera turun, disusul seorang perempuan, yang kemu-

dian dikenal bernama Artalyta Suryani, akrab dipanggil Ayin atau Bunda. Pengusaha kaya dari Lampung yang disebut kenal baik dengan Sjamsul Nursalim itu langsung masuk ke dalam Gedung Bundar. Tidak diperoleh informasi pasti siapa petinggi Kejagung yang ditemui Ayin kala itu.

Namun, sumber di Kejagung menyebut bahwa Ayin kenal baik dengan Jampidsus Kemas Yahya dan Urip Tri Gunawan, Ketua Tim Jaksa Pemeriksa BLBI terkait BDNI (Sjamsul Nursalim). Kemas sendiri mengaku kenal dengan Ayin. Bahkan, kepada Jaksa Agung Hendarman, Jampidsus (sudah dicopot 17/3) itu dua kali ditemui Ayin di kantornya. Tapi menolak membicarakan perkara apa pun yang tengah di tangani Kejagung dengan Ayin. Sehingga, Jaksa Agung mengingatkan Kemas agar berhati-hati, jangan sampai berhubungan dengan Markus (makelar kasus). Lalu, ada catatan imigrasi yang amat menarik perhatian pers apabila dikaitkan dengan keengganan Sjamsul Nursalim memenuhi panggilan Kejagung. Justru dari catatan imigrasi itu, Kemas

Yahya ditengarai dua kali bepergian ke Singapura, bukan melalui Bandara Soekarno-Hatta, tetapi melalui Batam. Yakni pada 2 September 2007 dan 9 Desember 2007. *Berita Indonesia* tidak berhasil mengonfirmasi hal ini kepada Kemas. Apakah ia benar bepergian ke Singapura dan untuk keperluan apa?

Namun yang jelas, Kemas sendiri menyatakan tidak ada hubungan perkennalannya dengan Artalyta Suryani dengan kasus apa pun yang tengah ditangani Kejagung, termasuk kasus BLBI terkait BDNI. Bahkan menurut Kemas, kejaksaan tidak akan membuka lagi kasus BLBI meski salah seorang koordinator jaksanya menerima suap. "Kayaknya tidak (dibuka lagi)," jelas Kemas menjawab pers.

Perihal keputusan Jaksa Agung mengenai penggantian dirinya dari jabatan Jampidsus, Kemas Yahya Rahman mengaku ikhlas. "Saya menerima dengan senang hati. Saya bawahan. Apa yang disampaikan pimpinan, saya anggap itu yang terbaik," katanya. Namun, dia menegaskan bahwa dirinya bukan nonaktif, tetapi diganti atau dimutasi. ■ **BI/MS-MLP-BHS**



Sumber di Kejaksaan mengungkapkan, gaji jaksa baru hanya Rp 1,3 juta.

foto: berindo/ws

Gaji Jaksa dan Pembuktian Terbalik

Gaji jaksa, sama seperti pegawai negeri (aparatur Negara) lainnya, sering dikeluhkan masih sangat kecil. Setiap kali ada aparatur negara yang terlibat korupsi atau suap, selalu dikaitkan dengan faktor gaji kecil. Seolah-olah gaji kecil menjadi pembenaran kebiasaan korupsi.

Sama halnya ketika Jaksa Urip Tri Gunawan tertangkap tangan membawa uang 660 ribu dollar AS di mobilnya yang diduga suap, sebagai penerimaan tahap akhir. Berbagai pihak lantas menyebut hal ini bisa menjadi inspirasi bagi Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk mereformasi gaji jajarannya. Hal itu dikemukakan karena gaji yang diterima para jaksa itu, terlalu kecil dibandingkan dengan tugas beratnya.

Bayangkan, Urip, bergaji Rp 3,5 juta per bulan, menjadi ketua tim untuk mengusut dana BLBI Sjamsul Nursalim

Tertangkapnya Jaksa Urip yang bergaji Rp 3,5 juta, sebaiknya menjadi momentum memberlakukan pembuktian terbalik dalam pemberantasan korupsi.

bernilai Rp 39 triliun. Gaji jaksa itu, disebut tentu sangat kecil bagi seorang yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang menuntut tanggungjawab besar.

Sumber di Kejaksaan mengungkapkan, jaksa baru, gajinya hanya Rp 1,3 juta. Urip yang menjabat Kasubdit Tindak Pidana Ekonomi Pidus hanya mendapat gaji Rp 3,5 juta. Hampir sama dengan gaji para jaksa fungsional, antara Rp 3,5 hingga Rp 4 juta. Atasan Urip, Muhammad Salim yang menjabat Direktur Penyidikan (gaji setingkat direktur di Kejaksaan) sekitar Rp 5 juta. Gaji pejabat selevel Salim di KPK sudah mencapai Rp15 - 30 juta.

Sedangkan gaji plus tun-

jangan Jaksa Agung Muda, seperti JAM Pidsus Kemas Yahya Rachman yang menjadi penanggungjawab semua penugusan korupsi di Gedung Bundar, hanya sekitar Rp 6,5 juta. Jaksa Agung, yang setara dengan menteri di kabinet, bergaji pokok sekitar Rp 19 juta, ditambah berbagai fasilitas dan protokoler negara. Sementara, Ketua KPK bergaji sekitar Rp 43 juta, dan wakil ketua KPK Rp 39 juta.

Perihal penggajian aparatur Kejaksaan ini pernah mengemukakan dalam rapat kerja DPR dengan Jaksa Agung sehari setelah Urip tertangkap. Para anggota Komisi III DPR mendorong Jaksa Agung untuk merombak penggajian jaksa tersebut. Menanggapi hal itu,

Hendarman mengungkapkan telah menugaskan Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin dan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk mengkaji gaji para jaksa itu.

Nadrah Izahari, salah satu Anggota Komisi III DPR yang mengemukakan, kecilnya gaji jaksa, membuat para jaksa mencari penghasilan di tempat lain. Nadrah mencontohkan gaji Urip yang hanya Rp 3,5 juta per bulan, yang menurutnya, tidak dapat menutupi kebutuhan biaya hidup di ibukota.

Logika berpikir ini, secara sepintas seolah menjadi penyebab utama terjadinya korupsi. Tapi jika ditelisik bagaimana gaya hidup para jaksa sehari-hari, sangat sulit membayangkan seberapa tinggi gaji jaksa dinaikkan supaya tidak korupsi atau menerima suap.

Kita ambil contoh biaya hidup sehari-hari jaksa setingkat Urip. Seperti dicatat Ketua BCW (Bali Corruption Watch)

Putu Wirata Dwikora, Urip punya rumah di kawasan Renon serta tiga mobil mewah yang parkir di rumah yang ditempati isterinya tersebut. Selain itu, Urip juga punya rumah di kompleks Kemang Pratama Bekasi. Berapa gaji seorang jaksa supaya bisa hidup seperti Urip dan kawankawan jaksa lainnya? Cukupkah Rp 30 – 50 juta per bulan? Barangkali tidak cukup. Jika demikian, berapa gaji jaksa selevel Urip, supaya tidak korupsi?

Bisa pusing tujuh keliling bila pemberantasan korupsi hanya beranjak dari pelipatgandaan gaji jaksa dan aparatur lainnya. Yang terutama adalah moral dan ketaatan pada ajaran agama, hukum serta panggilan tugas sebagai abdi masyarakat, bangsa dan Negara. Cobalah dilakukan pembuktian terbalik, berapa biaya hidup seorang jaksa dan aparatur lainnya setiap bulan. Apa saja harta milik mereka?

Barangkali Mahkamah Agung dan KPK sangat perlu memulai mereformasi hukum dengan asas pembuktian terbalik dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Prof JE Sahetapy mengemukakan untuk memberlakukan asas pembuktian terbalik ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu direvisi.

Namun, dia juga mendorong Mahkamah Agung (MA) agar segera melakukan asas pembuktian terbalik melalui yurisprudensi. Dalam rangka usulannya ini, JE Sahetapy mengungkapkan dia bersama anggota KHN sudah bertemu Presiden agar asas pembuktian terbalik ini segera dimasukkan ke dalam KUHAP.

JE Sahetapy melihat dengan kondisi Indonesia yang sudah hancur karena korupsi, maka asas pembuktian terbalik sangat relevan diberlakukan. Dia menjelaskan, pembuktian terbalik adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi diwajibkan membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi dengan bukti hukum yang kuat. ■ BI/BHS-MS



Artalyta Suryani

Repro Gatra

Tolong Jangan Hakimi Saya

Artalyta Suryani, pengusaha yang ditangkap KPK bersama jaksa Urip Tri Gunawan meminta pers dan publik jangan menghakiminya.

Jangan hubung-hubungkan masalah yang saya hadapi dengan siapa pun. Di berbagai media, saya dihakimi secara sepihak, dituduh macam-macam dan dimanfaatkan untuk menangguk kepentingan politik di tempat yang tidak pantas.

Kewajiban saya sebagai warga negara adalah datang dan memberi keterangan ke KPK, bahkan nanti akan dibuktikan di pengadilan. Benar atau salah, fakta pengadilan yang membuktikan. Soal BLBI saya kira itu ranah yang lain. Dalam sidang interpelasi (DPR) jelas sekali, kebijakan era Gus Dur dan Megawati menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan.

Sekali lagi, jangan dicari-cari dan dihubung-hubungkan kasus yang menimpa saya dengan orang lain. Kasihan mereka yang tidak tahu apa-apa lalu ditarik-tarik ke masalah saya.

Saya orang bisnis, wajar kalau saya kenal dan bertemu dengan banyak kalangan. Apakah saya salah jika berhubungan dengan banyak kalangan, termasuk pejabat pemerintah? Tolonglah, saya warga negara biasa yang punya hak bergaul dan bertemu siapa pun. Saya tak memanfaatkan kedekatan dengan banyak kalangan untuk urusan yang bukan tempatnya.

Saya merangkak dari nol sampai seperti sekarang ini, semua bermodal kerja keras dan ulet. Saya berjuang menjadi seperti sekarang sejak lama. Keluarga besar saya sudah berkecukupan sejak lama, bukan karena kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh siapa pun. Hormati hak hukum saya.

Urip-Ayin Dalam Berita

Sejak tertangkapnya jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani yang diduga terlibat suap dengan barang bukti US\$ 660 ribu, pada 2 Maret 2008, telah menjadi berita utama di berbagai media cetak, baik harian maupun majalah berita.

Berbagai bentuk dan jenis berita telah menjadi santapan menarik bagi pembaca. Baik sebagai reportase dari hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pemeriksaan internal Kejaksaan Agung, maupun hasil investigasi ke berbagai sumber dan opini pakar dan pengamat.

Umumnya pemberitaan lebih mengarah pada dugaan KPK bahwa kasus ini adalah suap terkait perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diterima Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tatkala masih dimiliki Sjamsul Nursalin. Belakangan, Ayin meminta jangan menghubungkan kasusnya dengan Nursalin. Sementara Urip juga membantah uang 660 ribu dollar AS itu sebagai hasil bisnis pertama.

Namun dari sekian banyak pemberitaan oleh berbagai media massa, tampaknya lebih mengarah pada keyakinan KPK bahwa hal ini adalah kasus suap terkait perkara BLBI-BDNI. Para pengamat juga berharap agar kasus ini jangan direduksi dari kasus suap menjadi kasus bisnis pertama yang mengarah pada pelanggaran etika jaksa.

Dari hasil riset data *Berita Indonesia* tentang kuantitas dan intensitas berita media cetak atas kasus ini selama delapan hari penerbitan, sejak penangkapan jaksa Urip 2 Maret 2008 menunjukkan rata-rata koran harian menerbitkan dua berita setiap hari. Koran harian yang diteliti adalah Kompas, Media Indonesia, Republika, Indo Pos, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Sinar Harapan. Begitu juga dua majalah berita, Tempo dan Gatra. Dua harian ekonomi Investor Daily dan Bisnis Indonesia juga diteliti, tapi pemberitaannya kurang memadai.

Indo Pos dan Kompas Leading

Indo Pos paling sering menempatkannya di halaman muka (headline), dari 14 berita, 12 di halaman muka (HM) dan hanya 2 di halaman dalam (HD). Menyusul Kompas 15 berita (8 HM dan 7 HD), Republika 15 berita (9 HM dan 6 HD), Koran Tempo 14 berita (5 HM dan 9 HD), Sinar Harapan 12 berita (5 dan 7), Suara Pembaruan 11 berita (3 dan 8) dan paling pencoret Media Indonesia 5 berita (3 dan 2).

Koran harian Kompas, yang merupakan koran paling berpengaruh di Indonesia, pertama kali menampilkan berita ini, Senin 3 Maret 2008, sebagai *headline* utama dengan foto besar (lima kolom) jaksa Urip digiring petugas

KPK, berjudul: Nama Kejaksaan Agung Rusak; dan subjudul: Ketua Tim Jaksa Pemeriksa Kasus BLBI Ditangkap KPK.

Koran harian Indo Pos, pada hari yang sama juga menempatkan berita ini sebagai headline utama lima kolom dilengkapi foto Urip digiring petugas KPK dengan judul: KPK Tangkap Jaksa BLBI subjudul: Di Rumah Sjamsul Nursalin Jl Hang Lekir, Barang Bukti Rp 6 M.

Kompas dan Indo Pos tampak lebih menonjol dalam liputan hari pertama berita tertangkapnya Urip ini, dibanding harian umum lainnya. Paling tidak terlihat dari pemasangan foto dan penempatan beritanya sebagai berita utama halaman muka.

Bandingkan koran harian lainnya yang tampak kalah cekatan dibanding Kompas dan Indo Pos. Republika hanya menempatkannya di halaman 12 tanpa foto. Koran ini menonjolkan harga minyak goreng melejit sebagai berita utama halaman muka. Media Indonesia menerbitkannya hanya satu kolom di halaman muka bawah dengan mengandalkan keterangan pers Juru Bicara KPK Johan Budi, juga tanpa foto tersangka. Koran ini menonjolkan posisi Golkar dalam lobi dan voting RUU Pemilu di DPR.

Koran Tempo juga tak punya foto dan menempatkan berita ini di halaman dua. Koran Tempo mengangkat berita "Ketua BPK Minta Bantuan BI Sponsor Undang-undang" di halaman muka.

Harian sore Suara Pembaruan menerbitkan berita ini sebagai headline dua di halaman muka dengan judul "Jaksa Kasus BLBI Ditangkap, Kejagung Gagal Berantas Korupsi." Dilengkapi dengan berita kedua di halaman tiga. Sementara harian sore lainnya, Sinar Harapan (3/3) hanya menerbitkan berita foto tiga kolom di halaman tiga. Kedua harian sore ini, yang sebenarnya mempunyai waktu yang lebih panjang, pada penerbitan hari pertama tampaknya kurang mampu mengungguli harian umum pagi.

Sementara dua harian ekonomi Bisnis Indonesia dan Investor Daily, pada hari pertama tertangkapnya Urip, sama sekali belum memberitaikannya. Bahkan Bisnis Indonesia dalam tajuknya masih menulis, pengusaha nasional Anthony Salim dan Sjamsul Nursalin untuk sementara boleh bernafas lega. Investor Daily pada hari itu menampilkan foto Alya Rohali berpakaian ketat menunjukkan kelangsingan tubuhnya. Barulah pada hari-hari berikutnya, kedua harian ekonomi ini ikut mengangkat berita

tertangkapnya jaksa Urip, kendati tidak seintensif harian umum.

Republika dan Koran Tempo

Pada hari kedua (4/3), Koran Tempo dan Republika tampaknya berupaya mengejar keunggulan Indo Pos dan Kompas hari pertama. Koran Tempo memuatnya sangat menarik dan relatif lengkap di halaman muka. Dua berita lagi halaman A2, disempurnakan dengan Editorial: Siapa Setelah Jaksa.

Giliran Republika menempatkannya sebagai *headline* lima kolom penuh dilengkapi foto Artalyta. Masih di halaman muka ada dua berita pendek, kisah tentang Ayin dan Urip. Ditambah lagi berita panjang desakan DPR agar jajaran Kejagung diperiksa, dengan judul memanjang satu halaman penuh.

Namun, kedua koran itu (Koran Tempo dan Republika) belum mengungguli Indo Pos, yang pada hari kedua (4/3) memasang judul berita



Dua Berita: Rata-rata koran harian menerbitkan dua be

utama KPK Geledah Gedung Bundar, memanjang satu halaman penuh. Dilengkapi dua berita bergambar Urip dan Ayin serta grafis garis komando penyelidikan BLBI. Ditambah tajuk (Jati Diri) di halaman 4 (opini).

Tampaknya Indo Pos mempunyai hubungan baik dengan sumber-sumber di KPK dan Kejagung. Sementara, Kompas masih menempatkannya sebagai headline satu. Tapi tidak lagi semenonjol hari pertama (3/3). Kompas menonjolkan dua judul di halaman muka dengan cerita lebih lengkap. Ditambah laporan "Debitor Bebas, Jaksa Masuk Bui" di halaman lima, berdamangan satu berita terkait "Kewenangan Kejaksaan dan Polri Perlu Dicabut." Serta tajuk "Ironi Kasus Penangkapan Jaksa" di halaman enam.

Sedangkan Media Indonesia menonjolkan berita seputar UU Pemilu. Berita Jaksa Urip hanya ditempatkan di bagian kaki halaman

muka. Namun, tertolong dengan Editorial “KPK Menjawab Keraguan” di halaman muka. Tampaknya Media Indonesia masih kalah gesit dalam perburuan berita.

Begitu pula dua harian sore Suara Pembaruan dan Sinar Harapan, masih sangat kalah dalam perburuan berita terbaru. Suara Pembaruan menempatkan di halaman depan, hanya beberapa alinea. Sama halnya dengan Sinar Harapan, hanya judul yang lebih menonjol. Praktis tidak ada informasi baru dibanding harian pagi. Masih lumayan Suara Pembaruan ada tajuk “Jaksa Bukan Saudagar” di halaman empat.

Sementara, dua harian ekonomi sudah mulai ikutan. Bisnis Indonesia memuat satu berita di halaman delapan. Investor Daily memuat berita foto “Kasus Suap” di halaman muka, serta karikatur di halaman 4 (opini).

Berita hari ketiga (5/3) Indo Pos masih tampil lebih unggul dilengkapi foto-foto eks-

dua satu di halaman 12.

Hari kelima, libur. Hari keenam (8/3), Indo Pos dan Republika masih menempatkan berita ini sebagai HL. Kompas kembali menempatkannya di kaki halaman muka. Koran Tempo surut ke halaman dua. Suara Pembaruan dua judul di halaman tiga. Sinar Harapan hanya menulis tajuk “Suap”. Media Indonesia tidak lagi memberitakan.

Hari ketujuh (Minggu 9/3) hanya Kompas yang memberitakan di pojok bawah halaman muka. Hari kedelapan (10/3), Koran Tempo (Hendarman Supandji Didesak Mundur) dan Sinar Harapan (KPK Segera Periksa Jampidus) kembali menempatkannya sebagai HL. Bahkan Sinar Harapan mengulasnya sebagai Liputan Khusus satu halaman (3) penuh. Indo Pos masih menulisnya dua kolom di halaman muka. Kompas masih ada berita di halaman dua dan satu opini halaman empat. Republika, Media Indonesia dan Suara Pembaruan tidak

Siapa Menyusul?

Pada edisi berikutnya, 17-23 Maret 2008, Tempo menampilkan lukisan (karikatur) seorang perempuan berpakaian tradisi etnis tertentu dan bertangan banyak sedang duduk bersila di atas sebuah wadah terbang di angkasa. Di kepalanya ada mahkota. Satu tangannya memegang pundi berbentuk babi, tangan satu lagi memegang palu yang lazim digunakan hakim memutus perkara. Tangan lainnya mikroskop atau cermin, yang lainnya menggenggam segepok uang, lainnya memainkan kartu dan satu tangan lagi memegang gelas berisi minuman berwarna merah. Di bawah karikatur itu tertera judul: Koneksi & Lobi Artalyta. Subjudul: Lika-liku wanita yang diduga menyuap jaksa BLBI. Bagaimana ia membangun jaringan di kalangan pejabat?

Tema sentral kedua edisi Tempo ini mengarah pada harapan penuntasan kasus suap-menyuap antara Artalyta, kerabat Sjamsul



berita setiap hari.

klusifnya. Republika dan Koran Tempo tak mau ketinggalan masih menempatkannya sebagai berita utama. Kompas mulai menurunkan di bagian kaki halaman muka. Media Indonesia hanya menurunkan berita pendek di pojok kanan halaman muka. Hari sore Sinar Harapan mulai menonjolkan sebagai HL utama. Suara Pembaruan menempatkannya di kolom pertama halaman muka bersambung ke halaman tiga, dengan tiga judul berita. Bisnis Indonesia memuat berita foto di halaman muka bersambung halaman delapan. Investor Daily memuat berita pendek di halaman delapan.

Hari keempat (6/3), Indo Pos, Republika, Koran Tempo dan Suara Pembaruan menempatkannya sebagai HL utama. Namun Indo Pos masih tampil lengkap. Kompas tidak lagi menempatkannya di halaman muka. Media Indonesia memuat satu berita di di kaki halaman

ada berita.

Hari kesembilan (11/3), Indo Pos kembali mengangkatnya sebagai HL “Ayin juga mengaku bisnis permata”. Republika di halaman satu dan dua. Kompas di halaman dua “Misteri Bisnis Permata”. Koran Tempo dan Media Indonesia juga di halaman dua, Sinar Harapan di halaman muka dan Suara Pembaruan di halaman dua.

Tempo dan Gatra

Majalah Berita Mingguan Tempo, dua kali menempatkan berita ini sebagai berita utama. Pada Edisi 10-16 Maret 2008, Tempo memvisualisasikan berita utamanya dalam cover dengan seseorang berjubah jaksa dan berkepala tikus terperangkap tangan ketika memungut uang dollar. Cover Tempo itu diberi judul: Skandal Jaksa Rp 6 Milyar. Subjudul: Jaksa Kasus BLBI Urip Tri Gunawan Ditangkap,

Nursalim dengan jaksa Urip yang diyakini tidak sendirian. Jika pada edisi pertama (10 halaman) lebih menyoroti jaksa (penerima suap), edisi berikutnya (juga 10 halaman) lebih menyoroti Ayin (pemberi suap): *Cerita tentang Si Ratu Lobi*. Tempo, tampaknya lebih sangat yakin bahwa kasus ini adalah suap.

Sementara, majalah berita mingguan Gatra, pada edisi 18 Tahun XIV 13-19 Maret 2008 menampilkan sampul depan dengan potret wajah Artalyta Suryani. Jemari tangannya menggelar beberapa lembaran uang dollar AS. Sampul depan itu berjudul: Wanita 6 Milyar di Sarang Jaksa.

Pada bagian awal berita utamanya, bertajuk *Episode Murung Si Pelobi Ulung*, terpampang wajah Artalyta Suryani tengah dicegat juru warta. Gatra lebih menonjolkan peran Ayin sebagai kerabat dekat Sjamsul Nursalim dalam pemberitaannya. ■ **Pusdat Berindo**

Mafia UUD di Senayan

Diduga terlibat suap (gratifikasi), anggota Komisi IV DPR, Al Amin Nur Nasution, ditangkap (KPK. Benarkah ada mafia di Senayan?)

Grup band Slank sempat diancam Dewan Kehormatan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) akan dituntut ke pengadilan. Slank dianggap merusak kehormatan DPR. Pasalnya, Slank saat berkunjung ke KPK, Maret lalu, untuk memberi dukungan terhadap pemberantasan korupsi, antara lain melantunkan lagu berjudul *Gosip Jalanan*.

Penggalan syair lagu itu berbunyi demikian: *Mau tau gak mafia di Senayan? Kerjanya tukang buat peraturan. Bikin UUD, ujung-ujungnya duit*. Lirik lagu ini rupanya dirasakan para anggota DPR, yang berkantor di Senayan, seperti yang dilakoni oleh para anggota dewan yang terhormat itu. Mereka merasa tak nyaman lantaran rasa kehormatannya terusik. Padahal dalam lirik lagu itu, tak ada satu kata DPR atau kata lain yang secara eksplisit menunjuk lembaga atau anggota legislatif itu.

Lalu, tak berapa lama kemudian, niat memperkarakan Slank itu dicabut. Bersamaan tersiarnya berita memalukan yang menimpa anggota DPR-RI. Seorang anggota Komisi IV (Kehutanan dan Pertanian) DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Al Amin Nur Nasution digelandang dan ditahan petugas KPK, Rabu dini hari 9 April 2008 di area parkir Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta. Anggota dewan terhormat itu ditangkap bersama Sekretaris Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan. Muhammad Al Amin Nur Nasution, suami penyanyi dangdut Kristina, dan Azirwan ditangkap, bersama tiga orang lainnya, di antaranya seorang perempuan muda.

Keduanya disangka terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pengalihan fungsi hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Saat ditangkap KPK menemukan uang Rp 4 juta di kantong Amin dan Rp 67 juta di mobil BMW milik anggota legislatif itu. Selain itu, di ruangan tempat keduanya melakukan pertemuan, KPK juga menemukan uang senilai 33.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 225 juta. Semua uang

dan mobil BMW milik Amin diamankan KPK sebagai barang bukti.

Konon, Amin sudah diawasi sejak November 2007. Ketua KPK Antasari Azhar membenarkan bahwa pihaknya memang sudah menyelidiki adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam upaya pengalihan fungsi hutan lindung di wilayah Kepulauan Riau, sejak enam bulan lalu atau akhir November 2007. "KPK telah menerima informasi mengenai pertemuan di Hotel Ritz Carlton beberapa hari sebelumnya," ungkap Antasari.

Tapi, Amin membantah dirinya tertang-

kap DPR dari Partai Bintang Reformasi, juga berkeyakinan Amin tidak tertangkap tangan. Begitu pula Wakil Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan DPR, Lukman Hakim tak yakin rekannya tertangkap tangan menerima suap atau gratifikasi. "Masak tertangkap tangan cuma Rp.4 juta. Kalau Cuma segitu, itu menghina anggota Dewan," kata Lukman. Belakangan, pimpinan Fraksi PPP pun menemui KPK untuk memperjelas penangkapan Amin.

Menanggapi tentang jumlah uang tersebut, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Yasin, kepada pers, mengakui jumlah uang yang ditemukan KPK pada saat penangkapan tidak terlampau besar. "Namun, ada perjanjian selanjutnya untuk memberikan uang senilai Rp 3 miliar," ungkap Yasin.

Menurut Yasin, uang tersebut diberikan untuk memuluskan pengalihan status fungsi hutan lindung di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Untuk itu, Pemkab Bintan membutuhkan rekomendasi dari Komisi IV DPR. "Jadi mereka harus melakukan deal pada anggota DPR untuk memuluskan alih fungsi lahan tersebut," kata Yasin sebagaimana dikutip Kompas 10/4.

Amin tidak sendirian dalam kasus suap ini. Diduga, paling sedikit ada sembilan orang anggota DPR yang terkait dengan kasus ini. Bahkan, menurut Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR, Gayus Lumbun, berdasar informasi yang diperoleh Badan Kehormatan, bahwa saat Al Amin ditangkap, kesembilan orang itu ada di lokasi kejadian. Namun, siapa-siapa kesembilan orang itu masih belum terungkap.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Suryadharma Ali mengatakan pihaknya menghormati proses hukum. Menyangkut status Amin sebagai anggota DPR masih dipertahankan.

Sedangkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jambi, Amin telah dinon-aktifkan. Suryadharma, yang juga Menteri Koperasi dan UKM itu berharap agar masyarakat memisahkan antara persoalan pribadi dan partai. "Jangan mencampuradukkan persoalan yang dapat berimbas pada pencitraan kelompok tertentu," harapnya. ■ BI/BHS



Kristina menjenguk Amin suaminya yang ditahan KPK (Insert Al Amin dan Kristina saat pernikahan)

kap tangan. Uang Rp.4 juta di kantong adalah uang pribadinya. Sedangkan yang Rp.67 juta di mobilnya adalah pinjaman dari Ketua Komisi IV DPR Ishartanto. "Itu uang yang dipinjam Amin dari saya. Jumlahnya 60 juta rupiah. Ada saksinya," kata Ishartanto membela Amin.

Nada pembelaan juga meluncur dari Ali Mochtar Ngabalin, Anggota DPR dari Partai Bulan Bintang. Ali berkeyakinan uang Rp.67 juta itu sebagai uang reses yang baru diterima Amin. "Di mobil saya juga ada uang reses 60 jutaan rupiah," katanya.

Hal senada juga dikemukakan Sirra Prayuna, pengacara Amin. Uang itu dikumpulkan Amin dari jatah uang reses, untuk dipergunakan memperbaiki rumahnya di kompleks perumahan DPR.

Sementara, Ade Daud Nasution, anggo-

Untuk memenuhi kebutuhan Departemen Luar Negeri (Deplu) terkait peningkatan volume kegiatan yang menghendaki kehadiran Menteri Luar Negeri, baik bilateral, regional, maupun multilateral, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk jabatan Wakil Menteri Luar Negeri (Wakil Menlu). Pembentukan jabatan baru itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.20 dan 21 Tahun 2008 tertanggal 10 Maret.

Menurut Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, pertimbangan utama pembentukan jabatan ini adalah penyempurnaan terus menerus struktur organisasi Deplu guna meningkatkan misi diplomasi Indonesia.

Sebenarnya di negara lain, jabatan wakil menlu bukan hal baru. Di negeri China, Jepang, Vietnam, Amerika Serikat, dan negara-negara Uni Eropa, jabatan ini

di atas, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan berpendapat, pembentukan wakil menlu wajar saja dalam sistem presidensial. Hanya, dia berpendapat sebaiknya inovasi seperti itu sebelumnya dimunculkan di awal pembentukan kabinet. Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga juga berpendapat, tidak ada masalah dengan jabatan baru itu. Tapi, karena bukan jabatan politis, Presiden menurutnya perlu berkonsultasi dengan DPR.

Mantan Ketua MPR, yang juga tokoh senior Partai Amanat Nasional Amien Rais dan Abdullah Toha (anggota Komisi I DPR dari F-PAN) juga berpendapat, tidak ada masalah dengan jabatan wakil menlu. Bahkan menurut mereka, Indonesia seharusnya sudah memiliki dua-tiga wakil menlu.

Sedangkan anggota Komisi I DPR Hajriyanto Y Thohari (F-PG) memberikan

Sebagaimana jabatan struktural lain, dia akan diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Menlu. Sedangkan mengenai anggaran, Menlu juga menjamin tidak akan membebani anggaran Deplu.

Mengenai kriteria calon wakil menlu, Menlu Wirayuda menjelaskan, selain seorang eselon I, dia juga pernah menjadi kepala perwakilan di luar negeri. Sedangkan mengenai siapa yang mengusulkan calonnya, sesuai ketentuan Perpres, Menlu berkewenangan mengusulkan dua nama kepada Presiden untuk dipilih salah satu.

Untuk mengisi jabatan perdana ini, di Deplu saat ini terdapat 12 orang, sedangkan di kantor perwakilan terdapat sekitar 100 orang calon yang memenuhi kriteria. "Yang dibutuhkan hanya satu orang. Saya perlu memilih wakil menlu itu dengan benar-benar cermat," kata Wirayuda.

Keputusan membuat jabatan baru ini

Bukan Hal Baru

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk jabatan Wakil Menteri Luar Negeri. Jabatan baru ini jadi polemik karena masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu yang tinggal setahun lagi.

sudah lebih dulu dikenal. Namun, karena baru pertama kali di negeri ini, masalah ini tak urung menjadi polemik. Pendapat publik terbelah dalam dua arus besar. Sebagian berpendapat jabatan wakil menlu sangat positif, sedangkan sebagian lagi berpendapat kebijakan ini tidak tepat waktu, bisa menimbulkan dualisme kepemimpinan di Deplu, pemborosan serta sekadar mau bagi-bagi jabatan.

Ketua F-PDIP DPR-RI Tjahjo Kumolo, Anggota Komisi I DPR dari F-PG Yuddy Chrissy, Sekjen PDI-P Pramono Anung, Anggota DPR dari F-PG Slamet Effendy Yusuf dan anggota DPR dari F-PDIP Andreas Pareira, adalah sebagian dari barisan politisi yang kurang setuju dengan jabatan wakil menlu ini. Mereka berpendapat, tidak perlu ada jabatan wakil menlu. Menurut mereka, jabatan itu akan menimbulkan masalah baru yakni dualisme kepemimpinan di Deplu, pemborosan, dan tidak tepat waktu mengingat masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu sekarang ini tidak lama lagi berakhir.

Berbeda dengan pendapat para politisi



Jabatan wakil menlu lazim ditemui di China, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa.

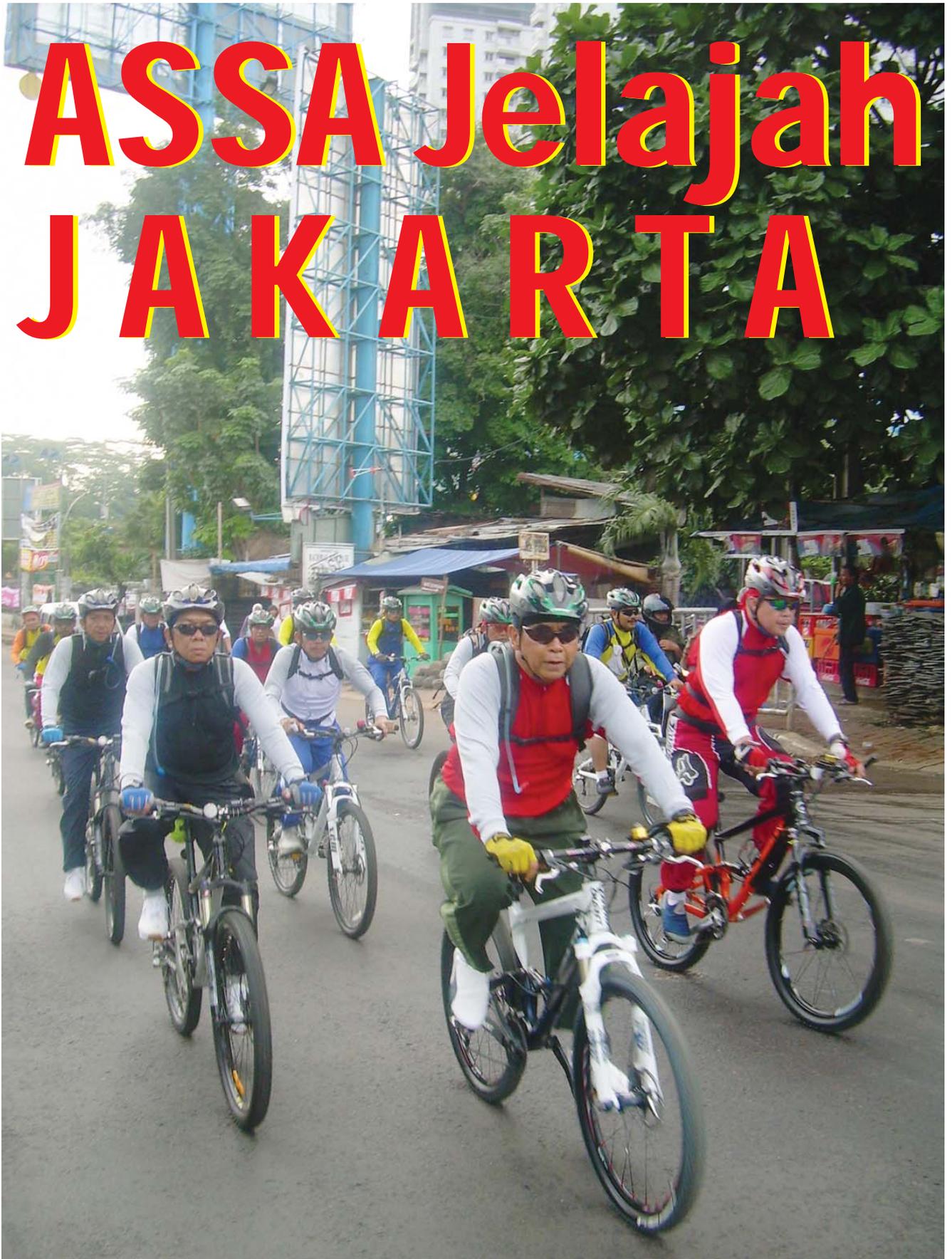
pendapat yang agak berbeda. Ia berpendapat, agar posisinya lebih kuat, sebaiknya posisi yang diisi bukan wakil menlu melainkan menteri muda luar negeri untuk lebih mengefektifkan kewenangannya di forum internasional.

Menanggapi perbedaan pendapat tersebut, Menlu Hassan Wirajuda menjelaskan, bahwa wakil menlu tidak akan tumpang tindih dengan Menlu sebab jabatan wakil menlu adalah jabatan struktural, bukan jabatan politik. Tugasnya adalah membantu Menlu dalam mengelola kepemimpinan di Deplu. Karena merupakan jabatan struktural, maka jabatan itu akan diisi oleh pegawai negeri. Idealnya juga dari pejabat senior di Deplu.

memang hak Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Namun mengingat masa pemerintahan kabinet sekarang yang hanya tinggal satu tahun lagi, bisa dimaklumi apabila ada yang kurang setuju.

Ketua Panitia Khusus RUU Kementerian Negara Agun Gunandjar Sudarsa mengingatkan, sebaiknya pemerintah membicarakan kebijakan ini lebih dulu secara menyeluruh, termasuk aturan hukumnya dalam pembahasan RUU Kementerian Negara. Sehingga, jangan nanti baru dibentuk tapi sudah hilang. Sekarang, efektif tidaknya jabatan wakil menlu yang baru ini, bisa dilihat dari kinerjanya dalam setahun ke depan. ■ MJ

ASSA Jelajah JAKARTA



Nyalakan Nyali Keliling Jawa-Madura

Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang memimpin langsung khafilah Al-Zaytun, yang tergabung dalam Asosiasi Sepeda Sport Al-Zaytun disingkat ASSA (bermakna nyali dan harapan) menjelajah jalanan Jakarta, Minggu 24 Februari 2008. Kegiatan ini merupakan *try-out* ketiga untuk menyalakan nyali ASSA yang berencana bersepeda keliling Jawa-Madura, 26 Mei - 10 Juni 2008.



Syaykh AS Panji Gumilang: Selain bisa mengurangi polusi, bersepeda juga menyehatkan raga dan jiwa

Tokoh pendidikan terpadu yang memimpin lembaga pendidikan Islam berskala global (Al-Zaytun), itu ikut terjun langsung sebagai peserta mengayuh kereta angin menjelajah jalanan Jakarta sepanjang 43 kilometer yang ditempuh selama dua jam tanpa henti. Sepanjang jalan, tokoh pembangun moral bangsa, berusia 62 tahun ini, tidak terlihat kecapekan hingga tiba kembali di finish. Bahkan seorang anggota polisi yang ikut serta dalam tim ASSA itu yang justru terengah, apalagi pada saat menyusuri jalan menanjak.

Syaykh Panji Gumilang dalam beberapa bulan terakhir memang sudah terlatih mengayuh sepeda 2 x 40 km setiap hari. Di tengah kesibukannya yang amat padat sebagai pemimpin Al-Zaytun, dia gencar merevitalisasi budaya naik sepeda, baik sebagai sarana transportasi maupun sebagai sarana olahraga. Menurut Syaykh, naik sepeda selain bisa mengurangi polusi yang diakibatkan kendaraan bermotor

juga menyehatkan raga dan jiwa yang pada gilirannya juga membangkitkan nyali.

Setiap orang sangat membutuhkan nyali yang kuat agar jangan pernah berputus asa. "Nyali yang kuat memungkinkan kita dapat menghargai dan membesarkan orang lain, sementara hati kita sendiri tetap penuh kerendahan. Bersepeda adalah salah satu cara membangun nyali," kata Syaykh Panji Gumilang. Dalam rangka membangun nyali yang kuat itu, Al-Zaytun berencana bersepeda keliling pulau Jawa-Madura.

Asosiasi Sepeda Sport Al-Zaytun atau ASSA yang pendiriannya baru diresmikan 1 Muharram 1429, pada 26 Mei-10 Juni 2008 ini merencanakan sebuah perjalanan keliling pulau Jawa-Madura dengan bersepeda. Perjalanan sekitar 2000 km itu diperkirakan diikuti oleh setidaknya 200 orang peserta, selain untuk memasyarakatkan penggunaan sepeda di semua kalangan masyarakat, ASSA akan melakukan pula kegiatan menanam pohon di



Ujicoba: Sebanyak 18 anggota ASSA Jelajah Jawa-Madura sedang bersepeda di ruas-ruas jalan raya protokol Jakarta dipimpin Syaykh AS Panji Gumilang

Syaykh Al-Zaytun menegaskan dengan nyali besar, siapa pun dan apa pun kedudukannya, menjadi dapat berkontribusi membangun negara dan bangsanya sesuai keahlian dan profesi yang ditekuni.

setiap kota di pulau Jawa yang disinggahi pada setiap momen istirahat.

Sesuai dengan makna kata ASSA, yang berarti nyali dan harapan, salah satu inti bersepeda keliling pulau Jawa-Madura ini tujuan utamanya adalah membangun nyali setiap diri peserta, maupun penikmat serta pemerhati olahraga sepeda.

Lewat sepeda, Al-Zaytun membangun nyali masyarakat supaya mereka tidak lemah nyali, dan jangan pula sekali-kali berputus asa. Caranya dimulai dengan memasyarakatkan sepeda. Menurut Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang, bersepeda adalah olahraga paling sehat yang dapat diikuti semua generasi mulai anak-anak, remaja, dewasa, hingga orangtua dan veteran. Dengan bersepeda, jantung sehat, saraf sehat, paru-paru sehat, otot sehat, demikian pula kerja genetika menjadi sempurna hanya dengan modal kecil sebuah sepeda.

Syaykh menegaskan, dengan nyali besar, siapa pun dan apa pun kedudukannya menjadi dapat berkontribusi membangun negara dan bangsanya sesuai keahlian dan profesi yang ditekuni. Orang yang bersepeda adalah orang yang tidak pernah berputus asa, walaupun dia tidak menggunakan bahan bakar minyak. Sebab bahan bakar sepedanya adalah

bagaimana kaki digerakkan, ditumpangkkan di pedal, kemudian masuk ke roda lalu roda berputar.

Ujicoba di Jakarta

Sebelum pembentukan nyali secara aktual dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan ujicoba bersepeda di berbagai tempat, termasuk keliling ruas-ruas jalan raya protokol Ibukota Jakarta, pada Minggu 24 Februari 2008 antara pukul 06.00-08.00 WIB. Jakarta dipilih yang kondisi jalan rayanya mendekati arena yang sesungguhnya di sekeliling pulau Jawa.

Peserta mengambil start dari Cirendeui, Jakarta Selatan melewati Pasar Jumat-Lebakbulus-Pondok Indah-Kyai Maja-Blok M-Sisingamangaraja-Sudirman-Thamrin-Monas.

Mereka kemudian kembali balik dengan mengambil rute Monas-Thamrin-Sudirman-Sisingamangaraja-Blok M-Kiyai Maja-Pondok Indah-Lebakbulus-Pasar Jumat hingga finish kembali ke Cirendeui.

Ujicoba diikuti 18 peserta yang akan menjadi peserta inti saat rombongan besar Al-Zaytun berkeliling pula Jawa, dipimpin langsung oleh Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang menempuh jarak sejauh 43 kilometer yang diselesaikan

selama sekitar dua jam. Jarak sejauh itu apabila ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor menghabiskan tiga liter bensin. Tetapi dengan bersepeda bahan bakarnya adalah sate kambing berikut sayur kangkung atau bayam serta makanan protein lainnya.

Ujicoba berlangsung dengan baik sebab seiring-sebangun dengan pola latihan selama ini yang sudah tertata rapi sejak 17 November 2007, yaitu dua kali setiap pagi bersepeda masing-masing selama dua jam berlangsung pukul 05.30-07.30 WIB, lalu diselingi istirahat setengah jam, kemudian dilanjutkan lagi pukul 08.00-10.00 WIB.

Dengan latihan teratur, pencapaian bersepeda keliling pulau Jawa-Madura sudah dianggap tercapai 75 persen. Apabila ditambah asupan makanan yang pas sebagai "bahan bakar", maka pencapaian sudah mendekati 90 persen. Sehingga, pada hari-H setiap peserta tinggal menambah ketelitian dan keyakinan diri supaya kesuksesan dapat tercapai hingga 100 persen.

Karenanya, menurut Syaikh Al-Zaytun, unsur ketelitian dan keyakinan diri kendati memberikan kontribusi 10 persen saja, perannya sangat menentukan sekali dalam meraih keberhasilan. Jalanan Jakarta yang licin dan mulus-mulus hingga bisa dikayuh dengan kecepatan maksimal 37,2 km perjam, untuk jarak 43 km ternyata harus ditempuh selama dua jam karena jalanan terhalang oleh banyak kendaraan yang lalu lalang.

Kondisi tersebut menyiratkan pesan, seandainya pemerintah serius menggalakkan supaya semua lapisan masyarakat dalam setiap bepergian menggunakan sepeda, maka pemerintah sudah seharusnya mendedikasikan setidaknya satu lajur di sisi kiri dan satu lajur lagi di sisi kanan jalan tol untuk penggunaan sepeda.

Jika demikian halnya, mengingat pengguna sepeda sehat di Jakarta sedemikian semangatnya, satu lajur khusus untuk sepeda itu diperkirakan akan dapat dimanfaatkan oleh satu juta pengguna setiap harinya. Dan bahan bakar untuk penggunaan sepeda itu tak perlu diatur

dengan kartu pintar untuk mengukur penggunaan bahan bakar minyaknya. Sebab "kartu pintar"-nya sepeda adalah bagaimana mulut mencari sate kambing.

Butuh Nyali Yang Kuat

Rute bersepeda keliling Jawa-Madura-Madura perginya mengambil *start* di kampus Al-Zaytun Indramayu memasuki Pantura sampai Surabaya keliling Madura, kembali lewat jalur selatan Jombang-Ngawi-Surakarta-Jogyakarta-Karanganyar - Bumi Ayu - ke arah Pantura kembali ke kampus Al-Zaytun, menempuh jarak 1.889 km selama 16 hari (160 jam mengayuh sepeda).

Al-Zaytun akan memberitahu dan berkoordinasi penuh dengan setiap Kepolisian Resort (Polres) di masing-masing kota. Al-Zaytun juga akan menanam aneka jenis pohon tanaman keras di setiap daerah yang disinggahi. Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan terpadu, dengan nyali besar yang dimiliki, berkomitmen untuk menanam pohon jenis apa saja yang dibutuhkan. ■ HT - CRS



Sehari-hari: Di kampus Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, aktivitas bersepeda menjadi keseharian hidup

foto: berindo/ws

Gaya Hidup Menga Kereta Angin Al-Za



**Bersepeda layaknya mengendarai kum
Baron Karl Von Drais (Heidelberg - Je
belasan jam di bengkel mekaniknya, m
untuk menunjang efisiensi kerjanya se
hutan Baden, yang membutuhkan sar
bermobilitas tinggi.**

Dia mengatakan manusia membutuhkan kuda (kendaraan) yang lebih molek agar hidup bisa lebih baik dan mampu menghargai waktu dengan mobilitas tinggi. Sejak itu, sepeda dan manusia menjadi sahabat karib yang tak terpisahkan oleh zaman.

Saat ini, setelah dua abad lebih bergulir, sepeda selain sebagai kendaraan yang mempermudah hidup manusia, juga hadir sebagai kebutuhan

olahraga. Saat mengayuh, aksi fisik membugarkan raga sekaligus menyehatkan jiwanya. Lalu, si pengayuhnya akan “terbang” ke dalam romantisme masa lalu. Sepeda telah menemani kita dari masa kecil, saat menjejak usia remaja, atau bahkan romantisme zaman bauhela saat si onthel lebih banyak ambil peranan ketimbang si roda empat.

Dalam catatan World Tour-trial Motor Journal, sampai tahun 1970 sepeda adalah kendaraan yang digunakan lebih

dari 725 juta pengendara di penjuru dunia. Lalu angka menukik tajam menjadi 270 juta pengendara di akhir era 90-an. Angka tersebut sangat mengejutkan ketika menyadari akhir era 90-an telah terjadi lonjakan penduduk di dunia.

Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang mengatakan, bersepeda adalah olahraga segala umur. “Dari anak-anak, remaja, sampai orang tua bisa menggunakan sepeda. Faktor kecepatan dan

ayuh yztun



hamparan waktu. Mulanya, (erman,1817) berkuat menciptakan sepeda sebagai kepala pengawas sarana transportasi

ketepatan mengayuh bisa disesuaikan dengan umur pengendaranya,” begitu kata Syaykh saat rehat setelah try out sepeda sehat menjelajah Jakarta Minggu pagi (24/02). Bersama 17 awak pendayuh lainnya, Syaykh AS Panji Gumilang bersepeda melintasi pagi hari Jakarta, sepanjang 43 km.

Jakarta dan sepeda bukan lagi karib yang baik. Prasarana untuk sepeda boleh dibilang tidak memadai. Jalan protokol, jalan perkotaan, perkantoran, pusat

belanja dan area publik lainnya belum banyak menyediakan fasilitas bagi pengendara sepeda.

Tapi, ada yang sangat berbeda jika kita melihat kenyataan Jakarta, tepatnya down town Jakarta di minggu pagi. Belasan pengendara dari beragam komunitas “kereta angin berkayuh” itu berarak di Jalan protokol Jakarta. Sekadar menyebut beberapa contoh, kawasan subur pengendara sepeda acap menyerbu kawasan Monas, Senayan, Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, Ragunan, Sunter, Kelapa Gading-Pulo Gadung, Kaman-doran-Cidodol, dan bahkan Kemayoran. Orang Jakarta bilang, sepeda mingguan.

Mereka bisa datang dari mana saja, dari beragam kalangan yang membetuk komunitas pecinta sepeda. Satu yang menjadi acuan bagi mereka adalah bersepeda sehat! Mereka seperti kijang di hamparan lapangan rumput hijau. Mengayuh. Berarak-arakan. Melesat. Dan membelah Jakarta tanpa halangan.

Begitupun dengan khafilah yang dimotori Syaykh AS Panji Gumilang. Melintas Jakarta bukan lagi perkara hanya ingin mengejar kemudahan jalan yang cenderung landai dan halus. Tanpa umbul-umbul dan emblem, pagi itu khafilah Mahad Al-Zaytun menjadi “warga” sepeda sehat di Jakarta. Mengambil *start* di kawasan Fatmawati Jakarta Selatan, menyusur Monas, lalu *finish* di Cireunde-Ciputat, di ujung Selatan Jakarta.

Khafilah berkelebat selama dua jam tanpa spot perhentian. Lalu sorenya kembali ke Al-Zaytun Indramayu. Lalu, untuk apa bersusah payah dari Al-Zaytun datang ke Jakarta dengan membopong sepeda jika di Indramayu dan kota sekitarnya justru lebih menantang dengan medannya yang berat?

Jika diibaratkan, program Keliling Jawa-Madura Asosiasi Sepeda Sport Al-Zaytun (ASSA) mulai 26 Mei-10 Juni 2008 mendatang adalah semacam “pertempuran”, maka sebelumnya sudah diupayakan latihan rutin dan sejumlah *try out* di sekitar Al-Zaytun dan kota/kawasan di sekitarnya. Melihat kondisi keliling Jawa yang tak hanya menyimpan medan berat secara fisik, maka Jakarta bisa diibaratkan lagi sebagai medan yang “landai dan halus” namun membutuhkan taktik khusus untuk menembusnya.

“Bukan berarti jalan halus yang hot mix bisa lebih santai dan asal main kebut,” kata Syaykh memberi saran.

Khafilah sepeda keliling Jawa nanti bukan hanya akan melintas jalan terjal, berliku, menanjak, dan curam menukik. Tempaan mental inilah yang disasar untuk mengalibrasi seluruh peserta nantinya. Jadi, apapun rupa medan dan hambatannya nanti, dengan *try out* di



Rehat: Syaykh AS Panji Gumilang bersama tim ASSA ditemui Pemred Berita Indonesia dan kru saat rehat selepas bersepeda

foto: berindo/ws

Bersepeda di Al-Zaytun bukanlah karnaval budaya saban akhir pekan. Di sana, dibiasakannya sepeda bagi santri, guru, karyawan dan eksponen telah menjadi kebutuhan sehari-hari.

Indramayu dan kota di sekitarnya itu, dan, dengan uji coba di Jakarta ini akan menjadi *holistic try out*. Kesemuanya memberi gambaran bersepeda termasuk olahraga yang membutuhkan mental yang kuat.

Sehat dan Ramah Lingkungan

Jakarta di minggu pagi mirip keseharian di sekitar Mahad Al-Zaytun. Saban minggu pagi, Jakarta adalah "hari raya" sepeda sehat. Di sana terjadi karnaval budaya gaya hidup sehat. Tua muda, beraneka jenis sepeda, dan dari beragam kalangan dan komunitas mengayuh bersama sedaya-upaya menyetatkan jiwa raga. Kemudahan fasilitas bersepeda di jalan protokol mulai pukul 6 sampai 9 pagi itu menjadi oase bagi pecinta sepeda sehat di Jakarta. Sedangkan di Mahad Al-Zaytun, bersepeda sehat bukan lagi sebagai jargon. Aktivitas bersepeda menjadi keseharian hidup di Al-Zaytun. Guru dan siswa dibiasakan mengendarai sepeda di lingkungan kampus.

Tersedia ruas jalan di setiap tepi jalan menjadi rancang khusus bagi pengendara sepeda di Al-Zaytun. Perlintasan itu mengambil ruas di jalan yang sama bagi pengendara roda empat. Lintasan sepeda mendapat *white strips* sekitar empat jengkal di tiap tepi jalan. Dengan dua ruas (di kiri-kanan) jalan itu, pengendara sepeda akan dengan mudah mengambil jalan masing-masing satu arah. Dengan jalan satu arah itu, pengendara sepeda akan mendapat hak yang sama dengan pejalan kaki, dan pengendara roda empat lainnya.

Para pejalan kaki bisa nyaman di trotoar sambil menghirup udara segar tanpa

diburu kendaraan lain. Begitupun keberadaan sepeda dan roda empat tak terkecuali wajib mentaati rambu lalu lintas dan "polisi" jalan raya di kawasan kampus. Sebuah pemandangan yang nyaman dan teratur.

Bersepeda di Al-Zaytun bukanlah karnaval budaya saban akhir pekan. Di sana, dibiasakannya sepeda bagi santri, guru, karyawan dan eksponen telah menjadi kebutuhan sehari-hari. Fasilitas parkir yang aman bagi sepeda juga tersedia di setiap wilayah gedung dan di setiap fasilitas parkir kendaraan lainnya.

Bahkan jika dibandingkan kendaraan roda empat seperti mobil para tamu atau bus karyawan, sepeda menjadi "raja" dan sangat populis keberadaannya di Al-Zaytun. Dengan memiliki sepeda menjadi salah satu kebutuhan *secure* di kampus terpadu itu.

Bila di Jakarta (pada umumnya) belum banyak menyediakan fasilitas untuk pengendara sepeda, maka di Al-Zaytun justru sudah mengembangkan sepeda sebagai gaya hidup keseharian. Mulanya berproses melalui peraturan tidak diperkenalkannya kendaraan bermotor masuk lingkungan kampus, lalu pada akhirnya menjadikan sepeda sebagai kebutuhan sehari-hari, dan tersosialisasikan dengan sendirinya. Kehidupan bersepeda menjadi subur, dan benar-benar mengakar sejak mula Al-Zaytun didirikan hingga sekarang. Lalu-lalang sepeda telah menjadi pemandangan yang harmonis.

Langkah yang patut diacungi jempol. Mahad Al-Zaytun sebagai lembaga keilmuan sudah memulai gaya hidup sehat dan ramah lingkungan, bahkan jauh sebelum isu pemanasan global menjadi

isu utama dunia. Bisa dibayangkan, berapa jumlah bahan bakar yang di-"tabung" dari aktivitas seluruh kegiatan Al-Zaytun.

Jalur Hijau

Seperti yang dikatakan Syaykh tadi, bersepeda adalah olahraga yang bisa dilakukan semua umur. Yang usia muda sudah pasti bisa melakukannya dengan baik. Dus, bagi yang berusia lanjut masih bisa melakukannya, jika masih sehat. Kendati bukan sekedar gowes-gowes, bersepeda membutuhkan teknik dan pencapaian mental yang baik pula.

Seusai bersepeda lintas Jakarta minggu pagi itu, Syaykh berbagi pengalaman seputar dunia persepedaan. Ada semacam penyadaran diri bagi pengendara untuk menjiwai arti mengayuh si roda dua tadi. Meski selintas lalu sepeda terkesan sederhana, nyatanya tidak semudah itu.

"Bersepeda itu tidak boleh sambil ngobrol," kata Syaykh memberi masukan. Jelas, bersepeda tidak bisa dipandang sebelah mata. Konsentrasi penuh diperlukan di sana. Selain itu, bersepeda juga mempunyai *attitude* yang khas dari jenis olahraga lainnya. Fisik yang kuat ditopang daya jelajah medan serta penguasaan kecepatan kayuh yang tepat.

Jelang sepeda sehat keliling Jawa-Madura mulai 26 Mei-10 Juni 2008, Mahad Al-Zaytun akan meneruskan try out semacam ini sebagai uji persiapan. Hajatan yang kelak akan menebarkan semangat berolahraga sepeda sehat, sambil terus mengakrabi alam dari jarak yang terdekat.

Sambil terus mengayuh sepeda keliling Jawa nanti, khafilah Mahad akan menebar bibit-bibit pohon untuk penghijauan lahan. Jika nanti khafilah akan menyusuri Jalan Pos Deandels sepanjang Utara Jawa, lalu pulang arah Selatan, maka bisa dibayangkan sejumlah kabupaten singgahan tadi akan menjadi "jejak hijau" di puluhan tahun mendatang. Bibit-bibit yang disebar di sejumlah kota singgahan itu akan menjadi pohon yang akan menjaga kesuburan tanah Jawa.

Bersepeda keliling Jawa Al-Zaytun (Asosiasi Sepeda Sehat Al-Zaytun) bukan sekadar terarah menyusur kenangan lama yang mengatakan Jawa adalah tanah yang subur. Menebar bibit pohon, justru ingin membuktikan bersepeda keliling Jawa ini tidak lain adalah ingin mengembalikan kedikjayaan tanah Jawa yang dulu dikatakan sebagai Jawadwifa, tanah Jawa yang subur.

Saat menciptakan mahakarya Von Drais, sang mekanis berhati mulia itu berharap kelak kendaraan sepeda kayu beroda dua yang diciptakannya itu bisa membuat hidup manusia lebih baik dan menghargai



Foto-foto: Dok. Al-Zaytun



SEARAH JARUM JAM, DARI ATAS:

Sepeda Syaykh Sepeda merk GIANT tipe Anthem Advanced yang digunakan Syaykh Al-Zaytun, AS Panji Gumilang.

Pencatat Kalori Stang sepeda tipe Race Face Next SL, 25.4 dilengkapi speedometer dan pencatat kalori yang terbakar tiap detik. Shock tipe Fox Float RP23. Shifters tipe Shimano Rapidfire.

Shimano Pelek, jari-jari, gir dan rantai tipe Shimano XTR. Ban tipe Michelin XCR Dry2 26x2.00.

Berkualitas Kerangka berbahan Formula One Composite, 3,5II Maestro Suspension dan engkol Shimano XTR, 22/32/44.

waktu. Von Drais telah merubah dunia dengan kendaraan kayu roda dua itu. Dan, kini, begitu banyak hal terbaik yang telah dilakukan dengan sebuah sepeda.

Rencana program mengayuh sepeda keliling Jawa Juli mendatang itu, Al-Zaytun akan menuntaskannya dengan penanaman bibit-bibit pohon. Sudah sehat jiwa raga, aksi penghijauan menjadi persembahan yang tak ternilai harganya bagi lingkungan. Bukan sekadar klangeenan naik sepeda keliling sambil mengenang romantisme tanah Jawa yang "Dwifa". Tapi, aksi nyata yang ingin membuktikan dengan sepeda manusia layak memperbaiki hidup lebih baik lagi. Sambil gowes-gowes keliling Jawa, khafilah Al-Zaytun menebar aksi sehat dan kecintaan terhadap lingkungan. Kelak, puluhan tahun mendatang, generasi berikutnya akan mendapat jejak hijau di sepanjang petilasan hijau saat pemberhentian para pendahulunya keliling Jawa.

Bisa dibayangkan, jika aksi sehat keliling Jawa ini diagendakan secara rutin setahun sekali, maka jejak hijau itu bukan lagi seperti napak tilas. Tapi, menjadi jalur hijau yang akan menjaga sepanjang Utara dan Selatan tanah Jawa ini. ■ CUS-CRS-TIMAL-ZAYTUN

Tour Jawa-Madura

"Membangun Jiwa Raga Bangsa untuk Indonesia Raya"

Menyambut seabad Hari Kebangkitan Nasional serta dalam rangka memperingati Hari Lahirnya Dasar dan Falsafah Negara (Pancasila), Hari Lingkungan Hidup Internasional dan Hari Anti Narkoba Internasional, serta memperingati hari lahirnya Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), dan untuk mengenal lebih dekat daerah-daerah di tanah air Indonesia tercinta, dalam hal ini Pulau Jawa

dan Madura, ASSA (Asosiasi Sepeda Sport Al-Zaytun) akan menyelenggarakan perjalanan sepeda sehat mengelilingi Pulau Jawa dan Madura dengan tema "Membangun Jiwa Raga Bangsa untuk Indonesia Raya".

Tour Jawa-Madura yang berjarak 2.000 km rencananya akan ditempuh selama 16 hari dimulai dari kampus Al-Zaytun-Losari-Batang-Semarang-Seluke-Gresik-Bangkalan-Sumenep-Sampang-Wonocolo-Nganjuk-

Sragen-Wates-Sumpiuh-Ketanggungan-Indramayu dan berakhir di Kampus Al-Zaytun.

Mempersiapkan perjalanan bersepeda yang akan dilaksanakan pada 26 Mei 2008 sampai dengan 10 Juni 2008, ASSA terus melakukan latihan-latihan intensif yang dibagi dalam lima tahapan yaitu Latihan Dasar II, Latihan Dasar I, Latihan Menengah II, Latihan Menengah I, dan Utama.

Untuk mengetahui ketahanan



Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang dan anggota ASSA berlatih di Lapangan Palagan Agung. (24 Januari 2008)

Foto-foto: Dok. Al-Zaytun



Try Out Kedua, menempuh jarak 49, 52 Km, melewati Bantarwaru, Sanca dan Bantarhuni. (Kamis 21 Februari 2008).

fisik yang telah didapat dari hasil latihan yang dilakukan, ASSA melakukan *try out* yang diikuti oleh seluruh anggota dari berbagai tingkatan latihan.

Try Out pertama diadakan pada Kamis 31 Januari 2008 menempuh

jarak 42 km. Dari kampus Al-Zaytun jam 06.00 WIB rombongan bergerak ke arah barat melewati Kec. Gantar, Kec. Gabus Wetan Kec. Haurgeulis dan tiba kembali di Al-Zaytun pukul 07.45 WIB.

Try Out Kedua dilaksanakan pada

Kamis tarikh 21 Februari 2008, dengan jarak tempuh 49,52 km. Berangkat dari Al-Zaytun pukul 07.20 WIB, dan tiba kembali pukul 09.47 WIB. *Start* dari Al-Zaytun menuju Haurkolot lalu ke arah Bantarwaru, Sanca, Bantarhuni, dan kembali ke Al-Zaytun. Sedangkan *Try Out* ketiga dilakukan di ibukota Jakarta.

Try Out Keempat dilaksanakan pada Kamis 13 Maret 2008, latihan yang bertema "Jelajah Wiralodra" menempuh jarak 145 km. Berangkat dari kampus Al-Zaytun pukul 05.50 WIB, melewati Kec. Gabus Wetan, Kec. Kroya, Kec. Kandang Haur.

Dalam Jelajah Wiralodra rombongan beristirahat di kantor Polres Indramayu jam 08.20 WIB diterima oleh Kapolres Indramayu, AKBP Drs. Syamsudin Janieb beserta staf, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Indramayu, Udjjiono SH. Setelah menanam sebanyak 50 bibit pohon mimba, sonokeling, salam, trembesi, guta perca, bintang dan laban di lingkungan Polres Indramayu. Jam 10.00 WIB,



Try Out Pertama, menempuh jarak 42 Km, diikuti 54 peserta ASSA. (Kamis 31 Januari 2008)



Try Out Keempat, diistilahkan "Jelajah Wiralodra", dari Al-Zaytun-Kota Indramayu. (Kamis 13 Maret 2008).



Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang, dan tim ASSA, foto bersama dengan Kapolres Indramayu AKBP Drs. Syamsudin Janieb beserta staf, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu, Udjijono SH, saat *Try Out Keempat*.

rombongan melanjutkan perjalanan, melewati Plumbon-Widasari-Lohbener-Trisi-Cikedung-Tanjungkerta-Sukaslamet dan tiba di Al-Zaytun pukul 13.00 WIB.

Try Out Kelima dilaksanakan pada Sabtu 5 April 2008 di wilayah Kab. Pandeglang dan Kab. Serang, Banten. Latihan yang bertema "Nyambung Saderek" ini menempuh jarak 122 km.

Jam 05.30 dari hotel Paranti Pandeglang, sirine tiga buah motor pengawal dari kepolisian Pandeglang memecah kesunyian kota, mengawal dan mengiringi barisan pesepeda berseragam hijau dengan lengan panjang berwarna hitam. Peserta "Nyambung Saderek" berbaris rapi menyongsong matahari terbit menelusuri bukit berliku sepanjang Saketi dan Menes. Pada etape pertama, setelah menempuh jarak 40 km, seluruh peserta beristirahat



Foto bersama di sudut Kota Anyer yang penuh dengan pepohonan (5 April 2008).



Peserta *Try Out* Kelima, yang diberi nama "Sambung Saderek" saat melintas di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. (5 April 2008).

di SPBU Carita. Setelah beristirahat selama 30 menit dan melakukan pemanasan, peserta melanjutkan etape kedua.

Indahnya riak ombak dan tiupan angin laut yang semilir sepanjang perjalanan pada etape ini seakan memberikan pijatan-pijatan halus di sekujur tubuh dan mata sehingga tak terasa 40 km jalur Carita-Karangbolong-Cinangka dapat ditempuh tanpa rasa lelah.

Ketangguhan peserta mulai diuji pada etape ketiga. Tatkala memasuki Cinangka, jalan mulai menanjak, sepeda hanya dapat dikayuh dengan kecepatan 5-8 km/jam. Jalan yang terus menanjak memaksa peserta untuk mengeluarkan tenaga ekstra



Syakh AS Panji Gumilang menikmati istirahatnya di hutan Ciomas Banten setelah menempuh perjalanan sepeda sepanjang 119 km. (5 April 2008)



"Nyambung Saderek" beristirahat di bawah pepohonan dengan leluasa menghirup "oksigen yang masih murni". (5 April 2008)

agar dapat terus mengayuh sepeda, peserta juga harus dapat menjaga keseimbangan tubuh agar tidak terjatuh.

Memasuki Padarincang, Ciomas, jalan yang rusak dan berkerikil serta panas yang menyengat, menambah beban otot-otot kaki untuk terus mendaki. Pada detik-detik itu, otot-otot kaki terasa tak mampu lagi digerakan, napas tersengal seakan sulit dihembuskan kembali, akan tetapi berbekal janji atlet yang "pantang menyerah", semua peserta termasuk dua peserta puteri

Shofiyah Al-Widad (mahasiswi Universitas Al-Zaytun) dan Usth Kokom Komariah (Mudarisah Al-Zaytun) mampu menyelesaikan semua etape dengan selamat serta sampai kembali di hotel Paranti Pandeglang jam 13.30 WIB.

Setelah lelah mengayuh sepeda selama enam jam, dari hotel Paranti, menggunakan tiga buah mobil Panther, satu buah Defender serta satu buah mobil ambulan, peserta kembali ke Menes untuk menghadiri resepsi pernikahan puteri H. Shaleh Asad, sahabat Syaikh Al-Zaytun. Diiringi lagu-lagu nostalgia peserta menikmati hidangan makan siang, raut wajah peserta mulai bersinar kembali karena kalori yang habis terbakar tatkala mengayuh sepeda mulai terganti. Bahkan Usth Kokom Komariah sempat mengalunkan suara merdunya



Jalan mendaki dari Cinangka-Ciomas yang dilalui peserta "Nyambung Saderek" cukup menguras tenaga dan memaksa otot-otot kaki untuk bekerja lebih keras. (5 April 2008)



Usth Kokom Komariah mengalunkan suara merdunya dengan menyanyikan lagu berjudul "Es Lilin". (5 April 2008)



Menikmati hidangan makan siang, "Nyambung Saderek" saat menghadiri resepsi pernikahan puteri Bp. Shaleh Asad sahabat Syaikh Al-Zaytun di Menes, Banten. (5 April 2008)



Syaikh Al-Zaytun sedang memperhatikan pohon kilaban (pohon kebanggaan masyarakat Banten) yang baru saja ditanam di halaman depan Perguruan Mathla'ul Anwar Pusat, Menes. (5 April 2008)

dengan menyanyikan lagu berjudul "Es Lilin".

Usai menikmati makan siang, "Nyambung Saderek" diakhiri dengan menanam dua pohon kilaban sebagai kebanggaan masyarakat Banten, empat pohon jati dan dua pohon salam sebagai lambang kedamaian sejati di Perguruan Mathla'ul Anwar Pusat, Menes.

Diharapkan dengan disiplin, berani, jujur, hemat, cerdas, sportif, toleran, menjunjung tinggi persaudaraan demi perdamaian, membela kemanusiaan dan pantang menyerah tour Jawa-Madura dapat terlaksana sesuai rencana, mampu membangun jiwa-raga bangsa Indonesia dan dapat memayungi Indonesia dengan payung pepohonan. ■ **TIM AL-ZAYTUN**

Ancaman Resesi Global



Masyarakat antri minyak tanah di tengah mahalanya bahan pangan

Melemahnya perekonomian dunia, lonjakan harga minyak mentah dan berbagai komoditas, merisaukan negeri ini. Melihat belum ada tanda-tanda perbaikan, bangsa ini harus bersiap menghadapi kemungkinan yang lebih buruk.

Melemahnya perekonomian dunia membuat sebagian investor luar negeri dikabarkan mulai menarik modalnya dari Indonesia. Padahal, kini nyaris tak ada lagi sektor ekonomi di negeri ini yang tertutup untuk pihak asing.

Akibat penarikan modal oleh investor asing itu, perekonomian nasional pun mulai terasah goyang. Inilah salah satu dampak negatif, dari sistem perekonomian yang sangat terbuka sebagaimana dianut Indonesia selama ini. Karena setiap ada dinamika barang dan jasa di pasar global, langsung mempengaruhi perekonomian nasional.

Situasi ekonomi global itu sangat besar dipengaruhi memburuknya ekonomi Amerika Serikat yang dipicu oleh kasus subprime mortgage (krisis kredit macet perumahan) di negara itu. Melambatnya ekonomi AS yang juga telah diikuti negara-negara maju lain itu

berdampak pada pekonomian Indonesia melalui perdagangan (trade channel) dan arus modal (capital flows channel). Sehingga, melemahnya perekonomian global itu telah menurunkan minat investor global terhadap aset-aset negara berkembang seperti Indonesia. Dampak selanjutnya arus modal masuk pun menurun sehingga rupiah melemah.

Kabar tidak enak lagi, perekonomian AS yang merupakan perekonomian terbesar di dunia itu sampai pertengahan Maret, masih terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda bakal berakhir. Bahkan menurut kabar terakhir, sebagaimana dilansir oleh berbagai media, krisis itu bahkan sudah merembet ke industri asuransi, sistem perbankan, dan keuangan secara keseluruhan.

Di samping melemahnya ekonomi global, pengaruh lonjakan harga minyak mentah dunia sudah lebih dulu menggoyang perekonomian nasional. Setiap kenaikan harga

minyak mentah dunia akan langsung membengkakkan beban pemerintah karena harus menanggulangi subsidi BBM. Dengan harga minyak di atas US\$100/barel seperti sekarang ini, subsidi BBM diperkirakan telah membengkak jadi sekitar Rp250 triliun dari sebelumnya sekitar Rp170-an triliun.

Saling terkait dengan dua masalah di atas, harga berbagai komoditas pangan di pasar dunia juga mengalami lonjakan belakangan ini. Lonjakan ini juga cukup menggoyang perekonomian nasional, karena walaupun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, tapi kenyataannya, negara yang penduduknya mayoritas petani ini harus mengandalkan impor untuk memenuhi bahan pangannya. Dan inti dari telaknya dampak ekonomi global terhadap negara ini adalah karena lemahnya struktur ekonomi yang menyangkut bahan-bahan pokok pangan.

Masyarakat, terutama kalangan bawah, kini sudah mulai merasakan dampak dari gejolak harga dan kondisi ekonomi global ini. Selain daya beli yang merosot tajam, baik karena penurunan pendapatan secara nominal maupun akibat melonjaknya harga pangan

dan barang-barang kebutuhan pokok lain, konsumen dan berbagai sektor dalam perekonomian juga dipaksa mengurangi konsumsi. Masyarakat mulai merasakan memburuknya kualitas kehidupan mereka, seperti akses ke pemenuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan hancurnya infrastruktur dasar. Ancaman lebih lanjut, dikhawatirkan, lapangan kerja dan sumber kehidupan seperti usaha kecil dan menengah pun akan guncang bahkan dikhawatirkan terancam mati.

Indikator makroekonomi Indonesia era pemerintahan sekarang memang diakui telah berhasil membuat kemajuan. Namun, kemajuan yang sudah dicapai belum banyak bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat terutama kalangan bawah karena masih belum ada perbaikan signifikan dalam penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Menyadari kondisi yang dikhawatirkan bisa menimbulkan krisis ekonomi itu, pemerintah telah membuat beberapa langkah antisipasi, di antaranya melakukan penghematan dengan memangkas anggaran di berbagai instansi pemerintah. Di samping itu, pemerintah pun sudah merevisi RAPBN 2008. Pertumbuhan dipangkas jadi 6,4%, asumsi harga minyak US\$83 per barel, dan inflasi 6,5%. Target ekspor pun diturunkan dari 12,7% menjadi 10,5%, target investasi dipangkas menjadi 12,3% dari rencana semula 15,5%.

Namun, ke depan, situasi global masih sulit diprediksi. Beberapa pengamat menyarankan agar pembenahan segera dilakukan di dalam negeri. Untuk itu, pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, diharapkan bisa saling mendukung, mengambil prakarsa di depan, dan berkontribusi guna membawa perekonomian bangsa terhindar dari ancaman krisis. ■ MS

Setiap kali nama Boediono disebut-sebut, aroma harum merebak ke mana-mana. Saat didapuk menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, Boediono tidak mendapat hambatan berarti. Berbagai pendapat positif tentangnya mengemuka. Begitu pula saat namanya mencuat sebagai calon tunggal yang diusulkan Presiden menggantikan Burhanuddin Abdullah sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Ia dinilai berhasil menekan inflasi dari 17 persen-buntut kenaikan drastis harga minyak di dalam negeri-hingga kini tinggal kurang dari separuhnya, setelah ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Perekonomian oleh Presiden Yudhoyono pada akhir 2005. Ia dikenal "keras kepala" menerapkan kebijakan disiplin anggaran demi menciptakan stabilitas perekonomian, kendati kritik terus mengempurnya - termasuk dari Wakil Presiden - yang menilai gerakannya terlalu lamban.

Di masa pemerintah Megawati Soekarnoputri, Boediono selaku Menteri Keuangan berhasil memulihkan ekonomi yang sempat amburadul, warisan pemerintah pendahulunya. Tingkat inflasi

gugus tugas guna mengawal kebijakan BI supaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk jangka panjang, Boediono akan menyusun landasan hukum dan protokol rinci untuk mengambil kebijakan moneter, perbankan, dan fiskal dalam situasi krisis. Untuk mengendalikan inflasi, koordinasi dengan instansi di daerah akan ditingkatkan. Sebab, sumber inflasi sebenarnya berasal dari daerah. Sementara untuk tataran internasional, lanjut dia, BI harus meningkatkan koordinasi dan kemampuan diplomasi dengan bank sentral lain.

Di bidang perbankan, Boediono akan mengembangkan perbankan syariah dan pembiayaan usaha kecil. Secara umum

Disukai Pasar

Boediono dianggap figur terbaik untuk memimpin Bank Indonesia (BI) di tengah gejolak global sekarang ini.

dapat diturunkan dari kisaran 13 persen menjadi 5 persen. Rupiah menjadi lebih bertenaga dan fondasi pertumbuhan ekonomi pun mulai terbangun ajek. Berkat prestasi itu, ekonom senior yang dijuluki Burung Pemangsa Inflasi ini, lima tahun lalu dinobatkan majalah Business Week sebagai satu dari 25 orang paling berpengaruh di Asia.

Melihat semua fakta itu, DPR tidak mempunyai alasan untuk menolak Boediono. Dalam pemungutan suara (7/4), dari 46 anggota Komisi Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hadir, sebanyak 45 anggota menerima sementara satu orang menolak. Dalam uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung selama enam jam 30 menit dari pukul 10.00-16.30 WIB guru besar ekonomi UGM itu dicecar 20 pertanyaan diantaranya BLBI, komitmen pengembangan UKM, sampai mempertanyakan komitmen mempertahankan kesederhanaan.

Dalam presentasinya, Boediono menyatakan dalam jangka pendek akan mengembalikan semangat kerja BI yang turun karena berbagai kasus yang terjadi. Meskipun memakan waktu, kata dia, tapi tidak akan terlalu lama. Langkah kedua yang akan dilakukan adalah membentuk

visi Boediono untuk mengembangkan BI ialah memperkuat fungsi BI menjaga stabilitas ekonomi untuk memperkuat fondasi pembangunan. Tetap menjaga independensi BI dan memperkuat hubungan dengan pemerintah. Memperkuat *Good Governance* baik internal maupun eksternal.

Keputusan Komisi XI DPR memilih Menteri Koordinator Perekonomian Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2008- 2013 ditanggapi beragam. Pengamat Ekonomi Kwik Kian Gie berpendapat, kapabilitas Boediono tak terlampaui mengesankan. "Boediono adalah orang biasa yang tidak mempunyai pemikiran dan arah kebijakan yang jelas," tutur mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas era Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

Kwik menilai, Boediono yang jadi Menteri Keuangan era Presiden Megawati tidak memahami sektor riil. "Boediono tidak tahu pola pikiran orang berdagang," ujar Kwik tentang Boediono terkait soal Bantuan Likuiditas BI. Menurut Kwik, yang dibutuhkan BI adalah orang-orang muda, yang tidak hanya mengerti urusan teknis, tetapi juga mampu menciptakan



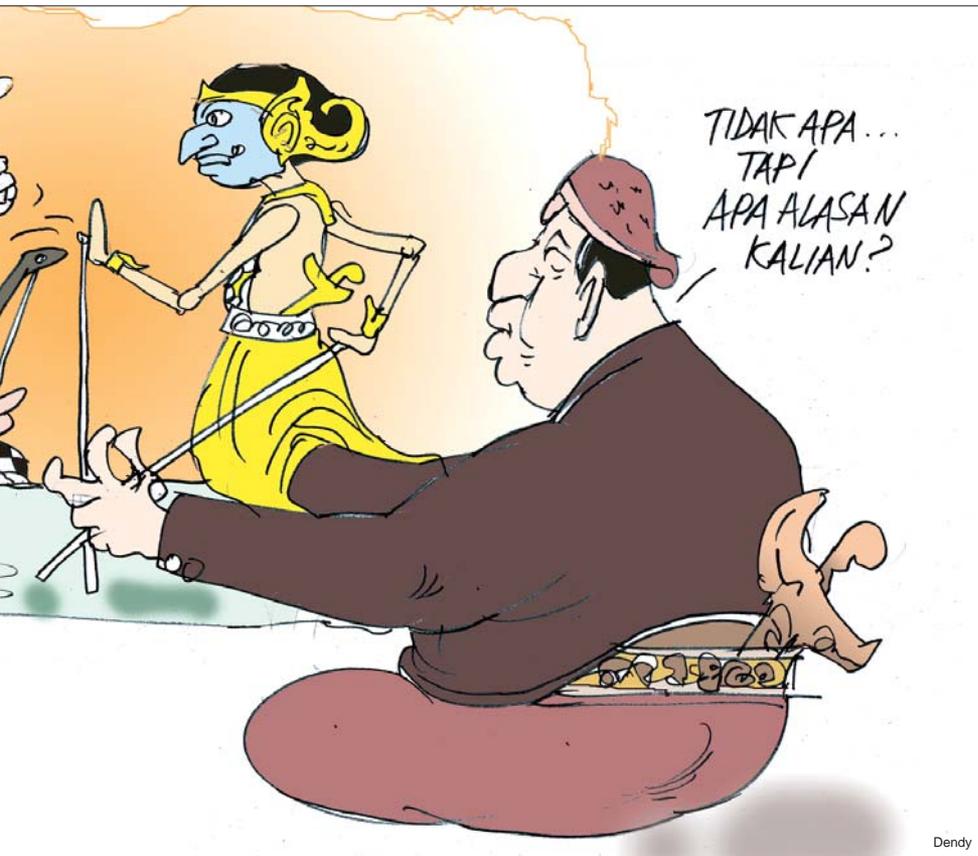
navigasi kebijakan.

Pendapat senada juga datang dari anggota komisi perbankan dari PAN, Dradjad Wibowo yang menjadi satu-satunya anggota dewan yang menolak Boediono. Ia tidak setuju dengan pilihan kebijakan Boediono dalam masalah fiskal dan moneter. Alasan kedua, tidak memperoleh klarifikasi yang tuntas masalah BLBI. "Hukum terlihat pilih kasih, tiga koleganya di hukum, kalau Boediono tidak bersalah seharusnya yang lain juga tidak," ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berpendapat lain. Menurut Sofjan, Boediono figur yang paling tepat menjadi Gubernur BI, karena memenuhi sejumlah kualifikasi kunci, yaitu pengalaman, kredibilitas, diterima berbagai pihak, menguasai masalah moneter, fiskal, dan kondisi riil ekonomi. "Yang kita cari kan memang bukan malaikat, pasti punya kekurangan. Tetapi, di tengah gejolak global sekarang ini, dia adalah yang terbaik," ujar Sofjan.

Akhir Konflik

Terpilihnya Boediono menjadi Gubernur BI, otomatis menutup cerita konflik antara eksekutif dan legislatif yang sempat ramai diberitakan berbagai media. Konflik ini berawal semenjak pemerintah mengajukan dua nama calon



Dendy

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo (Dirut Bank Mandiri Tbk) dan Raden Pardede (Wakil Dirut PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA) ke DPR (15/2). Sebagian anggota DPR mempertanyakan alasan Presiden memilih ke dua orang itu. Sebagian lagi menginginkan agar calon yang diajukan berasal dari internal BI. Perdebatan demi perdebatan mengemuka yang semakin menunjukkan hubungan dua pilar negara ini sedang kurang harmonis.

DPR kontan mengirim sinyal menolak dua nama yang diajukan oleh Presiden sebelum dilakukan *fit and proper test*. Keputusan finalnya pun tetap sama setelah *fit and proper test* dilakukan. DPR tetap menolak dua calon ini (12/3) lewat pemungutan suara (voting). Hasil voting cukup mengejutkan mengingat Agus, yang semula dijagokan unggul karena didukung Partai Golkar dan Partai Demokrat, ternyata hanya memperoleh 21 suara. Sementara itu, opsi menolak semua calon, mendapatkan 29 suara. Adapun Raden Pardede tidak mendapat satu suara pun. Rapat paripurna yang digelar seminggu kemudian menyatakan penolakan Komisi XI terhadap dua calon gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Raden Pardede merupakan keputusan bijaksana.

Para politikus di parlemen kemudian ramai-ramai bersuara menyatakan bahwa

DPR sudah mengambil langkah yang tepat. Anggota Komisi XI dari PDI-P, Maruarar Sirait, mengatakan, solidnya kubu yang menolak merupakan indikasi bahwa tidak ada politik uang dalam proses pemilihan Gubernur BI kali ini. Pertimbangan menolak calon Gubernur BI yang diajukan Presiden tidak hanya didasarkan atas dasar kompetensi, tetapi juga merupakan keputusan politik.

Anggota Komisi XI dari PKB, Misbah Hidayat, mengatakan, posisi Gubernur BI merupakan posisi politik. Jadi, sudah seharusnya pertimbangannya juga didasarkan pada pertimbangan politik. Secara kebetulan, kata dia, kompetensi Agus dan Pardede kurang memadai sebagai Gubernur BI. Agus andal di perbankan, tetapi kurang ahli di sektor moneter dan ekonomi makro. Sementara itu, Raden Pardede ahli di bidang moneter dan ekonomi makro, tetapi belum memiliki pengalaman kepemimpinan yang memadai di institusi besar.

Sedangkan anggota Komisi XI dari PAN, Dradjad Wibowo, secara halus mengatakan, sejumlah fraksi menolak dengan tujuan menjaga wibawa partai. Partai-partai yang menolak memberi pesan kepada Presiden agar mendengar aspirasi masyarakat sebelum menetapkan calon Gubernur BI. Saat menetapkan Agus dan Pardede sebagai calon Gubernur BI, banyak pihak mengatakan bahwa

Presiden sebenarnya menginginkan Agus Martowardojo yang terpilih. Kabar yang beredar menyebut-nyebut Agus Martowardojo sebagai bankir kesayangan Presiden. Sementara penyertaan Pardede hanya dianggap sebagai pelengkap. Ini terbukti karena dalam pemungutan suara, Pardede tidak mendapat satu suara pun.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Akbar Tandjung berpendapat lebih terbuka dengan mengatakan penolakan DPR itu tidak lepas dua dimensi. Penolakan DPR secara formal berkaitan dengan dimensi teknis. Dua kandidat tersebut kurang memadai dari sisi kemampuan teknis sebagai gubernur BI, semisal kemampuan dalam melihat permasalahan moneter, bagaimana menciptakan nilai rupiah yang bisa lebih stabil, atau juga pengendalian inflasi.

Tapi bukan tidak mungkin juga ada dimensi politik. Sebab, kedudukan Gubernur BI itu kedudukan yang mempunyai nuansa politik. "Apalagi yang melakukan *fit and proper test* para anggota DPR yang pada umumnya mereka adalah para pelaku politik," kata Akbar seperti dikutip Kompas.com.

Sudah menjadi rahasia umum, posisi tertinggi dalam BI sejak lama menjadi incaran partai politik. Sebab dia merupakan pemimpin lembaga yang "sangat" independen. Undang-Undang No. 3/2004 tentang BI (UU BI), yang berlaku saat ini, menjamin lembaga BI tidak tersentuh pemerintah, terlebih dalam kebijakan pengelolaan moneter. Itu berarti urusan *cash flow* BI sepenuhnya menjadi kebijakan gubernur dan Dewan Gubernur. Aliran dana BI ke anggota DPR merupakan salah satu contoh begitu luasnya kewenangan Gubernur BI bersama para pembantunya.

Tingginya gaji Gubernur BI dan Dewan Gubernur BI yang melebihi gaji presiden, wakil presiden, dan para menteri juga merupakan contoh lain betapa mereka "superpower" dalam menentukan urusan rumah tangga BI. Karena itu, bisa dipastikan, siapa pun pasti tergiur menjadi Gubernur BI atau "orang dekatnya". Suara penolakan dari sebagian partai politik di DPR dapat dibaca sebagai upaya *bargaining* (tawar menawar) mereka terhadap calon dari pemerintah.

Presiden kemudian mengajukan calon tunggal, Boediono, yang akhirnya diterima dan dianggap DPR sebagai sosok yang cocok menjadi Gubernur BI. Soal siapa yang akan menggantikan posisi Boediono yang sebelumnya menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, masih menjadi perdebatan. Sejumlah partai pendukung pemerintah memperebutkan kursi kosong itu. ■ RIE

Kemunduran atau Kemajuan?

Akses informasi melalui internet di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara lain. Namun upaya Menkominfo mengawasi jaringan dan pengguna internet, serta memblokir situs-situs negatif, bisa menjadi sebuah kemunduran.

Selamat yeee pemerintah *suit suit*, kami mengucapkan selamat atas disahkannya UU ITE dan pornografi. Dengan ini kami menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pemerintah. Buktikan UU ini dibuat bukan untuk menutupi kebodohan pemerintah. Cihuyyyyyyyyyyy.

Kata ejekan ini menyisip di halaman depan situs Depkominfo yang dijebol oleh *hacker* sebagai aksi protes atas disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di DPR (25/3).

Aksi protes dan perlawanan terhadap UU ITE ini merupakan wujud dari kekhawatiran sebagian pengguna internet bahwa pemerintah akan menggunakan undang-undang ini untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat di area publik. Sejumlah *blogger* yang rutin menulis opini dan kritik menyatakan keprihatinannya. Mereka khawatir bisa dipenjara cuma karena beropini, sama seperti pada era Orde Baru.

Kekhawatiran ini cukup beralasan sebab Menkominfo tidak merinci secara jelas yang dimaksud dengan situs-situs negatif. Apakah blog atau lalu-lintas *e-mail* melalui *mailing list* yang mengkritik perilaku pemerintah juga masuk dalam kategori negatif? Mereka kemudian mencurigai pasal ini sengaja digolkan politikus antikritik yang tak mau diawasi masyarakat.

Tidaklah mengherankan kalau Menkominfo kemudian dicap sedang kembali ke era Departemen Penerangan ala Orde Baru. Dengan UU ITE ini, Menkominfo sedang mempersiapkan diri untuk menjadi polisi, memeriksa dan mengawasi jaringan dan pengguna internet. Ini dinilai sebuah kemunduran karena pemerintah berlaku seperti pemerintah komunis yang dengan tangan besi mengendalikan rakyat banyak. Pada praktiknya, China melakukan sensor dengan "mengintip" *router backbone* nasional-nya dan ini akan

dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengaku sebagai negara demokrasi.

Depkominfo juga dianggap tidak memiliki pekerjaan lain sehingga harus melakukan penyensoran atas akses internet Indonesia yang masih harus tumbuh dengan jumlah pengguna yang cuma sekitar 25 juta orang. Padahal masyarakat bangsa yang berbasis informasi berkembang karena kemudahan akses, luasnya jaringan, serta kualitas akses yang cepat dan memadai. Perkembangan internet sudah sangat tertinggal dengan negara lain, kemudahan aksesnya malah dibatasi.

Sikap skeptis datang dari pengamat budaya massa Veven Sp. Wardhana. Menurut Veven, rencana pemerintah memblokir situs-situs berkonten negatif seperti pornografi dan kekerasan yang diakses lewat internet dinilai tak akan efektif. Sebab internet memiliki akses tak terbatas sehingga akan sangat sulit dibatasi. "Begitu membatasi pornografi, misalnya, *content* lain pasti akan terbatai," ucapnya kepada Tempo. Kalaupun harus ada pembatasan, ia meneruskan, dapat dilakukan dari *provider* internet di Indonesia, bukan dari situs-situs. Tapi, jika pembatasan di *provider* Indonesia dilakukan, terjadilah pembatasan arus informasi. Nah, solusinya, "Ya, nggak usah ada peraturan."

Apa yang dikatakan oleh Veven soal pembatasan arus informasi terwujud juga. Pemerintah mulai 'memanfaatkan' UU ITE dengan menginstruksikan 146 ISP (Internet Service Provider) dan 30 NAP



Bebas Diperjualbelikan: Situs porno akan diblokir, lalu

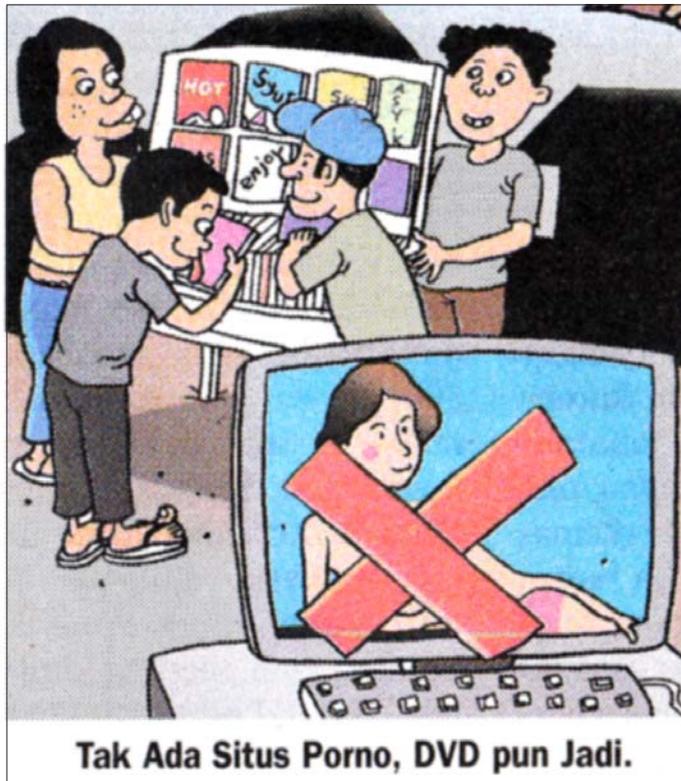
(network access provider) untuk memblokir situs-situs yang memuat film Fitna awal April lalu. Tindakan drastis ini diambil karena Google tidak inginkannya permintaan pemerintah untuk menghapus video Fitna dari situs-situsnya. Selain YouTube milik Google, situs-situs seperti MySpace, Metacafe, Multipliy, dan Rapidshare tidak bisa diakses oleh pengunjung selama kurang lebih seminggu.

'Aksi' pemerintah lewat surat edaran bernomor 84/M.KOMINFO/04/08 yang dikeluarkan oleh Menkominfo Muhammad Nuh itu mendapat kecaman keras dari sebagian masyarakat. Rektor Institut Teknologi Bandung Prof Dr Djoko Santoso menilai tindakan pemerintah memblokir situs YouTube dan situs lainnya merugikan dunia pendidikan. "Itu ibarat membunuh tikus dengan bom nuklir," katanya untuk memberi gambaran bahwa aksi pemerintah itu sangat berlebihan.

Komentar 'menyentil' datang dari Koran Tempo (27 Maret 2008). Dalam

Fakta

Sebanyak 12 persen situs di dunia ini mengandung pornografi; sekitar 372 juta halaman website pornografi; 25 persen yang dicari melalui *search engine* adalah pornografi. Sebanyak 35 persen dari data yang diunduh adalah pornografi; setiap detik 28.258 pengguna internet melihat pornografi; setiap hari 266 situs porno baru muncul; 70 persen *traffic* pornografi terjadi pada jam kerja, yaitu pukul 09.00-17.00. Sejumlah negara seperti Cina dan Kanada telah memblokir situs-situs porno itu.



Tak Ada Situs Porno, DVD pun Jadi.

...alu bagaimana dengan DVD porno yang tetap bebas diperjualbelikan?

kolom Portal di halaman satu terdapat gambar dan pesan, 'Tak Ada Situs Porno, DVD Pun jadi'. Gambar dan pesan itu hendak menunjukkan upaya pemerintah bekerjasama dengan kepolisian memblokir situs porno akan percuma dan terlihat kurang kerjaan sebab kenyataannya DVD porno tetap merajalela di mana-mana.

Di sisi lain, pemblokiran situs-situs porno memang mendapat sambutan baik dari hampir semua kalangan. Berdasarkan UU ITE, orang yang dengan sengaja membuat dan menyebarkan situs dan gambar porno akan didenda Rp 1 miliar dan pidana penjara paling lama enam tahun. Rencananya, soal situs porno dan ketentuan lain akan diatur lebih teknis di peraturan menteri atau peraturan pemerintah (PP).

Selain pornografi, UU ITE itu juga mengatur tentang keamanan transaksi elektronik. Dalam transaksi elektronik, dilarang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. *Hacker* atau *cracker* yang memasuki komputer orang lain, juga bakal kena sanksi. Itulah sebabnya, praktisi dan pelaku bisnis TI menyambut positif kelahiran UU ITE tersebut.

Dua Pendekatan

Lalu bagaimana caranya pemerintah memblokir situs porno di dunia yang kini sudah mencapai sekitar 4.200.000 situs dan 100.000 situs porno Indonesia di internet? Belum lagi memblokir 266 situs

porno yang lahir setiap hari? Ini sebuah pekerjaan yang hampir mustahil dilakukan dan membutuhkan banyak waktu dan energi. Sanggupkah Depkominfo melakukannya?

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh, ada dua pendekatan yang akan dilakukan. Pertama, *bottom-up*, mengandalkan kesadaran individu untuk melakukan sensor sendiri (*self censorship*). Situs porno itu tak memberi manfaat, jadi seharusnya bisa disensor sendiri. Pendekatan kedua bersifat *top-down*. *Internet service provider* (ISP) atau penyedia jasa internet, dipasang filter-filter untuk memblokir situs porno. Karena sudah tak ada kesempatan, maka meskipun masih ada niat untuk mengaksesnya, tetap saja tak akan bisa. Pada level tengah, seperti sekolah, kampus, atau kantor-kantor, akan dipasang *software* khusus. *Software* tersebut dapat diunduh di situs Depkominfo. Bila program pembersihan yang akan dilakukan mulai April berjalan, kelak para pengakses situs porno akan mendapat situsnya berubah konten. "Nanti bisa berisi informasi harga padi atau ikan," kata Nuh.

Terlepas dari adanya perbedaan persepsi di berbagai kalangan, kehadiran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah merupakan keharusan. Undang-Undang tersebut akan memayungi masyarakat dalam memasuki era baru, yaitu dunia *e-culture*. ■ **LOR**

KETENTUAN

Pasal 27

Denda Rp 1 miliar dan enam tahun penjara bagi orang yang membuat, mendistribusikan, mentransmisikan, materi yang melanggar kesuciaan, judi, menghina dan mencemari nama baik, memeras dan mengancam.

Pasal 28

Denda Rp 1 miliar dan enam tahun penjara bagi orang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sehingga merugikan konsumen transaksi elektronik dan menimbulkan kebencian dan permusuhan antarkelompok.

Pasal 30

Denda Rp 600-800 juta dan penjara 6-8 tahun bagi orang yang memasuki komputer atau sistem elektronik orang lain, menerobos, sampai menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

Denda Rp 800 juta dan penjara 10 tahun bagi orang yang menyadap informasi elektronik atau dokumen elektronik di komputer atau sistem elektronik --mengubah maupun tidak dokumen itu.

Pasal 32

Denda Rp 2-5 miliar dan penjara 8-10 tahun bagi orang yang mengubah, merusak, memindahkan, dan menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik.

Pasal 34

Denda Rp 10 miliar dan penjara 10 tahun bagi orang yang memproduksi, menjual, mengimpor, mendistribusikan, atau memiliki perangkat keras dan lunak sebagaimana di Pasal 27-34. (Sumber: RUU ITE)

DEFINISI

Informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, kode akses.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, optikal, elektromagnetik yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan.



HGU lahan perkebunan tidak bisa lagi diperpanjang di muka sekaligus

foto: atn-center.org

Negara Berhak, Pengusaha Keberatan

Ketentuan yang mengurangi, bahkan menghalangi kewenangan negara atas tanah sebagaimana diatur dalam UU Penanaman Modal dianulir Mahkamah Konstitusi.

UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menganudung ketentuan penguasaan atas tanah atau lahan melalui Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1, 2 dan 4 sangat menguntungkan investor. Maka atas permohonan uji materi beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan puluhan masyarakat secara pribadi, ketentuan yang sangat memanjakan pemodal tersebut, baru-baru ini, dianulir Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada ketentuan dalam pasal 22 UU No.25/2007 ayat 1, diatur mengenai jangka waktu hak. Sedangkan ayat 2 mengatur syarat-syarat memperoleh hak tersebut pada ayat 1, dan ayat 4 mengenai sanksi-sanksi.

Pada Pasal 22 ayat 1 butir a yang mengatur tentang HGU disebutkan, HGU dapat diberikan selama 95 tahun dengan cara, diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun.

Sementara Pasal 22 ayat 1 butir b yang mengatur HGB, disebutkan HGB dapat

diberikan selama 80 tahun dengan cara, dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbarui selama 30 tahun. Sedangkan pasal 22 ayat 1 butir c yang mengatur HP disebutkan, HP dapat diberikan selama 70 tahun dengan cara, dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan diperbarui 25 tahun. Kata-kata 'dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus' dalam kalimat pasal 22 ini menjadi penyebab sehingga penanam modal bisa terlalu lama menguasai lahan yang sekaligus akan mengurangi kewenangan negara atas tanah dimaksud.

Dalam putusannya, MK menilai pemberian HGU, HGB, HP memang tak meniadakan atau mengurangi kewenangan negara menjalankan mandat yang diberikan rakyat secara kolektif, karena negara berwenang menentukan berapa lama dan dengan syarat apa hak itu diberikan. Namun, pemberian hak-hak atas tanah dengan memperbolehkan perpanjangan di muka sekaligus, menurut pandangan majelis hakim, akan mengurangi bahkan menghalangi kewenangan negara melaku-

kukan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap lahan. Sebab, dengan perpanjangan sekaligus di muka itu berarti negara tidak boleh menghentikan atau membatalkan hak-hak atas tanah tersebut di luar alasan-alasan yang secara terbatas (*limited*) telah ditentukan dalam UU itu.

Dengan kata lain, negara tidak lagi bebas menjalankan kehendaknya untuk menghentikan atau tidak memperpanjang hak-hak atas tanah sebagaimana jika perpanjangan hak-hak atas tanah itu tidak diberikan secara dimuka sekaligus. Sedangkan jika negara menghentikan atau membatalkan perpanjangan hak-hak atas tanah dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 4, perusahaan penanam modal tetap berhak mempersoalkan keabsahan tindakan negara itu.

Dasar putusan MK lainnya, perpanjangan hak-hak atas tanah yang diberikan sekaligus itu juga akan menghambat negara untuk melakukan pemerataan kesempatan untuk memperoleh hak-hak atas tanah tersebut secara adil.

Permohonan uji materi yang dilakukan Henry Saragih dari Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Muhammad Nur Uddin dari Aliansi Petani Indonesia (API), Dwi Astuti dari Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Salma Safitri Rahayaan dari Persekitarian Solidaritas Perempuan, Sutrisno dari FSBJ, Khalid Muhammad dari Walhi, Usep Setiawan dari konsorsium Pembaruan Agraria, Ade Rustina Sitompul dari SHMI, Yuni Pristiwati dari ASPPUK, dan puluhan perorangan lainnya itu, dikabulkan MK pertengahan Maret lalu. Namun, permohonan uji materi UU ini hanya mengabulkan pasal 22 ayat 1, 2, dan 4. Sedangkan 6 pasal lainnya, yakni pasal 1 ayat 1; pasal 3 ayat 1 huruf d; pasal 4 ayat 2 huruf a; pasal 8 ayat 1; pasal 12 ayat 1,2 dan 4, serta pasal 21 ayat 1 dan 2; ditolak MK.

Atas putusan itu, hakim Maruarar Siahaan memberikan pendapat berbeda. Ia mengatakan, seharusnya MK mengabulkan permohonan atas pasal 4 ayat 2 huruf a dan pasal 12 ayat 3 dan 4 tentang pembedaan investor asing dan dalam negeri. Menurut Maruarar, pemberian perlakuan yang sama antara investor asing dan dalam negeri berpotensi membawa ketidakadilan. "Memberlakukan yang tak sama secara sama akan melahirkan ketidakadilan yang secara jelas bertentangan dengan konstitusi," ujarnya seperti dikutip Koran Tempo.

Menanggapi keputusan ini, kalangan pengusaha merasa keberatan karena akan merombak lagi rencana yang telah dibuat sebelumnya. Sofjan Wanandi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia mengatakan, kepastian hukum harus ditegakkan di negeri ini agar investor tidak merasa bingung menanamkan modalnya. ■ ST

Berlomba Menyajikan Informasi

Internet tidak membuat hingar bingar industri surat kabar konvensional surut. Beberapa surat kabar bahkan terbit dua kali sehari sambil bersinergi dengan dunia internet dalam menyajikan berita terbaru dan akurat.



Tahun lalu merebak berita tentang aksi seorang reporter *online* meliput berita di pameran dengan peralatan futuristik di Hannover, Jerman. Ia berlalu langang di ruang pameran sementara di bagian kiri kepalanya terpasang kamera. Sementara di depan mata kanannya menyembul layar kecil untuk mengedit berita. Lisa kemudian mengetik teks via PDA. Wartawan 'masa depan' itu cuma butuh 10 menit untuk mengirim informasi berupa video, foto, dan teks ke media yang berminat.

Kecepatan publikasi berita seperti yang dilakukan Lisa memang tidak sejalan dengan media cetak konvensional yang hanya terbit pagi hari. Kinerja Lisa cuma cocok dengan media audio-visual atau pers yang terbit lebih satu kali dalam sehari atau media *online* yang beritanya di-*update* setiap menit.

Menjawab kebutuhan akan

informasi yang cepat dan akurat menjadi tantangan media konvensional seperti koran dan majalah. Sebab media elektronik dengan leluasa memanjakan pembaca dengan ratusan halaman berita serta analisis yang berkualitas. Kalau begitu, akan berakhirkah era media cetak seperti koran dan majalah?

Pertanyaan ini menjadi tidak ada artinya bila kita melihat apa yang dilakukan oleh Harian Seputar Indonesia dan Kompas yang kemudian diikuti Media Indonesia. Meski menyediakan berita dalam bentuk *online* yang bersinergi dengan versi cetaknya, ketiga media ini malah berlomba menyediakan informasi terbaru dengan terbit dua kali sehari.

Harian Kompas misalnya. Sejak awal tahun ini terbit dua kali. Edisi pagi yang terbit sejak dulu dan edisi siang/sore 'Kompas Update' yang dijual dengan harga Rp 1.000,- dan tidak ada opsi untuk berlang-

ganan. Meski berharga seribu rupiah, Kompas Update terbit 32 halaman dengan sajian berita sesuai 'kualitas' Kompas. Hal yang menarik adalah pada edisi nomor 1 tahun ke-1 menampilkan sisi multimedia pada kolom ketujuh dengan isi "Perkembangan berita di: www.kompas.com". Bila Anda sering mengunjungi situs Kompas Online, Anda juga akan mendapati wajah dan manajemen konten yang berubah. Kompas nampaknya ingin menyajikan berita terbaru dengan cepat dan akurat bagi para pembacanya dengan memanfaatkan teknologi internet yang memiliki jangkauan lebih luas daripada edisi cetaknya. Apa yang dilakukan oleh Kompas dengan terbit dua kali, sudah dilakukan lebih dulu oleh koran Seputar Indonesia. Belakangan Media Indonesia ikut terbit dua kali sehari setelah sebelumnya melakukan uji coba secara internal.

Namun surat kabar ini relatif sulit diperoleh di pasaran. Mungkin karena masih baru atau kurang laku dijual.

Entah ini sebagai bentuk 'pengukuhan' kalau koran masih dibutuhkan di era internet sekarang ini, keputusan untuk terbit dua kali patut diacungi jempol. Pembaca - sebagian besar belum memiliki akses internet - bisa mendapatkan informasi tanpa harus dipusingkan dengan urusan koneksi atau *gadget* untuk bisa membaca berita online.

Pembaca juga masih banyak yang tidak suka membaca berita *online* karena membaca surat kabar masih lebih nyaman dibandingkan membaca dari layar monitor. Surat kabar juga bisa dibaca dan dipinjamkan di mana pun dan kapan pun. Alasan lain, dariacamata penerbit, tentu saja, karena masih ada yang mau membeli ruang untuk memasang iklan. ■ LP

Koran Indonesia Business Journal Diluncurkan

Dunia pers Indonesia semakin ramai dengan hadirnya surat kabar ekonomi dan bisnis bernama Indonesia Business Journal (IBJ). Koran ini hadir untuk melengkapi kebutuhan informasi dan referensi masyarakat khususnya kalangan eksekutif, profesional dan pebisnis. Sesuai dengan target pembacanya yakni mereka yang mempunyai mobilitas tinggi, format tampilannya dibuat sederhana dengan desain atraktif sehingga memudahkan pembaca menyerap informasi dengan cepat. Koran ini juga muncul dalam bentuk "mobile newspaper" yang dapat diakses dengan mudah melalui telepon seluler.

Pembaca juga bisa membaca berita dalam online dan digital melalui INN WorldCom.

Koran Tempo Luncurkan Edisi Jawa Timur-Bali

PT Tempo Inti Media Tbk., penerbit harian Koran Tempo, meluncurkan Koran Tempo edisi Jawa Timur-Bali mulai Senin 24 Maret 2008. Penetrasi usaha ini dilakukan seiring dengan sistem cetak jarak jauh di Surabaya. "Keputusan cetak jarak jauh diambil semata untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan di Jawa Timur dan Bali yang mengeluhkan keterlambatan sirkulasi," kata Direktur Utama dan Corporate Chief Editor Tempo Inti Media Bambang Harymurti dalam acara

peluncuran di Hotel Sheraton, Surabaya. Sejak Koran Tempo diluncurkan pada 2 April 2001 di Jakarta, Bambang menjelaskan, pemenuhan pasar pembaca di Jawa Timur dan Bali langsung dipasok dari Jakarta. Jarak yang jauh ini membuat Koran Tempo hadir sangat terlambat.

Maka Tempo Inti Media berupaya memuaskan para pelanggan dengan cetak jarak jauh. Acara dihadiri ratusan tokoh politik, tokoh masyarakat, pelaku bisnis, pemimpin media, serta para agen dan looper koran di Jawa Timur. Di antaranya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur Fathorrasjid MSI, guru besar ilmu hukum Universitas Airlangga J.E. Sahetapy, dan CEO Jawa Pos Group Dahlan Iskan.

Foto-foto biksu di Tibet yang berdarah-darah memenuhi halaman demi halaman rubrik internasional di media massa dan media online selama bulan Maret. Perhatian dunia tertuju pada aksi China yang menekan Tibet dengan kekerasan. Ini berawal dari aksi para demonstran yang pro Tibet menuntut kemerdekaan Tibet dari China pertengahan Maret lalu.

Protes dimulai pada 10 Maret digelar di Lhasa, Tibet - pemerintahan otonomi khusus di barat daya China - dan di beberapa daerah lainnya untuk memperingati 49 tahun pemberontakan Tibet terhadap pemerintah komunis China yang gagal dan menyebabkan Dalai Lama mengungsi ke India sampai sekarang. Pada puncak aksi protes (14/3) terjadi insiden berdarah dan pembakaran toko-toko dan mobil milik etnis China di Tibet. Pemerintah China kemudian bertindak represif untuk memulihkan kondisi keamanan.

Sayangnya, dalam demonstrasi yang berbuntut kerusuhan massal itu, puluhan orang dikabarkan tewas ditembak pasukan keamanan China. Belasan pengunjuk rasa lainnya ditangkap dan ditahan. Kantor berita resmi China, Xinhua, mengutip pernyataan resmi pemerintah Beijing, mengklaim bahwa jumlah korban tewas akibat kerusuhan itu 'hanya' 19 orang. Sebagian besar justru

Tindakan keras Beijing tak menyurutkan perlawanan etnis Tibet dan para pendukungnya di seluruh dunia.



Kecaman dan kritik terhadap China merebak di seluruh dunia

'Kotoran di Barat' Mengaum

tewas akibat ulah para perusuh itu sendiri. Keterangan itu langsung dibantah oleh aktivis perlawanan Tibet. Pemerintah Tibet di pengasingan melaporkan jumlah korban tewas jauh lebih banyak dari angka resmi. Setidaknya, 130 orang dilaporkan tewas dalam kerusuhan tersebut.

Pasca demonstrasi berdarah itu, pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, di Dharamsala, India, mengatakan akan mengundurkan diri jika situasi di Tibet memburuk. Dalai Lama menolak tuduhan China bahwa dia berada di belakang rangkaian protes anti-China di Tibet yang menelan korban jiwa. Dia justru menyerukan untuk membangun hubungan baik dengan China. "Jika segala sesuatu berada

di luar kendali, pilihan saya satu-satunya adalah benar-benar mundur," kata pemenang Hadiah Nobel 1989 ini dalam konferensi pers di Dharamsala, pusat pemerintahan Tibet di pengasingan.

Dia mengatakan, rakyat Tibet dan China harus hidup berdampingan. Dalai Lama meminta rakyatnya untuk tidak menggunakan kekerasan. "Kita harus membangun hubungan baik dengan China. Kita tidak boleh memupuk perasaan anti-China. Jangan gunakan kekerasan. Kekejaman adalah sebuah tindakan bunuh diri. Bahkan, jika 1.000 orang Tibet mengorbankan diri, hal itu tidak banyak membantu," ujarnya. Namun, Dalai Lama menyatakan dia tidak memiliki kekuasaan

untuk mengatakan kepada rakyat Tibet untuk melakukan ini atau jangan melakukan itu. "Gerakan ini di luar kendali kami," katanya.

Respon Dalai Lama yang mewakili kepentingan enam juta orang Tibet ini untuk menampik tuduhan Perdana Menteri China Wen Jiabao yang mengatakan Dalai Lama mendalangi kerusuhan di Tibet yang mengakibatkan puluhan orang tewas. Wen mengatakan, pemrotes bermaksud menghasut untuk menyabotase Olimpiade Beijing guna mencapai tujuan mereka yang tersembunyi.

Kecaman dan kritik terhadap China langsung merebak di seluruh dunia. Organisasi gerakan pelindung HAM, Hu-



foto-foto: washingtonpost.com

man Rights Watch (HRW), menjadikan tragedi Tibet sebagai amunisi baru untuk mengkritik kebijakan China. Rapor merah yang dibuat HRW menyebut kasus tragedi Tiananmen, pemberangusan gerakan Falun Gong, serta tekanan terhadap kebebasan beragama dan berpendapat, sebagai nilai merah China dalam penegakan HAM. Tak tanggung-tanggung, organisasi yang berpangkalan di New York itu menggalang dukungan negara-negara Eropa dan Amerika Utara untuk memboikot Olimpiade 2008. China tahun ini dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan pesta akbar olahraga dunia ini untuk pertama kali.

Imbauan untuk memboikot Olimpiade Beijing kemudian merebak ke mana-mana. Imbauan itu membuat sutradara kenamaan Amerika Serikat, Steven Spielberg mundur sebagai penasihat penata artistik acara pembukaan dan penutupan Olimpiade Beijing 2008.

Sutradara film legendaris Jurassic Park itu rupanya memprihatinkan sepak terjang pemerintah China dalam menangani masalah Tibet.

Organisasi wartawan lintas batas (RWB), yang selama ini mengawasi perlakuan Pemerintah China atas kebebasan pers, turut menyerukan pemboikotan. Namun aksi itu sebatas pemboikot acara pembukaan Olimpiade yang bakal berlangsung di Stadion Nasional Beijing, 8 Agustus mendatang. Organisasi yang berbasis di Prancis ini menilai Beijing masih mengekang kebebasan berpendapat dan pers. Dalam laporannya, sekitar 30 wartawan dan 50 pengguna internet, kini masih mendekam di penjara China. Pemerintah China juga dituding membatasi akses ribuan situs berita dan memblokir masuknya program-program berbahasa China, Tibet dan uyghur dari 10 stasiun radio internasional.

Biro Administrasi Negara Urusan Tele-

Kata Xizang (artinya Tibet) dalam bahasa China mempunyai dua arti yang bertolak belakang. Xizang bisa berarti 'harta di barat', tetapi Xizang juga memiliki homonim yang berarti 'kotoran di barat' yang menjadi ejekan orang-orang keturunan Han.

visi, Radio, dan Film (SARFT) China menutup 26 situs termasuk situs Tudou.com, situs video sharing terbesar dan terpopuler di China. SARFT beralasan, situs-situs itu melanggar dan mengancam keamanan dan kepentingan China.

Tindakan pemerintah China yang represif juga berlaku untuk Tibet. Beijing menyatakan bahwa secara historis Tibet adalah bagian dari China. Sebaliknya, kebanyakan warga berdarah Tibet yakin bahwa Tibet tak pernah menjadi bagian China selama berabad-abad. Bahkan di dalam benak warga Tibet, mereka selalu merdeka dari China walau secara de facto kini berada di bawah China. Tibet, bisa disetarakan dengan Timor Leste, sejak diduduki Indonesia pada tahun 1975 hingga merdeka, di mana sebagian rakyat Rimator Leste tak merasa menyatu dengan RI.

Dalam persoalan Tibet, isu dan masalah yang berkembang juga berbeda. Kata Xizang (artinya Tibet) dalam bahasa China mempunyai dua arti yang bertolak belakang. Xizang bisa berarti 'harta di barat', tetapi Xizang juga memiliki homonim yang berarti 'kotoran di barat' yang menjadi ejekan orang-orang keturunan Han tentang orang-orang Tibet yang kotor dan berdebu karena ritual agama Lama dengan posisi telentang di tanah.

Orang-orang keturunan Han ini pulalah yang menambah kebencian pada China di Tibet. Dalai Lama menyebutnya genosida budaya, merujuk pada aksi Pemerintah China yang mendorong masukkan etnis Han, dari China bagian lain, ke Tibet. Pemusnahan budaya Tibet sedang berlangsung. Menurut juru bicara International Campaign for Tibet, Kate Saunders, hal ini turut memicu protes di Lhasa, ibu kota Tibet, pertengahan Maret lalu. Selain itu, etnis Tibet juga makin terpinggirkan dari deru pembangunan ekonomi di Tibet. Dengan sikap keras China dan sikap warga Tibet yang selalu merasa bukan bagian dari China, permasalahan Tibet kini berkembang makin kompleks.

Sebab ada faktor kenyataan internasional, dengan tidak ada satu negara dan pemerintahan di dunia ini yang mempertentangkan status Tibet dan mengakuinya sebagai bagian dari RRC, dan bersedia untuk memberikan pengakuan legal apa pun kepada Dalai Lama yang berada dalam pemerintahan pengasingan di Dharamsala, wilayah India yang berbatasan dengan Tibet. ■ LP

Mahfud M.D.

Bertekad Mengawal UUD '45

Kinginan Mahfud M.D. untuk berkiprah secara nyata di bidang penegakan hukum akhirnya kesampaian juga. Mulai April ia mendapat tugas baru sebagai hakim konstitusi periode 2008-2013. Ia berhasil meraih suara terbanyak mengungguli Jimly Asshiddiqie Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Akil Mochtar dari Partai Golkar. Ketiganya lolos setelah dalam voting hasil *fit and proper test* di Komisi III DPR RI mengalahkan 13 calon lainnya.

Dalam *fit and proper test* itu, Mahfud memaparkan makalahnya yang berjudul "Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Yudisial Independen". Ia juga mengajukan 10 rambu bagi hakim konstitusi. Kesepuluh rambu itu adalah tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur, tidak

boleh membuat putusan yang bersifat ultra petita, tidak boleh mendasarkan putusan dengan UU, tidak boleh mengintervensi delegasi dan atribusi kewenangan, tidak boleh memutus berdasar teori, tidak boleh melanggar asas yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri, tidak boleh mengomentari kasus konkrit yang tengah ditangani, tidak boleh menganjurkan orang untuk berperkara, tidak boleh mencampuri urusan politik, dan tidak boleh beropini tentang UUD. Kesepuluh rambu itu, menurutnya masih bisa diperdebatkan. Tapi setidaknya menjadi rambu bagi dirinya jika terpilih menjadi hakim konstitusi.

Mahfud juga menegaskan bahwa seorang hakim konstitusi harus independen, dan bebas dari intervensi manapun termasuk intervensi politik. Sebelum mengikuti *fit and*

proper test, pakar Hukum Tata Negara ini sempat menyatakan bahwa keinginannya menjadi hakim konstitusi karena alasan ingin kembali ke habitatnya. Banyak rekannya yang mengatakan kalau ia kurang begitu mahir berdebat politik. Ia pun menyadari bahwa ia memiliki modal yang memadai di bidang penegakan hukum.

Sehari setelah meraih suara terbanyak dalam pemungutan suara pemilihan hakim konstitusi di Komisi III DPR, guru besar hukum Universitas Islam Indonesia itu melayangkan surat pengunduran diri ke PKB. Mahfud mengundurkan diri sebagai ketua DPP, ketua lembaga pemenangan pemilu (LPP), dan anggota PKB. Surat tersebut diterima pengurus DPP PKB pada Sabtu sore (15/3) dan langsung dibahas dalam rapat pleno DPP PKB Sabtu malam. Dalam surat tersebut,



Mahfud meminta untuk dihentikan selambat-lambatnya 31 Maret 2008. Sebab, mulai 1 April mantan pemimpin umum majalah mahasiswa Mubillah UII (sekarang Himmah) itu harus sudah berkantor di Mahkamah Konstitusi menggantikan Achmad Roestandi yang sudah pensiun. Tidak hanya mengundurkan diri, mantan wakil ketua umum DPP PKB itu juga sudah berpacitan kepada Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid.

Setelah menjabat sebagai hakim konstitusi Mahfud janji akan menunjukkan komitmennya sebagai negarawan dan Hakim MK yang netral. Dia ingin ikut mengawal UUD 45. ■ MLP

Menkes Siti Fadhilah Supari

Sering Dikatai 'Goblok'

Belakangan ini, Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari dibuat gusar oleh tanggapan masyarakat yang menilai dirinya 'tidak becus' mengurus masalah kesehatan di negeri ini. Belum usai gegernya beberapa kalangan di mancanegara karena buku "Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung" yang diluncurkannya awal Februari lalu, datang lagi 'geger' yang lain. Masyarakat dibuat panik oleh isu susu formula yang terkontaminasi bakteri. Sama seperti kasus yang sudah-sudah, Siti kemudian dikatai 'Menkes Goblok' yang tidak peka pada rakyat kecil. Di sisi lain, ada pula yang mencap ia 'goblok' karena berpihak pada rakyat kecil. Misalnya saat lulusan S2, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia (FK-UI) ini meluncurkan obat generik yang murah bagi rakyat. Kurangnya dukungan masyarakat kepada Depkes juga diikuti dengan lemahnya dukungan dari dalam. Sebagai contoh ia menyayangkan pernyataan Ketua Umum IDI (Dr.dr.Fahmi Idris), kepada sebuah koran yang mengatakan kalau obat generik, bukan hanya murah, tapi murahan. Padahal obat generik menurut Siti, khasiatnya sama dengan obat-obat bermerek, dan harganya jauh lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat.

Putri tokoh Muhammadiyah di Jawa Tengah, Sahlan Rosyidi, ini juga sering dicap seperti preman karena sering menuding orang lain tidak sungguh-sungguh bekerja dan sarat kepentingan. Misalnya kasus

susu formula berbakteri yang dilansir laboratorium Institut Pertanian Bogor (IPB). Dalam laporan itu disebutkan bakteri *Enterobacter sakazakii* ditemukan pada produk susu formula untuk bayi 22,73 persen dari 22 sampel yang diuji, bahkan produk makanan bayi lebih besar probabilitasnya karena mencapai 40 persen dari 15 sampel. Bakteri ini bisa menyebabkan radang usus, meningitis, enteritis, sepsis dan radang selaput otak bagi bayi di bawah usia satu tahun. Menkes kemudian mempertanyakan apakah publikasi IPB tersebut benar-benar murni untuk penelitian akademik atau mengusung "pesan" sponsor. Menanggapi soal susu berbakteri ini, Siti melihatnya sebagai usaha orang-orang yang tidak suka atau sakit hati kepadanya. Itulah sebabnya, Men-



kes wanita pertama di Indonesia ini tidak bersedia menanggapi serius penelitian dari IPB itu. Menurutnya penelitian itu sudah tidak relevan lagi sebab susu-susu yang diuji itu sudah tidak ada di pasaran. Lulusan S-3, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI) ini meminta masyarakat tidak perlu resah sebab Depkes dan BPOM sudah memeriksa seluruh susu kemasan dan hasilnya tidak ada susu yang mengandung bakteri. ■ MLP

Kusmayanto Kadiman

Terima Australian Alumni Award 2008

Tak kurang 30.000 ribu warga Indonesia pernah menyanam pendidikan di Negara Kanguru, Australia. Ketika kembali ke tanah air, mereka berdaya upaya memberikan kontribusi sesuai dengan latar belakang bidang ilmu yang mereka kuasai untuk membangun bangsa ini. Salah-satu putra terbaik yang dinilai memberikan kontribusi adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman.

Menristek yang mempunyai panggilan akrab KK (Kaka) menerima Australian Alumni Award (AAA) 2008 untuk kategori Penelitian dan Inovasi dari pemerintah Australia pada 16 Februari 2008. Penghargaan itu diberikan atas pengabdianya membangun bangsa dengan ilmu pengetahuan yang pernah dia peroleh selama ini. KK merupakan alumni Australian National University (ANU) dan meraih

gelar doktor bidang Systems Engineering di ANU tahun 1988.

Penerima Working Group on Computer Control, 1990 atau Officier dans l'Ordre des Palmes Academique dari Pemerintah Perancis tahun 2005 ini telah lama menggeluti bidang Teknologi. Salah-satu visi utamanya adalah menjadikan IPTEK sebagai mesin utama dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

Artinya, mantan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) 2001-2004 ingin semua orang bisa menikmati teknologi, termasuk orang miskin sekalipun. Konsep yang dipopulerkannya adalah Triple Helix yang merupakan penggabungan dari Academicians, Businessmen dan Government. Landasan dari konsep ini adalah mencapai sasaran pembertarikan kemiskinan di tengah masyarakat yang semakin hari-semakin terjepit dengan menyajikan teknologi yang

mampu dijangkau bagi mereka. Dalam formulasi ini, Dosen Teladan ITB 1991 ini berharap masyarakat bisa saling bersinergis satu sama lain untuk mendukung IPTEK.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Bill Farmer menyambut penghargaan AAA yang pertama kali diberikan bagi para Alumni Australia ini akan memberi dampak positif bagi perkembangan pendidikan masa depan kedua negara, baik Australia maupun Indonesia. Farmer menyampaikan, sebelum menentukan kandidat yang layak memperoleh AAA, Kedutaannya menerima seratus lebih aplikasi tujuh kategori yang diajukan universitas, pemberi kerja dan rekan kerja bagi para alumni Australia yang memiliki prestasi gemilang dalam berbagai bidang yang digelutinya. Selain Menristek Kusmayanto Kadiman, beberapa alumni lain yang mendapat anugerah itu diantaranya Deputy Chairman



Lippo Group James Riady (usahawan), Managing Director General Motors Autoworld Indonesia Mukiat Sutikno (usahawan), Director Gedung Kesenian Jakarta (seni-budaya), Anchor Metro TV Meutya Hafid (Jurnalisme dan Media), Deputy Chair LIPI Dewi Fortuna Anwar (Ekonomi dan Pembangunan Sosial), Mira Lesmana (produser film) dan CEO Trans7 Wishnutama Kusubandio (jurnalis). ■ ZAH, MLP

Wiranto

Makan Nasi Aking

Untuk menarik hati masyarakat, banyak tokoh melakukan kunjungan sosial ke berbagai daerah. Tidak jarang mereka menggelar acara makan bersama, entah itu makan bakso atau panganan lainnya. Acara makan-makan ini sudah menjadi hal biasa. Namun, tokoh nasional makan nasi aking, baru Wiranto yang mau melakukannya. Untuk menunjukkan empati dan konsekuensi dengan iklan "kemiskinan" yang diusungnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini 'belain-belain' makan nasi aking. Mantan Menko Polkam di era kabinet Presiden Abdurrahman Wahid ini makan nasi aking di salah satu rumah warga kurang mampu dalam kunjungan

sosial ke Desa Masigit, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten (18/3). Entah menikmati atau tidak, Wiranto terlihat lahap menyantap nasi aking dengan sambal. Wiranto, juga sempat menyuapi lima anak Solihah, si pemilik rumah. Solihah merupakan satu dari puluhan warga Kampung Masigit Tegal, yang biasa makan nasi aking dengan membelinya seharga Rp 1.000 per liter. Nasi aking, makanan yang berasal dari sisa-sisa nasi yang tak termakan yang dibersihkan dan dikeringkan di terik matahari, kemudian dimasak kembali. Nasi inilah yang banyak dikonsumsi warga miskin karena ketidakmampuannya membeli beras.



Wiranto saat makan nasi aking dengan warga kurang mampu

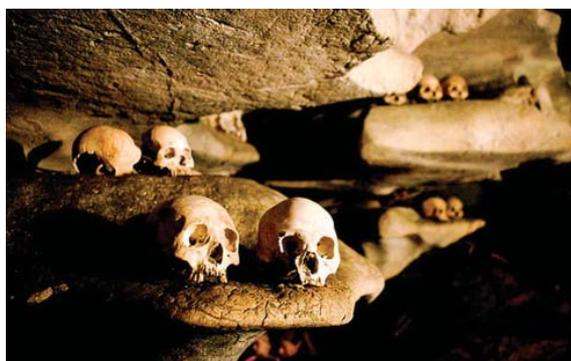
foto: repro Kompas

Usai makan nasi aking di rumah Solihah, Wiranto kemudian mendatangi rumah Ketua RT setempat Supeni (45) yang letaknya tidak jauh dari rumah Solihah. Ia menyerahkan sumbangan sejumlah uang dan paket sembako agar dibagikan

kepada warga yang ada di lingkungan tersebut. Belakangan ini Wiranto memang sedang giat mengunjungi rakyat miskin di berbagai daerah. Entah apa lagi yang akan dilakukannya untuk menarik hati mereka. ■ MLP



Orang yang sudah meninggal mendapat tempat khusus dalam budaya Toraja.



Tetap Hidup Selamanya

Dunia sudah mengakui bahwa budaya Toraja termasuk salah satu budaya terunik di dunia yang masih bertahan hingga era modern ini. Namun, bicara soal budaya Toraja, kebanyakan orang menganggap bahwa keunikan budaya dari suku yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan ini terdapat pada upacara kematian atau prosesi penguburan orang meninggal. Padahal, kalau hanya tingkat keunikan upacara kematian yang tinggi saja mungkin banyak di lain tempat seperti upacara pemakaman di Bali, Sumbawa dan lainnya.

Menurut pendapat beberapa ahli budaya seperti Stanislaus Sandarupa, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, keunikan budaya Toraja sesungguhnya terletak pada kepercayaan dan praktik-praktik budaya yang memperlakukan orang mati itu. Jadi bukan hanya dalam prosesi penguburan saja.

Dalam sistem kepercayaan orang Toraja yang disebut Alukta (Aluk Tolodo), kehidupan dipercayai sebagai suatu hal yang berputar, dimana manusia berasal

dari langit, turun ke bumi (menjalani kehidupan di bumi), kemudian kembali lagi ke langit. Disebut Aluk Todolo, untuk menggambarkan bahwa kepercayaan ini asli ciptaan leluhur orang Toraja.

Pandangan ini tampak dalam semua aspek budaya Toraja. Misalnya, dalam lagu-lagu duka (badong). Narasi bergerak dalam tema ini: manusia lahir di langit, turun ke bumi dan kembali lagi ke langit. Pandangan itu juga tampak dalam arsitektur bangunan rumah tongkonan dan lumbung alang dimana bangunan didirikan mengikuti gerakan dari selatan ke utara sampai titik zenit tertinggi atau sebaliknya, dari utara ke selatan, kembali ke langit tertinggi.

Dari sudut pandang budaya Toraja, orang yang sudah mati secara biologis dipandang sebagai orang yang hanya 'sakit' sebelum upacara adat dilakukan. Menurut mereka, orang mati tidak pernah mati. Hal tersebut diberlakukan tidak hanya sebagai suatu pandangan hidup, melainkan dipraktikkan dalam keseharian. Si 'sakit' tetap diberikan makan tiga kali sehari. Mereka juga sangat akrab

dengan si 'sakit'. Mereka tidur bersama si 'sakit'. Bahkan di Toraja Utara, kalau pasangan hidup meninggal, sang istri atau sang suami yang ditinggalkan, tidur bersama jenazah di ranjang dan kelambu yang sama.

Misalnya, jika suatu saat seorang kakek meninggal. Sebagai orang 'sakit', jasad dimasukkan ke dalam 'peti sementara' dan ditiadakan di kamar tidur ruang selatan rumah tongkonan. Jasad ditiadakan dengan kepala mengarah ke matahari terbenam dan kaki ke arah matahari terbit, layaknya seperti cara orang hidup tidur menurut budaya Toraja. Dan karena si kakek dianggap masih berada di alam kehidupan, ia tetap diberikan makan tiga kali sehari (pagi, siang, dan malam). Yang membawa makanan selalu berkata, "bangunlah kakek, makanan dan minumanmu sudah ada." Pada siang hari dan terutama pada malam hari, anggota keluarga dan para tetangga berkumpul di dalam rumah, bercerita sambil bermain domino dan minum kopi agar tahan begadang. Kalau sudah lelah mereka tidur di sekitar si 'sakit'.

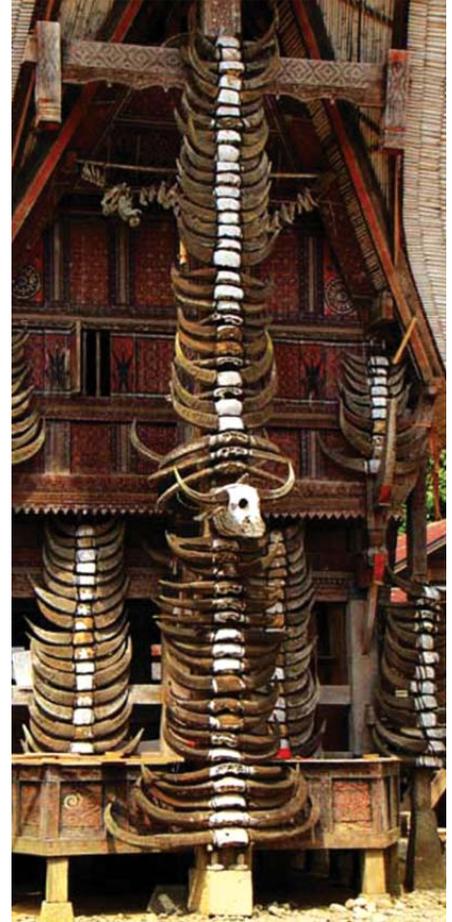


foto-foto: weltrekordreise.ch

Selama menunggu pelaksanaan upacara, jasad dibaringkan di rumah tersebut selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tergantung pada kesediaan keluarga untuk melaksanakan upacara. Bahkan kabarnya, ada yang pernah lebih dari dua puluh tahun. Maka bagi orang luar suku Toraja, sepintas akan sulit membedakan mana rumah yang ada orang 'sakit'-nya dan mana yang tidak.

Tapi, bila diperhatikan secara seksama, sebenarnya ada pertanda yang membedakan hal tersebut. Di depan jalan dekat sebagian rumah tongkonan akan dijumpai adanya bendera putih. Bendera putih inilah yang menandakan bahwa di tongkonan tersebut ada yang 'sakit' yakni orang meninggal yang belum diupacarai. Dalam budaya Toraja sendiri, kuburan asli disebut banua tang merambu (rumah tanpa asap). Disebut rumah tanpa asap, karena di dalamnya tidak ada dapur yang merupakan simbol kehidupan.

Orang 'sakit' itu sering disebut 'to masaki uluna' yang artinya, orang yang kepalanya sakit. Atau 'to makula' yang berarti, orang yang panas. Ungkapan-ungkapan metaforis dan bendera putih tersebut, menurut Stanislaus Sandarupa, dalam tulisannya di Harian Kompas, bersifat ambigu. Artinya, ungkapan itu

BUDAYA UNIK: (searah jarum jam dari kiri atas) Rumah tradisional Tongkonan ; Barisan patung terbuat dari kayu yang merepresentasikan mereka yang sudah meninggal. Patung-patung ini menjadi 'pelindung' kuburan (tengah) ; Semakin banyak tanduk kerbau yang digantung di depan rumah berarti semakin kaya keluarga/suku pemilik rumah itu ; Kumpulan tengkorak di sebuah gua.

mengandung makna ketakutan akan kekuatan alam gaib, tetapi pada saat yang sama juga berisi keinginan untuk menguasainya. Sementara alasan menyimpan si 'sakit' berlama-lama, menurut komentar keluarga si 'sakit' sebagaimana ditulis Stanislaus, adalah agar keluarga dapat melakukan upacara dengan tepat dan baik sesuai dengan strata sosialnya. Selain itu, agar semua anggota keluarga terutama yang di perantauan bisa menghadiri upacara.

Sedangkan upacara penguburan dalam budaya Toraja biasanya dilakukan sesuai dengan strata sosial keluarga yang meninggal. Pada keluarga yang strata sosialnya tinggi, upacara dilakukan dua kali. Upacara pertama yakni upacara yang disebut aluk pia, biasanya berlangsung selama lima malam. Kemudian upacara yang kedua yang disebut aluk dio rante biasanya dilangsungkan selama dua malam atau lebih.

Tenggang waktu antara upacara pertama dan kedua bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tergantung kesiapan keluarga. Selama menunggu penyelenggaraan upacara kedua, si 'sakit' ditudurkan di atas rumah dan tetap diperlakukan sebagai orang hidup. Yakni, memberinya makan tiga kali sehari.

Pada upacara yang kedua, ritus pertama yang dilakukan adalah ma'tundan, yang berarti membangunkan dari tidur. Posisinya lalu diubah ke posisi orang mati. Setelah melakukan beberapa ritus lainnya, ritus terakhir adalah memutuskan hubungan dengan rumah tongkonan dan lumbung. Secara simbolis ia diputuskan dari rumpun keluarga dan kampung halamannya. Tetapi, ia diputuskan bukan untuk pergi selamanya. Ia tetap diharapkan menjadi nenek moyang mereka yang aktif membangun hubungan kembali dengan orang hidup, terutama diharapkan akan kembali melipatgandakan apa yang sudah dikorbankan kepadanya.

Karena keunikan budaya Toraja ini, The History Channel dari TV Fox Amerika Serikat sebagaimana dituturkan Stanislaus Sandarupa, telah memilih budaya Toraja ini bersama budaya Minangkabau dari Indonesia untuk ditayangkan dalam 12 episode rites of passage dari bebagai penjuru dunia pada Mei mendatang. ■ MJ

Harapan Masyarakat Purwakarta

Dedi Mulyadi dan Dudung B Supardi resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta periode 2008-2013. Pelantikan tersebut dilakukan Gubernur Jabar Danny Setiawan atas nama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Purwakarta, pertengahan Maret lalu.

Pelantikan tersebut lebih banyak dihadiri tokoh-tokoh Golkar. Antara lain hadir Akbar Tandjung, Nurul Arifin, dan Uu Rukmana. Selain itu hadir pula pejabat-pejabat dari kalangan Pemprov dan DPRD Jabar, Korwil Jabar, para bupati dan jajaran unsur Muspida Pemkab Purwakarta. Dalam sambutannya, Danny Setiawan mengharapkan bupati dan wakil bupati terpilih untuk lebih meningkatkan kualitas pembangunan dalam menyejahterakan masyarakatnya. Terutama fokus pembangunannya harus lebih mengedepankan soal perindustrian dan pertanian. Gubernur juga menyarankan agar dasar pembangunan yang telah diletakkan bupati terdahulu, Drs H Lily Hambali Hasan M.Si dilanjutkan dengan baik.

Dedi Mulyadi yang akan memasuki usia 37 tahun pada saat pelantikannya, sebelumnya adalah Wakil Bupati Purwakarta 2004-2007. Tokoh muda yang oleh TokohIndonesia.com digelari 'Muda dalam Jabatan Tinggi' ini adalah sosok pemimpin yang murni tumbuh dari bawah. Pria kelahiran Subang 12 april 1971 yang selalu menanamkan motivasi "berpikir cerdas dan bekerja keras" ini, sejak kecil dijuluki 'si unil' dan 'si lembe' karena lincah dan pintar pidato, ceramah serta drama.

Saat ia masih kanak-kanak, sang ayah yang menjadi prajurit TNI dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ibundanya, Karsiti (alm) berjuang keras terus menyekolahkan anaknya. Dedi kecil pun sering harus membantu

Dedi-Dudung diharapkan mampu membawa Purwakarta semakin maju dan sejahtera.

sang bunda menjadi buruh tani di sawah dan ladang teangga. Ketika duduk di bangku SMAN Puwodadi Subang, Dedi juga terpaksa nyambi jadi tukang ojek untuk membantu ekonomi keluarganya.

Bintang sarjana hukum dari STH Purnawarman (sekarang

yang memiliki dedikasi tinggi. Ia menjadi PNS selama 35 tahun yang diawali sebagai polisi pamong praja di kecamatan Plered, kemudian menduduki jabatan di berbagai bidang, hingga menjadi Sekda Purwakarta sejak tahun 2004-2007. Suami dari Hj. Emmi S,

nistrasi.

Melihat jejak hidup mereka, kepemimpinan Dedi Mulyadi diharapkan mampu membawa Purwakarta semakin maju dan sejahtera. Untuk itu, Dedi sudah menyiapkan berbagai program. Untuk jangka panjang, mereka akan melakukan program internal yang terdiri dari penataan organisasi internal pemda, penataan SDM,



Dedi Mulyadi



Dudung B Supardi

dok. pemkab. purwakarta

Universitas Purwakarta), ini mulai bersinar ketika usianya menginjak 23 tahun yakni tatkala ia terpilih menjadi ketua HMI Cabang Purwakarta tahun 1994. Ia juga mengikuti berbagai organisasi lainnya seperti Federasi Serikat Pekerja (FSPSI), GM-FKKPI, Sekretaris PP-SPTSK-KSPSI, dan Ketua PC-Pemuda Muslim Indonesia, hingga menjadi anggota DPRD Purwakarta tahun 1999-2003 (Ketua Komisi E). Dari anggota DPRD, suami Anne Ratna Mustika ini kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati periode 2003-2008 dan terpilih menjadi ketua DPD Golkar Purwakarta tahun 2004 sampai sekarang.

Sementara Wakil Bupati Drs.H Dudung B Supardi MM, sebelumnya adalah Sekretaris Kabupaten Purwakarta. Pria kelahiran Cisalak, Subang, Jawa Barat 14 Mei 1950 ini adalah sosok birokrat tulen

ini menjalani pendidikan sekolah rakyat hingga sekolah menengah atas di Subang. Kemudian masuk Fakultas Ilmu Pemerintahan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Bandung tahun 1972 yang dilanjutkan hingga meraih sarjana lengkap Ilmu Pemerintahan di IIP Jakarta 1986 dan mengambil program Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul.

Selain pendidikan formal, ayah dari Idha Desyanti, Rina Susilawati, dan A.Arif Wibawa ini pernah menjalani pendidikan keahlian dan kepemimpinan antara lain: Sepadaya Jakarta, Diklatpim tingkat II LAN Bandung, Pembantu Jaksas, Kamawil Hansip, Keagrarian, Uspim Pemdagri, serta kursus bidang pemerintahan. Sebagai pendamping Bupati, ia berjanji akan bekerja sesuai aturan yang berlaku dan bekerja sesuai tata tertib admi-

perubahan paradigma birokrasi menjadi *entrepreneurship* birokrasi. Serta program eksternal akan memfokuskan pada pertanian dan industri.

Sedangkan untuk agenda teknis jangka pendeknya, Dedi akan memotong anggaran rutin yang dinilai tidak bermanfaat dan akan diarahkan pada anggaran-anggaran publik yang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian masyarakat akan dibebaskan biaya dalam pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Selain itu akan memberi santunan kepada setiap masyarakat Purwakarta yang meninggal dalam usia dewasa sebesar Rp 2 juta. Serta akan mendorong semua masyarakat mendapat akses, program jalan *hotmix* pedesaan yang selesai pada 2011. Bahkan untuk pendidikan ditargetkannya pada 2010 tidak ada lagi bangunan SD yang ambruk. ■ BND, MS

Ada Apa di Balik Ambisi Walikota

Penolakan penambangan batubara di Tarakan terus bergema. Sementara Walikota bersikeras memberi ijin kepada PT KPUC. Ada apa di balik ambisi itu?

Hanya karena lebih murah sekitar lima sen dolar AS per KWH, Walikota Tarakan, dr H Jusuf Serang Kasim memberikan ijin kepada PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) Tarakan melakukan eksplorasi batubara di Tarakan, pulau yang hanya memiliki luas kurang lebih 241,5 Km2. Berbagai elemen masyarakat dari masyarakat umum, hingga anggota DPRD tampaknya tidak mampu membendung keinginan Walikota keturunan India itu.

Dalam sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melalui Dinas Lingkungan Sumber Daya Alam (LISDA) di Gedung DPRD Tarakan, berbagai kalangan sudah mengingatkan agar Pemkot Tarakan benar-benar mengkaji ulang dampak penambangan batubara itu terhadap pulau sekecil Tarakan.

Ketua Komisi II DPRD Tarakan H Andi Lolo dari Fraksi Patriot misalnya, menyarankan, agar polemik seputar rencana penambangan batubara itu tidak berkepanjangan. "Apakah sudah ada AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Atas Lingkungan) dan ijin lainnya?" tanya Andi. Menurut mantan Area Manager Medco E&P Indonesia Tarakan itu, PT KPUC selaku investor tentu sudah seharusnya memiliki tenaga-tenaga ahli, baik di bidang teknologi, lingkungan, maupun marketing. Mereka diharapkan bersedia mempresentasikan, bukan dari Dinas Lisda. "Jangan ada yang ditutup-tutupi, dan apa untung-ruginya kalau membangun pembangkit tenaga listrik de-

ngan menambang batubara di Tarakan," ujarnya. Sebab, menurutnya, kini masyarakat tidak mau lagi diberi janji-janji koling (janji kosong). Dulu, ketika mesin PLN menggunakan solar, dikatakan mahal, lalu beralih ke gas. Kemudian, pada tahun 2004 PLN Tarakan pernah mengajukan ijin prinsip untuk membangun pem-



Kaukus Perduli Lingkungan (EPW) bersama Elemen mahasiswa melakukan aksi demo di depan luar gedung DPRD Tarakan menolak penambangan batubara di Tarakan.

bangkit listrik tenaga uap (PLTU) tetapi Walikota sendiri tidak memberi ijin. "Kenapa justru sekarang swasta diberi ijin? Atau, apakah dengan batubara membuat harga listrik kepada masyarakat bisa lebih murah?" tanya Andi Lolo.

H Abdul Khair, SE anggota DPRD Tarakan dari Partai Bintang Reformasi juga mengaku tidak habis pikir mengapa Pemkot begitu getol merealisasikan penambangan batubara itu. "Apakah perusahaan tambang ini milik Jusuf SK sehingga begitu getolnya menjadi juru bicara investor, atau ada apa sebenarnya di balik ambisi itu? Seharusnya

pemerintah berpikir lebih jernihlah. Saya yakin, seluruh masyarakat Tarakan akan mendukung rencana Pemkot mengalihkan gas ke batubara jika didatangkan dari luar Tarakan," katanya.

Alasan Pemkot Tarakan ingin menambang batubara itu, karena lebih murah dibanding jika didatangkan dari luar Tarakan, tidak bisa diterima Abdul Khair. Menurut pengusaha muda yang kini menjabat Ketua Kadinda Kota Tarakan itu, selisih harga itu tidak seimbang dengan dampak pe-

di tempat. Beliau (Juanda Lesmana, Red) jarang ada di tempat," ujar petugas Satpam di gardu pintu masuk.

Tanggapan terhadap masalah ini datang dari Kepala Adat Besar Dayak Tidung Adji Pengiran Haji Mochtar Basry Idris. Kepala adat besar bergelar Amiril Pengiran Mahkota Adji Radin Alam itu mengaku tidak menolak penambangan batubara di Tarakan. Tapi ia mengingatkan pemerintah, kalau orang lain bisa, ia juga tentunya bisa. "Saya punya perusahaan, peralatan alat-alat berat cukup dan kami punya lahan yang disebut tanah adat dan sebagian besar dijadikan hutan lindung pulau Tarakan. Lha kalau hanya mau berpikir sesaat mengapa harus orang luar yang mengorek kekayaan pulau ini, kami pun bisa," katanya.

Apa sesungguhnya yang ingin diraih Pemkot Tarakan? Pada tahun 2002 lalu, seorang pengusaha mengajukan ijin penambangan batubara, tapi Jusuf SK mengatakan ketika itu, selama ia menjabat walikota tidak akan diperkenankan penambangan di Tarakan mengingat kondisinya yang hanya pulau kecil. "Jangankan menggali, selebar kuku jari pun tidak akan diijinkan," kata dr H Jusuf SK ketika itu seperti dituturkan Ketua LSM Pemuda Lintas Utara (Pelita), Muhidin Kasim Betan kepada Redaksi Biro Berita Indonesia di Tarakan, Maret lalu.

Muhidin Kasim Betan menuding Pemkot Tarakan tidak transparan menyosialisasikan penambangan batubara tersebut. Menurut tokoh masyarakat Timor dari NTT ini, tidak semua elemen masyarakat diundang ketika memberi paparan.

"Ini, benar-benar sudah *di-setting*. Apa sebenarnya di balik ambisi Jusuf SK. Ada apa di penghujung jabatannya sebagai Walikota Tarakan, terlebih dengan pencalonannya sebagai Gubernur Kalimantan Timur mendatang," katanya. Ada kecurigaan? "Curiga sich boleh-boleh saja, saya tidak menuduh. Tapi, pantas dipertanyakan dan layak dibiarkan," imbuhnya. ■ ASM



Hasil poling dimaksudkan untuk memberikan gambaran sosok wakil walikota pilihan masyarakat Bandung.

serpong.org

Poling SMS Jaring Beberapa Nama

Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung baru akan digelar 10 Agustus 2008 mendatang. Namun bursa bakal calon (Balon) Wakil Walikota sudah mulai dijaring beberapa lembaga yang peduli kota kembang ini.

Lembaga yang tergabung dalam Komunitas Praktisi Radio, Televisi dan Surat Kabar (Kopertilas) misalnya, sejak beberapa bulan lalu telah melakukan poling melalui sms. Ada sembilan nama yang menjadi pilihan dalam poling itu.

Berdasarkan poling selama 3 bulan, yang berakhir pada Februari 2008 lalu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bandung, yang juga anggota Komisi D, DPRD Kota Bandung Deden Rukman Rumadji menjadi unggulan pertama dengan skor 30,45 %. Unggulan kedua diduduki oleh Ketua Karang Taruna Kota Bandung, yang juga anggota Komisi B DPRD Kota Bandung dari Partai Golkar, Aat Safaat Hodijat, dengan skor 23,50%. Sedangkan urutan ketiga ditempati Kepala Bappeda Kota Bandung Tjetje Soebrata (22,97 %).

Kemudian di urutan keempat dan seterusnya berturut-turut ditempati oleh: Ketua DPC Golkar Kota Bandung Asep Dedi, Ketua DPC Partai Demokrat Erwan Setiawan, Ketua Pangkar DPRD Kota Bandung dari Partai PPP Lia Noer Hambali, Sekda Kota Bandung Edi Siswadi, Cendekiawan Muslim Asep Sumuh, Ketua DPC PDIP Kota Bandung, yang juga anggota DPRD Kota Bandung Isa Subagja, dan Ketua DPRD Kota Bandung dari Partai PKS Husni Muttaqien.

Mengenai poling tersebut, Ketua Kopertilas Andi Purnama mengatakan, bahwa hasil poling tersebut bukanlah representasi kemenangan calon Wakil Walikota Bandung. Tetapi, agar masyarakat mampu belajar berdemokrasi. Selain itu, hasil poling juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat

mengenai sosok wakil walikota hasil pilihan masyarakat. Lebih lanjut, untuk lebih memperkenalkan calon pemimpin yang akan berkompetisi pada Pilkada Kota Bandung, Kopertilas rencananya akan menggelar kembali poling sms serta diskusi tahapan-tahapan Pilkada, diskusi dengan para calon, dan debat kandidat walikota dan wakil walikota.

Namanya Menonjol

Bagi sebagian warga kota Bandung, nama Deden Rukman Rumadji sudah tidak asing lagi. Ayah 4 orang anak ini, dipromosikan mendampingi Walikota Bandung Dada Rosada yang rencananya akan tampil kembali mengikuti Pilkada Kota Bandung 2008, untuk masa jabatan periode keduanya (2008-2013).

Pengusaha muda di bidang jasa dan kontruksi ini, jauh sebelum terjun ke kancah politik, sudah banyak memberi manfaat kepada masyarakat melalui wadah organisasi Karang Taruna Karya dan Gelanggang Generasi Muda Kota Bandung. Ia dipercaya menjadi anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada Pemilu 2004.

Mengenai pencantuman namanya sebagai calon wakil walikota ini, putra daerah kelahiran Bandung 1965 ini, mengaku sebelumnya tidak pernah bercita-cita memperjuangkan nasib rakyat melalui wakil walikota. Tapi dalam setiap pekerjaan, ia hanya selalu berusaha memperbaiki kondisi rakyat. Mungkin justru karena itulah sehingga nasib suami Rani Rostiana ini jadi bicara lain. Kini, Deden harus siap memasuki wilayah politik yang tinggal satu langkah lagi menuju kursi nomor 2 di Pemkot Bandung. ■ AW



wikimedia.org

Bank Jabar Banten Raih Penghargaan

Karena dinilai sebagai bank pembangunan daerah teraktif dalam Linkage Program, Bank Indonesia (BI) memberikan penghargaan Kriya Pranala Award kepada PT Bank Jabar Banten. Penghargaan disampaikan Deputi Gubernur BI, S. Budi Rochadi di Jakarta. Linkage Program, merupakan prakarsa BI sebagai bagian dari implementasi terhadap Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dengan tujuan memperluas akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

"Anugerah yang diberikan BI merupakan suatu kehormatan dan penilaian terhadap komitmen Bank Jabar Banten dalam memberikan perhatian terhadap UMK," kata Direktur Utama PT Bank Jabar Banten H. Agus Ruswendi, bangga.

Melalui program UMK, menurut Agus, sampai 31 Desember 2007 Bank Jabar Banten telah menyalurkan fasilitas kredit melalui 36 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan jumlah plafon kredit Rp. 42,5 miliar. "Dari kucuran kredit itu, tingkat Non Performing Loan (NPL) sangat rendah, bahkan bisa dikatakan nol persen," ujarnya. Ke-36 BPR yang mendapatkan kucuran kredit itu tersebar di Jabar dan Banten. BPR di Kab. Indramayu terbanyak mendapat kucuran yakni untuk 9 BPR. Kemudian Kab. Serang Banten 7 BPR, dan Kab. Cianjur 6 BPR. Selain itu, juga dikucurkan di BPR Bekasi, Ciamis, Kab. Bogor, Cirebon, Kuningan, Labuan, Pandeglang, Kab./Kota. Bandung, Subang, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Ditambahkan, pengucuran kredit UMK melalui BPR merupakan komitmen Bank Jabar Banten dalam membantu permodalan bagi usaha mikro dan kecil. (AW)

Dewi, ibu beranak satu yang rutin memberikan susu formula pada bayinya yang baru berumur 1 bulan menyatakan kekhawatirannya pada isu susu formula yang terkontaminasi bakteri. "Produksi ASI saya sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan bayi saya, itu sebabnya saya pakai dengan susu formula," kata wanita yang sehari-harinya bekerja sebagai karyawan swasta tersebut.

Bakteri yang kabarnya mengontaminasi susu formula adalah bakteri *Enterobacter Sakazakii*. Bakteri ini dapat menghasilkan enterotoksin tahan panas yang dapat menyebabkan enteritis (diare), sepsis (infeksi), bahkan meningitis (radang otak). Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Sukman Tulus Putra menjelaskan di Indonesia sampai saat ini belum ada laporan tentang kasus bayi sakit akibat susu formula dan makanan bayi yang terkontaminasi bakteri *Enterobacter Sakazakii*.

Di luar negeri, hanya ditemukan 48 kasus selama kurun waktu 1961-2003. Penderitaanya terutama bayi berumur kurang dari satu tahun dengan sistem imunitas yang rendah, berat badan lahir di bawah 2500 gram, dan bayi prematur. Diketahui pula bakteri ini mati pada suhu 70 derajat Celcius. Jadi bila susu dicampur air panas bersuhu 70 derajat Celcius, maka dipastikan bakterinya akan mati.

Seperti diketahui, pertengahan Februari lalu tim peneliti dari Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Institut Pertanian Bogor (IPB) menyebutkan telah ditemukan 22,73 persen dari 22 sampel susu formula dan 40 persen dari 15 sampel makanan bayi terkontaminasi *Enterobacter Sakazakii*. Tim yang diketuai dr. Sri Estuning-sih dan beranggotakan drh Hernomoadi Huminto MVS, dr I Wayan T Wibawan dan dr Rochman Naim ini, meneliti produk susu formula dan makanan bayi tahun 2003. Dan sebagai pertanggungjawaban ilmiah IPB, hasilnya kemudian diumumkan di Jurnal tahun



Bila susu dicampur air panas bersuhu 70 derajat Celcius, maka bakteri *Enterobacter Sakazakii* akan mati.

foto: mlp berindo

Enterobacter Sakazakii Siapa Takut?

Kaum Ibu tidak perlu khawatir karena tidak ditemukan Enterobacter Sakazaki dalam susu formula.

2006. Meski termasuk informasi lama, temuan tim peneliti ini kemudian menjadi berita hangat di berbagai media membuat masyarakat khawatir. Pada 22 Februari 2008, pihak peneliti diundang oleh Departemen Pertanian (Dep-tan) untuk mempresentasikan kepada BPOM, Departemen Kesehatan, dan instansi terkait. Sesuai mempresentasikan penelitian itu, BPOM membentuk tim gabungan untuk turun ke lapangan memeriksa susu bayi yang beredar di pasaran.

Hasilnya, BPOM tidak menemukan bakteri *Enterobacter Sakazakii* pada susu formula bayi yang memiliki ijin edar dari BPOM dan terdaftar dalam berbagai merek.

"Sebanyak 96 sampel susu

berbagai merek produksi dalam dan luar negeri yang berharga murah maupun mahal yang diambil dari pasar tradisional maupun moderen dan terdaftar pada BPOM telah diteliti di laboratorium BPOM," kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Husniah Rubiana Thamrin awal April lalu.

Menurut dia, pengujian di laboratorium BPOM dilakukan dengan dua metode yaitu USFDA dan ISO/TS 22964: 2006, dan hasil pengujian seluruh sampel produk susu formula tersebut ternyata negatif atau tidak mengandung *Enterobacter Sakazakii*.

Pengujian terhadap 96 sampel susu formula tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar sekitar Rp 1,5 juta

setiap sampel.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Ikatan dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Sukman mengatakan, diare yang terjadi pada anak-anak Indonesia hingga saat ini belum pernah ada laporannya diakibatkan dari *Enterobacter Sakazakii*.

Laporan dari beberapa hasil penelitian terhadap penyakit diare pada anak lebih banyak disebabkan oleh bakteri lain dan virus, begitu pula dengan penyakit radang otak yang selama ini disebut-sebut disebabkan oleh *Enterobacter Sakazakii* yang terjadi di Indonesia ternyata tidak benar.

Kepala Badan Informasi Publik, Suprawoto menegaskan kembali, Badan POM telah melakukan pengujian laboratorium terhadap semua produk susu formula yang mendapatkan izin edar dari BPOM.

Selain itu diperlukan edukasi bahwa kemungkinan terkena bakteri *Enterobacter Sakazakii* sangat kecil sekali yaitu perbandingannya satu berbanding 1 miliar orang, makanya kasus *Enterobacter Sakazakii* hanya terkena pada 40 orang selama 40 tahun di seluruh dunia. ■ DGR

Lebih Mahal Pisang Goreng

Tidak hanya rumah atau mobil saja yang bisa disewa. Kini, hutan pun dapat disewa. Harga sewanya cukup murah, hanya Rp 300/m2/tahun. Lebih murah dibandingkan dengan harga sebuah pisang goreng.

Awal tahun ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan. Dengan alasan untuk biaya pemeliharaan hutan, PP itu memperbolehkan penyewaan 11,4 juta hektar hutan lindung yang ada. Dengan biaya sewa Rp 1,8 juta hingga Rp 3 juta per hektar untuk kawasan tambang skala besar dan Rp 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta untuk tambang minyak dan gas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi, instalasi



air dan jalan tol. Dengan tarif demikian, berarti sewa per meter per tahunnya hanya Rp 300 saja. Suatu harga yang tidak seimbang dengan kerusakan yang ditimbulkan. Niat pemerintah ini mendapat protes keras dari para aktivis lingkungan hidup, antara lain Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Luluk Uliyah, juru bicara Koalisi LSM Penolak PP No.2/

2008 berpendapat, PP ini memberikan legitimasi hukum pada pihak swasta untuk menyewa hutan dan mengubahnya menjadi area pertambangan. Bisa dibayangkan kerusakan yang akan ditimbulkan aktivitas pertambangan itu nantinya. Padahal saat ini saja, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Laju kerusakan hutan periode 1997-2000 mencapai 3,8 juta hektar per tahun. Angka ini meningkat terus. Data Badan Planologi Departemen Kehutanan 2003 mencatat terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak dimana 59,62 juta hektar berada di kawasan hutan.

Dalam rangkaian aksinya, para aktivis yang dipimpin Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif Nasional Walhi menyerahkan donasi sebesar Rp 1.614.000 ke Departemen Keuangan untuk menyelamatkan hutan. Donasi ini dikumpulkan dari masyarakat yang berkomitmen dan peduli akan keselamatan 11,4 juta hektar hutan lindung Indonesia. Walhi ingin menunjukkan bahwa dengan uang Rp 300 yang didonasikan, seseorang telah "menyewa" satu meter persegi hutan. Si penyewa akan mendapatkan kupon yang menyatakan bahwa ia adalah pemilik hutan lindung di daerah tertentu dan lahan itu tidak boleh ditambang. ■ DHE



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



MENGUCAPKAN
SELAMAT ATAS DILATIKNYA

H.DEDI MULYADI, SH. & Drs. H. DUDUNG. B. SUPARDI, MM.

Sebagai

BUPATI & WAKIL BUPATI PURWAKARTA

Masa jabatan tahun 2008 - 2013

Ketua
Dr.H.Sigit Soeroso

Wakil Ketua
H Saipudin Zukhri, SH.

Wakil Ketua
R. Dedi Herawan, S.S.Ap

Sekretaris DPRD
Drs.H Sofyan Efendi, Msi

Ketua Komisi I
Hidayat,S,THI

Ketua Komisi II
Lalam Martakusumah, SE M.Si

Ketua Komisi III
H.Dudung Abdulah

Ketua Komisi IV
H Pardjo Soeseno, SE,MM.

Ketua Badan Kehormatan
Drs. Thoha Mahsun

Ketua Badan Legislasi
H.Agus Supriatna, SH



Karakter Fahri di novel berbeda dengan versi layar lebarnya

Ayat-ayat Cinta di Dunia Blog

Film Ayat-ayat Cinta bisa membuat penonton terharu biru. Namun banyak pula yang memandang skeptis film ini dan kecewa setelah menontonnya.

Film Ayat-ayat Cinta (AAC) mendapat catatan 'fenomenal' di berbagai media massa. Goresan pena wartawan pun makin lancar mengolah berita kala mendapati para tokoh nasional termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla juga ikut-ikutan menonton film ini. Apalagi seorang tokoh Muhammadiyah mempromosikan film ini di sebuah iklan televisi.

Hingga akhir Maret, film ini sudah menembus angka tiga juta penonton setelah dirilis akhir Februari lalu. Memasuki minggu keempat, jumlah penonton masih membludak. Bahkan beberapa minggu sebelum dirilis secara resmi di bioskop-bioskop, versi bajakannya sudah beredar di internet. Boleh dibilang, film AAC membuat 'sejarah' dalam dunia perfilman Indonesia karena untuk pertama kalinya film dalam negeri dibajak sebelum dirilis resmi.

Film ini sebenarnya diangkat dari kisah novelnya yang saat pertama kali cetak pada tahun 2004 langsung menjadi best seller. Saking larisnya, novel ini sudah dicetak lebih dari 20 kali. Fakta tingginya penjualan novel AAC ini dianggap tidak terlalu aneh. Sebab novel ini memberikan sosok pahlawan yang selama ini menjadi angan-angan sebagian orang. Pemuda tampan yang dididik di lingkungan pesantren dengan tingkah laku yang baik dan sopan, tutur kata terjaga, ramah dan cerdas. Pemuda yang sempurna yang didamkan oleh ibu-ibu yang hendak

mencari menantu.

Larisnya novel ini membuat sang pengarang Habiburrahman El Shirazy mendapat tawaran dari MD Production untuk mengangkat novel AAC ke layar lebar. Singkat cerita, film AAC kemudian digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo, Salman Aristo & Ginatri S. Noer sebagai penulis naskah, dan Manooj Punjabi sebagai produser.

Kesuksesan film ACC bisa diraih setelah melalui jalan yang terjal dan berliku. Karena tidak bisa syuting di Kairo, AAC syuting di India (Jodhpur), Jakarta dan Semarang. Beberapa tempat di Jakarta dan Semarang pun disulap seperti di Kairo. Seperti perpustakaan dan ruang talaqi Masjid Al Azhar dibuat di Gedung Cipta Niaga, Jakarta Pusat. Flat Fahri, flat Maria dan Pasar El Khalili dibuat di Kota Lama dan Gedung Lawang Sewu, Semarang. Sedangkan ruang sidang pengadilan Fahri diset di Gereja Immanuel, Jakarta. Karena berbagai persoalan, AAC yang diperkirakan diproses dalam tempo setengah tahun akhirnya selesai 1,5 tahun.

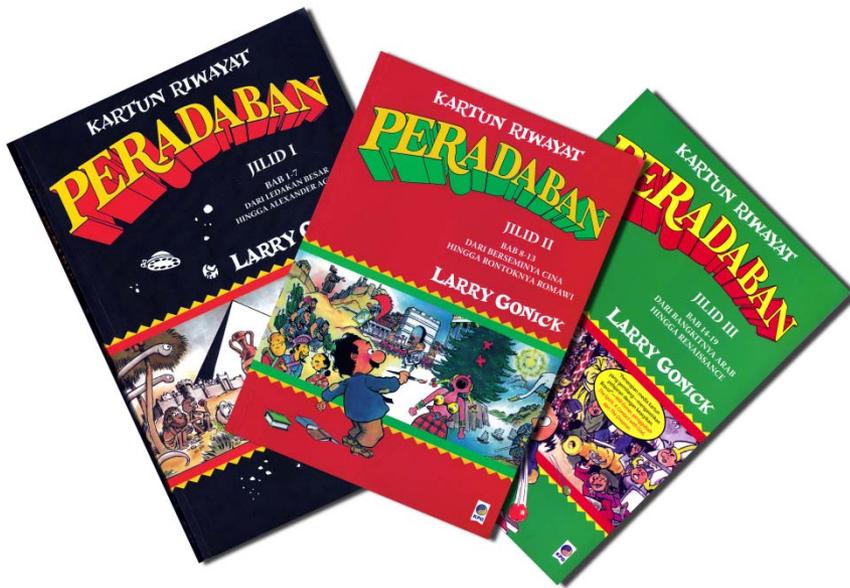
Meski sukses dan heboh, film AAC ini juga mendapat tanggapan dingin bahkan sinis dari sebagian orang. Nur Hidayat dalam tulisannya yang dimuat di blog Tempo Interaktif bertanya, "Apa yang terjadi dengan penonton film Indonesia? Mungkin mereka memang tengah mencari alternatif genre baru. Soalnya, selama beberapa tahun terakhir ini bioskop memang dipenuhi dengan film hantu, kisah cinta yang "mentah ceritanya", atau

komedi yang "diangkat dari situs porno." Ia kemudian mengutip pernyataan kritikus film Eric Sasono, yang berpedapat bahwa Hanung Bramantyo menafsirkan karakter Fahri menjadi berbeda. Fahri tak muncul sebagai seorang muslim, seorang lelaki yang kuat. Padahal, di novel itu, Fahri adalah seorang muslim sejati yang perilakunya sudah lama menjadi trend di sebagian kalangan muslim.

Sedangkan bagi yang lain, mencermati alur cerita dari sinopsisnya sudah cukup memberi penilaian akan film ini. "Temanya cinta anak muda. Biasa...!! Ciri khas film dan sinetron Indonesia. Hanya saja, cerita dalam film ini mengambil sisi kehidupan lain yang berbeda dari film dan sinetron pada umumnya." Kira-kira begitulah kesimpulan dari berbagai ulasan yang bermunculan di berbagai blog di internet.

Seorang blogger lainnya, Muhammad Rivai Andargini bahkan secara blak-blakan menyatakan bahwa novel "Ayat-Ayat Cinta" tidak terlalu bagus. Ia menilai penggambaran tokoh utama di novel ini kental dengan nuansa heroisme, tipikal seorang tokoh baik yang tidak ada keburukannya. Ia berpendapat Laskar Pelangi-nya Andrea Hirata jauh memukau dibandingkan Ayat-Ayat Cinta. Seorang karyawan swasta bernama Resti dalam blognya bahkan mengutarakan unek-unek teman kantornya yang kebetulan satu almamater dengan Habiburrahman El Shirazy. Temannya itu menyayangkan, "Apakah lulusan Al Azhar tidak mempunyai pekerjaan lain selain menuliskan novel romantis? Walau religius sekalipun, lihat dampaknya setelah jadi film. Lelaki dan perempuan yang bukan suami istri malah berpelukan. Bukankah malah jadi tak baik?"

Siapa saja bisa berpendapat skeptis dan negatif. Tapi lain halnya dengan Wapres Jusuf Kalla. "Filmnya menarik, mengharukan, latar lokasi bagus, Indonesia-Mesir. Kita semua berpendapat begitu," ujar Kalla (22/3) usai menonton bersama isteri dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Perhubungan Jusman Safii Djamil, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. ■ **RIE**



Judul :
Kartun Riwayat Peradaban

Penulis:
Larry Gonick

Penerbit :
Kepustakaan Populer Gramedia

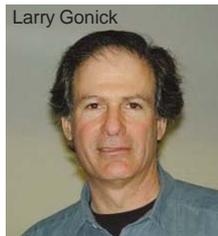
Kategori :
Sains Umum

Belajar Sejarah Lewat Komik

Bagi Anda yang tidak suka atau sulit memahami informasi tentang sejarah, komik karya Larry Gonick mungkin bisa merubah pikiran Anda.

Dunia perkomikan diperkaya dengan buku-buku komik baru. Salah satunya dengan terbitnya trilogi Kartun Riwayat Peradaban. Komik yang berjudul asli "The Cartoon History of the Universe" ini cukup unik. Tokoh narator yang mengantarkan cerita-cerita didalamnya digambarkan dengan ciri-ciri bermuka bulat dengan mata yang besar lagi bulat, hidung besar, kumis tebal, dan rambut acak-acakan setengah botak. Layaknya penampilan seorang ilmuwan. Mungkin karakter itu adalah potret dari sang pengarang, Larry Gonick yang merupakan lulusan Harvard College jurusan Matematika dengan predikat *Summa Cum Laude*.

Latar belakang pendidikan ini jualah yang membuat penulisan kartun ini cukup 'berat', serius dan kritis. Data-data sejarah dicantumkan secara benar. Demikian juga para tokoh didalamnya adalah tokoh sebenarnya. Tidak ada karakter yang menyusup menjadi tokoh jadi-jadian. Hanya saja setiap tokoh digambar dalam



Larry Gonick

bentuk karakter kartun yang lucu. Gonick juga menambahkan komentar-komentar nakal pada tiap tokoh sehingga mereka tampak sedikit konyol.

Dalam buku kartun riwayat peradaban jilid I, "Dari Ledakan Besar Hingga Alexander Agung" Gonick yang menggambar sejak tahun 1972 ini menceritakan sejarah lahirnya jagat raya sampai serbuan Alexander Agung ke India. Buku yang terdiri dari 362 halaman ini terbit pertama kali tahun 1990. Ini merupakan buku pertama Gonick. Terdiri dari tujuh bab, Gonick memampatkan kira-kira 15 miliar tahun perjalanan sejarah ke dalam Seri Kartun Riwayat Peradaban dengan kemahiran memadukan unsur pendidikan dan hiburan. Komik ini dimulai dari terjadinya 'Ledakan Besar'. Berlanjut ke munculnya organisme pertama di laut

Gonick juga membuat komik "Kartun Fisika", "Kartun Kimia", "Kartun Biologi Genetika", "Kartun Statistik", "Kartun Lingkungan dan yang terbaru "Kartun Peradaban Amerika".

yang terus berkembang hingga munculnya dinosaurus. Di bagian tengah buku ini digambarkan proses evolusi kera menjadi manusia purba. Bagi Anda yang anti teori evolusi Darwin, mungkin cuma bisa menggeleng-gelengkan kepala saat membacanya.

Sedangkan dalam Jilid II "Dari Berseminya Cina Hingga Rontoknya Romawi", Gonick yang terbit pertama tahun 1994, melukiskan bagaimana peradaban di India dan Tiongkok muncul dan berkembang. Dipaparkan juga bagaimana agama Hindu, Buddha, dan Kristen muncul. Dalam buku ini pula Gonick memperlihatkan bagaimana bangkit dan runtuhnya Kekaisaran Roma.

Kisah sejarah kemudian berlanjut ke Kartun Riwayat Peradaban Jilid III, "Dari Bangkitnya Arab Hingga Renaissance di Eropa", pertama kali terbit tahun 2002. Saat membahas tentang Arab, Gonick dengan bijak menghormati keyakinan orang lain. Dalam bab yang menceritakan tentang Arab dan kehidupan Nabi Muhammad, dia beri judul "Jangan Digambar Ya!". Meskipun ia sempat berkomentar, "Tak ada gambar orangnya - Komik macam apa tuh?"

Ketiga buku komik ini telah tersedia dalam bahasa Indonesia. Jadi bagi Anda yang ingin mengetahui sejarah dengan bacaan yang segar, ketiga buku karya Larry Gonick ini patut dibaca dan dikoleksi. Cara penulisan, gambar-gambar yang menarik serta komentar-komentar nakal membuat kita tidak bosan. Walaupun buku ini tebal dan tidak berwarna, dijamin Anda melahapnya habis. Satu hal yang patut dicermati, meskipun buku ini jenis komik, tapi bukan bacaan anak-anak. Hal ini disebabkan karena banyak memuat gambar-gambar kekerasan yang sadis. Seperti pembunuhan, hukuman mati, perang, bahkan tentang skandal seks yang terjadi hampir di tiap peradaban.

Meminjam pernyataan Lynn Johnson, kartunis For Better or For Worse, yang mengatakan didukung telaah sumber yang baik dan ilustrasi yang jenaka, cerita bergambar karya Larry Gonick membuat otak yang 'tumpul' pun mampu menyerap dan menyimpan informasi yang sesungguhnya. Selamat membaca. ■ RIE

TokohINDONESIA



MAJALAH BERBASIS WEBSITE

www.tokohindonesia.com

THE EXCELLENT BIOGRAPHY